



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008-2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah terpilih harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) Tahun masa Jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 – 2012;

- Mengingat : 1. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008-2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah merupakan penjabaran dan Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih selama 5 (Lima) Tahun masa jabatannya yang isinya memuat arah kebijakan Keuangan Daerah strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat Indikatif.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Pasal 2

Sistematika Rencana Program Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas dan kebijakan umum anggaran;
- i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
- j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB III ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008-2012.

Pasal 3

Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) Tahun masa Jabatan Kepala Daerah terpilih periode 2008-2012.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sebelum tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2017 setelah berakhirnya masa Jabatan Walikota paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Desember 2008
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 96

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TASIKMALAYA
NOMOR : 15 Tahun 2008
TANGGAL: 9 Desember 2008

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 – 2012**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pelaksanaan desentralisasi, bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Sesuai batasan dalam Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang disebut dengan “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Lebih rinci lagi, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD tersebut, antara lain memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD juga sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah terpilih selama menjadi Pimpinan Pemerintah.

Selama masa jabatan Kepala Daerah terpilih, RPJMD merupakan acuan dan pedoman dasar pembangunan yang ingin dicapai daerah berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah. Program yang direncanakan sesuai dengan kewenangan dan urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam undang-undang dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

RPJMD sebagai pedoman manajerial taktis strategis Kepala Daerah beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, juga digunakan sebagai tolok ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menilai pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap

akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya menyusun RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012.

1. Pengertian RPJMD Kota Tasikmalaya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan dan program pembangunan daerah serta kaidah pelaksanaannya.

Penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya berpedoman pada substansi perencanaan yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJP Kota Tasikmalaya dan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. Sehubungan RPJMD maupun RPJPD Provinsi Jawa Barat belum ditetapkan, maka penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya dilakukan dengan memperhatikan Renstra Propinsi Jawa Barat Tahun 2004-2009. Penyusunan RPJMD ini tetap dilaksanakan sesuai amanat PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menegaskan bahwa RPJMD harus ditetapkan 6 (enam) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah hasil pemilihan langsung.

RPJMD Kota Tasikmalaya merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun asas dan tujuan perencanaan tersebut adalah dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

RPJMD menjadi pemberi arah bagi semua lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, dunia usaha, lembaga nonpemerintah dan masyarakat luas, sehingga sepanjang proses penyusunannya telah mencerminkan keterlibatan pihak-pihak tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004), RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (hal ini telah diacu oleh Pemerintah Pusat dalam penetapan RPJM Nasional yang disahkan melalui Peraturan Presiden). Penetapan dengan Peraturan Kepala Daerah ini berkenaan dengan substansi RPJMD yang merupakan rencana kerja lima tahun sebagai acuan bagi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun. Sementara itu, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, RPJMD dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, apabila substansi RPJMD terkait dengan pendanaan penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan sumber pendanaan APBD, yang harus

dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah kepada lembaga legislatif daerah (DPRD). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepastian mengenai *legal aspect* dari dokumen RPJMD bergantung pada substansinya dan pada hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD.

2. Proses Penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya

Proses pelaksanaan penyusunan RPJMD meliputi tahapan dan langkah – langkah sebagai berikut:

a. Penyiapan Rancangan Awal RPJMD;

Rancangan awal RPJMD disiapkan oleh Kepala Bapeda untuk mendapat gambaran awal visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan pembangunan, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Muatan rancangan awal RPJMD menjadi pedoman bagi Kepala SKPD dalam penyusunan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

b. Penyiapan Rancangan Renstra-SKPD;

- 1) Penyiapan rancangan Renstra-SKPD merupakan tanggung jawab Kepala SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 2) Program-program dalam rancangan Renstra-SKPD bersifat indikatif, memperhatikan keberhasilan program-program yang sudah dicapai sebelumnya, dan diselaraskan dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

c. Penyusunan Rancangan RPJMD

Rancangan RPJMD merupakan integrasi rancangan awal RPJMD dengan rancangan Renstra-SKPD, yang penyusunannya menjadi tanggung jawab Kepala Bapeda dan menjadi masukan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah.

d. Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

- 1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan RPJMD, dibawah koordinasi Kepala Bapeda;
- 2) Mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMD;

e. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

Penyusunan rancangan akhir RPJMD merupakan tanggung jawab Kepala Bapeda dengan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Menengah Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya

diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah.

f. Penetapan RPJMD

Agar RPJMD menjadi dokumen perencanaan jangka menengah daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kepala Daerah dilantik. Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah tentang RPJMD ini menjadi pedoman bagi Kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

RPJMD Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:

- a. Untuk dijadikan sebagai landasan atau pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kota Tasikmalaya dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Untuk memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) agar penyelenggaraan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, bersasaran dan sinkron dengan arah pembangunan nasional dan pembangunan provinsi;
- c. Sebagai suatu upaya pemecahan dan antisipasi bagi kepentingan dan kebutuhan mutakhir daerah untuk masa 5 tahun mendatang ditambah 1 tahun masa transisi.

2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan di atas, RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2008 - 2012 ditujukan untuk:

- a. Memberikan fasilitasi dan dukungan koordinasi antar pelaku pembangunan di Kota Tasikmalaya;
- b. Menjamin terciptanya efektivitas, efisiensi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah dan antarfungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kota Tasikmalaya yang efektif, efisien, berkeadilan serta berkelanjutan;
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Kota Tasikmalaya;
- e. Menjaga kesinambungan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya dalam lima tahunan pada bingkai jangka panjangnya.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan RPJM Daerah ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Landasan idil Pancasila.
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
3. Landasan operasional meliputi:
 - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
 - b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
 - d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan

- n. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPJMD memiliki kedudukan sebagai pedoman umum bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya, pelaku bisnis dan sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka dokumen perencanaan di atasnya (tingkat nasional dan provinsi) adalah sebagai pedoman bagi RPJMD, dengan memperhatikan pula kebijakan penataan ruang yang telah disusun sebelumnya sehingga mampu menjamin pemanfaatan ruang secara optimal dalam kurun 5 tahun kedepan. Penyusunan dokumen RPJMD juga mempedomani substansi perencanaan yang tertuang dalam RPJP Kota Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025.

Adapun hubungan RPJMD Kota Tasikmalaya dengan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tasikmalaya (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD adalah sebagai pedoman yang harus diacu dalam rangka memenuhi target capaian masing-masing SKPD dalam mewujudkan kinerja yang berlandaskan pada anggaran.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang mengapa RPJMD Kota Tasikmalaya perlu disusun, maksud dan tujuan dari penyusunan RPJMD, landasan hukum dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika pembahasan yang memuat garis besar penulisan Dokumen RPJMD.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN

Memuat gambaran umum kondisi daerah Kota Tasikmalaya yang terdiri dari kondisi saat ini. Adapun kondisi daerah yang dimaksud mencakup kondisi geografis, kondisi perekonomian daerah, kondisi sarana dan prasarana daerah, kondisi sosial budaya daerah dan kondisi pemerintahan umum.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat gambaran kondisi pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan yang digambarkan oleh gambaran kondisi PDRB 5 tahun terakhir (2001-2006), laju pertumbuhan perekonomian (LPE), Pendapatan perkapita, inflasi dan sumber – sumber Pendapatan Daerah.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat prediksi kondisi daerah hingga 5 (lima) tahun yang akan datang, serta rumusan kondisi daerah yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 rencana.

BAB V. VISI, MISI, DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Memuat rumusan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya hingga tahun 2012.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah memuat kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai pedoman pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam upaya mewujudkan visi dan misi.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat arah pembangunan daerah selama lima tahun kedepan dan kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang disertai dengan program pembangunan daerah.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Memuat rencana program prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam tema tahunan dan kebijakan umum anggaran yang terdiri dari perkiraan pendapatan, perkiraan belanja dan perkiraan APBD selama 5 tahun kedepan

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB X PROGRAM TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat rancangan program indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode RPJMD berakhir untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah. Selain itu, bagian ini juga memuat kaidah pelaksanaan RPJMD

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN

A. ORIENTASI WILAYAH

Kota Tasikmalaya secara geografis berada di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat dengan jarak dari ibukota provinsi, Bandung, ±105 km dan dari ibukota negara, Jakarta, ±255 km. Wilayah ini berada pada posisi $108^{\circ} 08' 38''$ - $108^{\circ} 24' 02''$ BT dan $7^{\circ} 10'$ - $7^{\circ} 26' 32''$ LS, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis (dengan batas Sungai Citanduy);
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (dengan batas Sungai Ciwulan); dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.

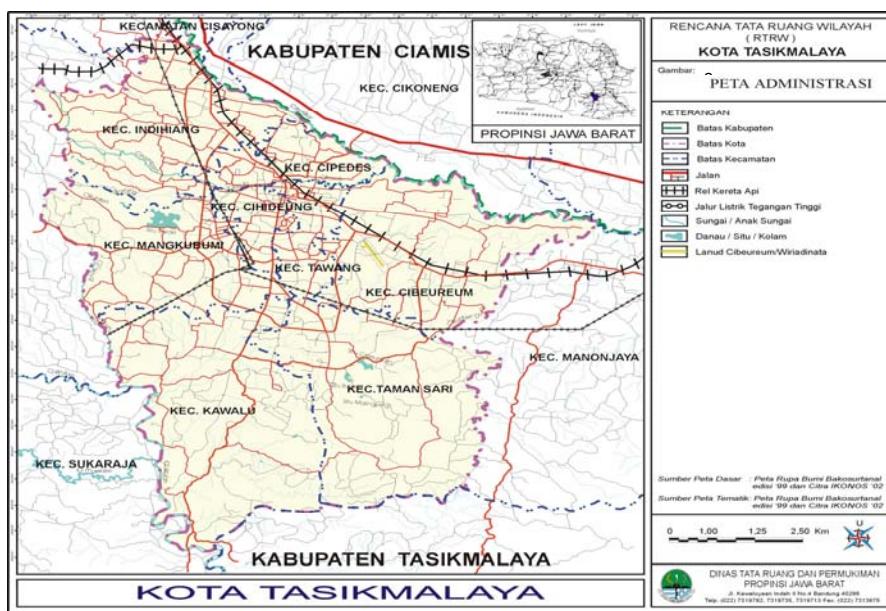
Kota Tasikmalaya terdiri atas 69 kelurahan yang berada pada 10 kecamatan (Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu). Luas wilayah keseluruhan 171,56 km², dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 sebanyak 630.191 jiwa, maka kepadatan kotor penduduknya (*gross density*) mencapai sekitar 3.673 jiwa/km².

Pada penjelasan lebih lanjut, data dasar yang dipergunakan masih mengacu pada wilayah administratif Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 8 kecamatan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya). Dengan demikian, data-data tentang kecamatan baru hasil pemekaran masih tergabung dengan kecamatan induk.

Gambar 2.1
Orientasi Wilayah Kota Tasikmalaya



Gambar 2.2
Batas Wilayah Administrasi Kota Tasikmalaya



B. KONDISI FISIK DASAR

1. Bentang Alam

Berdasarkan bentang alamnya, Kota Tasikmalaya termasuk ke dalam kategori dataran sedang, dengan ketinggian wilayah berada pada kisaran 201 mdpl (terendah, di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu) sampai dengan 503 mdpl (tertinggi, di Kelurahan Bungursari Kecamatan Indihiang). Dilihat dari kemiringan lahananya (kelerengan) terdapat beberapa wilayah yang memiliki kemiringan lahan cukup tinggi, di antaranya di Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Cibeureum, sehingga perkembangan kegiatan perkotaan pada dua kecamatan tersebut perlu dilakukan secara selektif.

Tabel 2.1
Ketinggian Wilayah di Kota Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Ketinggian di Atas Permukaan Laut	
		Terendah	Tertinggi
1.	Kawalu	201 mdpl, di Kelurahan Urug	445 mdpl Kelurahan Gunung Tandala
2.	Tamansari	347 mdpl Kelurahan Setiamulya	448 mdpl Kelurahan Setiawargi
3.	Cibeureum	250 mdpl Kelurahan Singkup	362 mdpl Kelurahan Setiajaya
4.	Tawang	340 mdpl Kelurahan Lengkongsari	359 mdpl Kelurahan Kahuripan
5.	Cihideung	349 mdpl Kelurahan Nagarawangi	365 mdpl Kelurahan Cilembang
6.	Mangkubumi	343 mdpl Kelurahan Sambongjaya	473 mdpl Kelurahan Cipawitra
7.	Indihiang	410 mdpl Kelurahan Sukajaya	503 mdpl Kelurahan Bungursari
8.	Cipedes	333 mdpl Kelurahan Sukamanah	398 mdpl Kelurahan Cipedes

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka tahun 2006

2. Geologi dan Jenis Tanah

Litologi Kota Tasikmalaya terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkatan gunung api tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Pada tingkatan gunung api muda, susunan batuan yang dihasilkan mulai dari breksi gunung api, lahar, tufa berlapis, batuan andesit sampai basal yang tersebar secara terbatas di bagian tenggara.

Jenis tanah yang mendominasi permukaan adalah jenis tanah asosiasi regosol kelabu, regosol kelabu coklat, litosol, dan latosol kemerah-merahan. Jenis tanah yang memiliki sebaran terluas adalah jenis tanah asosiasi regosol kelabu dan litosol yang tersebar di bagian tengah, selatan, timur, dan barat. Di bagian utara, sebaran terdiri dari jenis tanah latosol coklat kemerah-merahan. Sementara itu, kedalaman efektif tanah (*solum*) wilayah bagian barat dan timur berada pada kisaran 30 - 60, sedangkan di bagian utara, tengah, dan selatan berada pada kisaran 60 - 90 cm.

3. Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi tipe curah hujan Schmidt dan Ferguson yang didasarkan pada pertimbangan banyaknya bulan basah (>200 mm) dan bulan kering (<100 mm), tipe curah hujan di wilayah Kota Tasikmalaya termasuk tipe curah hujan C yang memiliki 4 bulan kering dan 8 bulan basah. Sedangkan berdasarkan klasifikasi iklim Mohr, wilayah Kota Tasikmalaya termasuk ke dalam klasifikasi iklim II. Rata-rata curah hujan per bulan 278,55 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sampai dengan April dan curah hujan terendah antara bulan September sampai dengan Oktober. Perbandingan bulan basah dan kering mencapai 98% bulan basah atau termasuk iklim basah. Dengan iklim seperti ini cadangan air tanah diharapkan mencukupi, karena proses infiltrasi air cukup tinggi. Suhu rata-rata 25,7⁰ C, dengan kisaran antara 21,1⁰ C (terendah) dan 27,9⁰ C (tertinggi).

4. Hidrologi

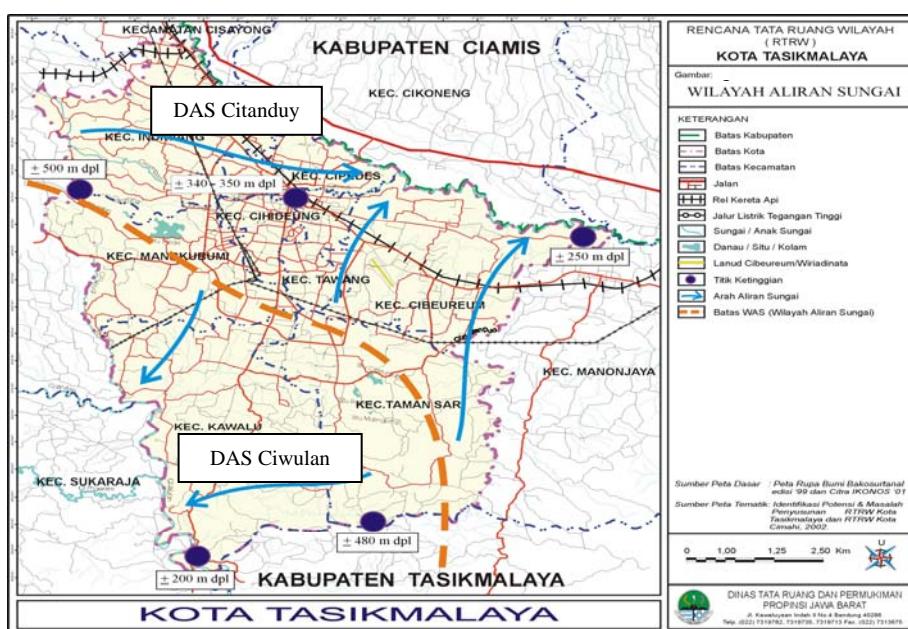
Geomorfologi Kota Tasikmalaya membagi wilayah Kota Tasikmalaya ke dalam dua wilayah aliran sungai, yaitu di sebelah utara hingga timur laut merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy dan di sebelah barat hingga barat daya merupakan DAS Ciwulan. Sungai Citanduy merupakan batas wilayah di bagian utara mulai dari Cisayong dan Indihiang, mengalir ke arah timur melalui Kecamatan Manonjaya (Kabupaten Tasikmalaya), sedangkan DAS Ciwulan berhulu di Gunung Galunggung, mengalir ke arah selatan melalui Kecamatan Singaparna menuju Kecamatan Sukaraja (Kabupaten Tasikmalaya) yang terdiri dari Sungai Ciwulan, Sungai Cikunir, Sungai Cimerah, Sungai Cikupang, dan Sungai Cisaruni

Sistem akuifer di wilayah Kota Tasikmalaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan air, secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- Sistem akuifer tunggal pada unit vulkanik terdiri dari endapan kipas alluvium yang merupakan deposit dari lahar berkisar dan bolder lava, mempunyai luas penyebaran sekitar 140 km², berada pada ketinggian antara 300 sampai 500 m dan mempunyai ketebalan kurang dari 40 m, kedalaman air muka tanah tersebut berkisar kurang dari 5 m dari permukaan tanah setempat.
- Sistem akuifer pada celahan-celahan batuan sedimen tersier yang termasuk pada formasi halang, formasi bentang dan formasi genteng tersebar di bagian selatan dengan kedalaman akuifer berkisar antara 40 m sampai 150 m dengan muka air tanah berkisar antara 5 – 12 m dari permukaan tanah setempat.
- Sistem akuifer rekahan-rekahan yang dibentuk oleh batu gamping tersebar di bagian selatan sekitar wilayah Sukaraja ukurannya mempunyai kedalaman muka air tanah lebih dari 10 m atau langka.

Air tanah dangkal di Kota Tasikmalaya dapat ditemukan pada kedalaman mulai kurang dari 3 m hingga 10 meter. Untuk sumur gali, pada kedalaman 1,5 – 7 meter sudah dapat keluar air.

Gambar 2.3
Peta Daerah Aliran Sungai



Disamping itu, terdapat pula 3 mata air, yaitu: mata air Cibunigeulis, Cibangbay, dan Cianjur II dengan debit masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Sumber Mata Air di Kota Tasikmalaya

No	Nama Mata Air	Debit (liter/det)		Lokasi		Keterangan
		Maks	Min	Kelurahan	Kecamatan	
1.	Cibunigeulis	60	15	Cibunigeulis	Bungursari	Dimanfaatkan PDAM
2.	Cibangbay	81	50	Setiawargi	Tamansari	Belum dimanfaatkan
3.	Cianjur II	65	18	Linggajaya	Mangkubumi	Lahan milik peorangan

Sumber: Renstra Kota Tasikmalaya 2002 – 2007.

Di Kota Tasikmalaya terdapat 7 danau/situ, yaitu: Situ Gede, Situ Cicangri, Situ Rusdi, Situ Bojong, Situ Malingping, Situ Cipajaran, Situ Cibeureum. Kondisi situ-situ tersebut pada saat ini cukup memprihatinkan, dimana areal yang dialirinya terus mengalami penurunan. Situ Gede merupakan situ yang paling banyak mengaliri areal pesawahan, yaitu sekitar 230 Ha, dibanding situ-situ yang lainnya, masing-masing: Situ Cicangri (65 Ha), Situ Rusdi (98 Ha), Situ Bojong (25 Ha), Situ Malingping (30 Ha), Situ Cipajaran (20 Ha), dan Situ Cibeureum (69 Ha).

C. PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan eksisting di Kota Tasikmalaya didominasi oleh penggunaan di sektor pertanian (sekitar 69%), meliputi penggunaan lahan sawah, tegalan/kebun, ladang huma, hutan rakyat, hutan negara, dan kolam/empang. Sawah di Kota Tasikmalaya yang luasnya pada tahun 2006 sekitar 6.269 Ha (36,54%), 2.784 Ha diantaranya merupakan sawah beririgasi teknis dengan frekuensi panen dua kali atau lebih dalam setahun.

**Tabel 2.3
Penggunaan Lahan di Kota Tasikmalaya
Tahun 2006**

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Percentase (%)
1. Sawah :	6.269	36,54
Irigasi Teknis	2.784	16,23
Irigasi Setengah Teknis	1.152	6,71
Irigasi Sederhana	126	0,73
Irigasi Desa/Non PU	1.077	6,28
Tadah Hujan	1.130	6,59
2. Bukan Sawah :	10.887	63,46
Pekarangan	3.950	23,02
Tegalan/Kebun	2.146	12,51
Ladang Huma	624	3,64
Sementara Tidak Digunakan	9	0,05
Hutan Rakyat	2.510	14,63
Hutan Negara	375	2,19
Lain-lain Lahan Kering	592	3,45
Kolam/Empang	681	3,97
Jumlah	17.156	100,00

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka Tahun 2006, (diolah).

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir hingga tahun 2006, luas wilayah lahan basah (sawah) berkurang sebesar 0,71%, yaitu dari sekitar 6.391 Ha menjadi 6269 Ha. Lahan pesawahan ini sebagian besar telah beralih fungsi menjadi lahan-lahan terbangun, terutama dimanfaatkan sebagai kawasan-kawasan permukiman dan komersial. Peralihan fungsi ini paling banyak terjadi pada kawasan dominasi perkotaan dan kawasan transisi dari perdesaan ke perkotaan. Pada kedua kawasan tersebut terdapat lahan-lahan sawah yang didukung oleh prasarana pertanian berupa saluran irigasi. Saluran irigasi yang sangat menonjol peranannya adalah Saluran Irigasi Cikunten II yang melintasi bagian

tengah Kota Tasikmalaya, mengalir dari arah barat (Kecamatan Mangkubumi) ke arah timur (Kecamatan Cibeureum).

Tabel 2.4
Persentase Penggunaan Lahan di Kota Tasikmalaya
Tahun 2003-2006

Penggunaan Lahan	Tahun			
	2003	2004	2005	2006
1. Sawah	37,25	37,99	37,43	36,54
2. Bukan Sawah :				
Pekarangan	22,56	23,01	22,67	23,02
Tegal / Kebun	15,89	16,20	15,97	12,51
Ladang Huma	2,26	2,31	2,27	3,64
Hutan Rakyat	8,44	14,43	14,22	14,63
Hutan Negara	3,09	2,14	2,10	2,19
Kolam / Empang	3,74	3,81	3,75	3,97
Sementara tidak diusahakan	0,12	0,12	1,59	0,05
Lain-lain Lahan Kering	6,66	-	-	3,45
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

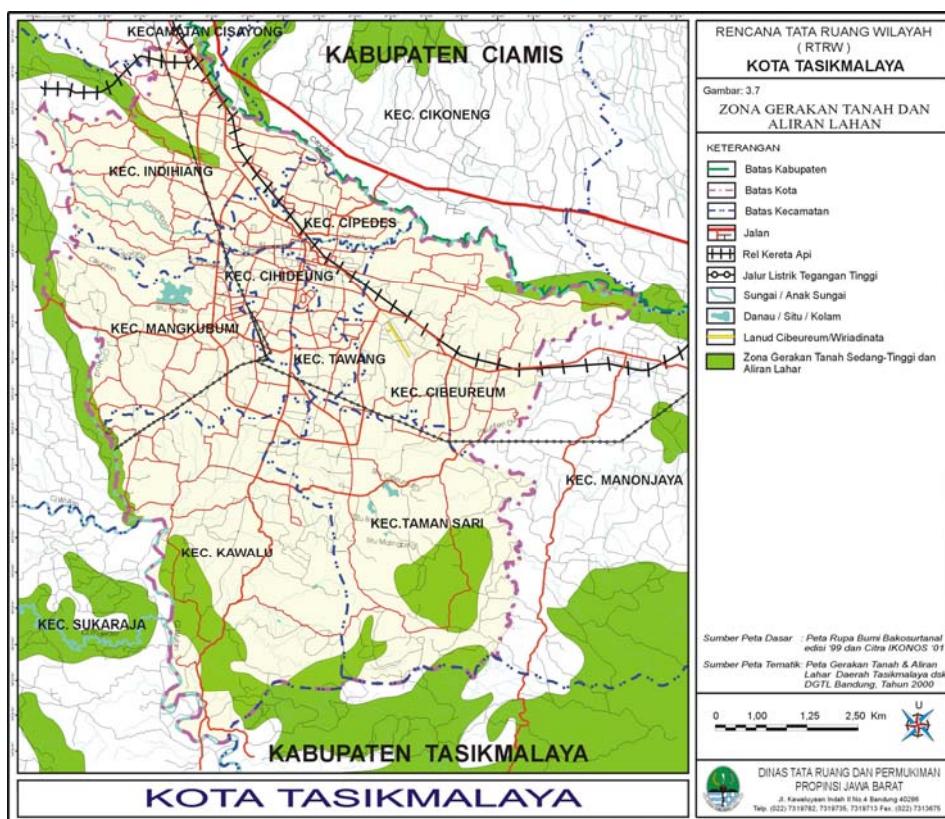
Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka (diolah).

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya 2014, hanya sekitar 455 Ha (2,56%) kawasan yang berfungsi lindung yang ditetapkan dalam wilayah Kota Tasikmalaya. Kawasan lindung itu pun hanya sebatas kawasan lindung setempat, berupa sempadan sungai, sempadan jaringan listrik, dan sempadan situ/danau. Namun demikian, RTRW Kota Tasikmalaya 2014 menetapkan pula adanya kawasan budidaya yang berfungsi lindung, yaitu : hutan produksi milik Perhutani dan hutan rakyat, yang terletak di bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, seluas 162,55 Ha atau sekitar 0,95% dari luas seluruh wilayah Kota Tasikmalaya.

D. DAERAH RAWAN BENCANA

Potensi bencana cukup besar yang dapat terjadi di Kota Tasikmalaya adalah dampak dari aktivitas Gunung Galunggung. Gunung ini berada di luar wilayah Kota Tasikmalaya, berjarak sekitar 17 km arah barat laut. Gunung ini merupakan gunung api yang masih aktif, letusan terakhir terjadi pada tahun 1982 mengakibatkan kerusakan yang cukup parah di wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk Kota Tasikmalaya. Beberapa lokasi yang termasuk daerah waspada antara lain di sekitar aliran Sungai Ciwulan dan Sungai Cimerah serta di beberapa bagian wilayah bagian timur dan utara Kota Tasikmalaya

Gambar 2.4
Peta Gerakan Tanah dan Aliran Lahar



Wilayah-wilayah ini termasuk ke dalam tipologi zona kerawanan sangat tinggi. Sehingga apabila terjadi aktivitas gunung Galunggung, wilayah ini berpotensi terkena aliran lava, awan panas, guguran batu pijar, hujan abu, lumpur panas, dan gas beracun.

Disamping ancaman aktivitas gunung berapi, potensi bencana di Kota Tasikmalaya dapat pula berupa gerakan tanah. Zona gerakan tanah di Kota Tasikmalaya sebagian besar berada di sepanjang sungai, seperti Sungai Cikunir, Sungai Ciwulan dan sebagian Sungai Citanduy, terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan lembah sungai yang berupa tebing peralihan litologi.

E. KONDISI PRASARANA DAN SARANA

Ketersediaan prasarana dan sarana diyakini oleh banyak kalangan sebagai faktor yang dapat mengakselerasikan perkembangan perekonomian suatu wilayah, sebab melalui prasarana dan sarana berbagai kemudahan dapat diperoleh, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Sarana pendukung pendidikan pada saat ini sudah cukup tersedia di Kota Tasikmalaya, mulai sarana untuk pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan sampai ke tingkat perguruan tinggi/sekolah tinggi. Selain itu, terdapat pula pondok pesantren di setiap kecamatan, yang mencirikan pola hidup masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis. Secara kuantitatif fasilitas pendidikan yang ada sudah mencukupi kebutuhan penduduk, pada tahun 2006 jumlah penduduk Kota Tasikmalaya menurut usia sekolah

berjumlah sekitar 159.143 jiwa atau sekitar 25,76% dari jumlah penduduk Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.5
Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Tasikmalaya
Tahun 2006

Jenis	Kecamatan								Jumlah
	Kwlu	Tmsr	Cbrm	Twng	Chdg	Mkbm	Indg	Cpds	
TK	6	2	7	13	12	7	5	11	63
RA	7	9	20	10	6	11	17	8	88
SD	34	21	37	39	30	34	37	35	267
MI	8	6	15	1	3	5	7	3	48
SMP	4	3	4	11	5	4	7	5	43
MTs	5	5	9	1	2	5	7	2	36
SMA	1	1	2	8	4	1	5	3	25
MA	4	1	4	2	2	1	4	1	19
SMK	-	2	1	6	4	1	2	7	23
PT/ST	-	2	1		1	1	1	4	10
Pontren	47	45	36	30	27	8	15	6	214
Jumlah	116	97	136	121	96	78	107	85	836

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka, 2006.

Jumlah SMK sebesar 30 % dari jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (23 unit SMK dibanding 67 unit sekolah SLTA), sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa komposisi perbandingan SMK dan SMA dituntut mencapai komposisi 70% – 30%. Kebijakan dimaksud harus disikapi oleh daerah dengan kebijakan daerah dalam hal kemudahan dan ketegasan ijin pendirian SMK, peningkatan pembinaan dan menjamin ketersediaan jumlah pendidik/tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan serta meningkatkan hubungan kerjasama dengan kalangan dunia usaha.

Pondok pesantren di Kota Tasikmalaya berjumlah 214 unit atau 25% dari jumlah total lembaga pendidikan. Sebagian besar berada di Kecamatan Kawalu, Tamansari dan Cibeureum. Untuk Kecamatan Tamansari dan Cibeureum seperti diketahui bahwa kondisi alam yang berbukit dengan kecenderungan bahwa ketersediaan air bersih dan kondisi jalan yang kurang memadai.

Untuk Kecamatan Kawalu, seperti diketahui bahwa Kecamatan Kawalu ada sentra produksi busana muslim dan bordir tersebar di Kota Tasikmalaya. Di sisi lain bahwa di Kawalu terdapat jumlah sekolah/lembaga pendidikan yang paling banyak setelah Kecamatan Tawang. Keadaan tersebut menuntut perhatian bersama bahwa lembaga pendidikan tersebut harus saling berkontribusi antara lembaga pendidikan dan dunia usaha.

Namun berdasarkan data yang ada (tabel 2.6) bahwa cukup banyak ruang kelas yang sudah rusak. Kondisi ruang rusak berat dan ruang rusak ringan mencapai sekitar 17% dan kondisi baik mencapai sekitar 66%. Data tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan bahwa adanya pemeliharaan terhadap kondisi

bangunan yang baik, peningkatan kondisi rusak ringan dan kondisi bangunan yang rusak berat harus tuntas dalam lima tahun kedepan.

Tabel 2.6
Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Tingkat Pendidikan
Tahun 2006

Jenis	Kecamatan			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
TK	88	27	10	125
RA	111	58	31	200
SD	922	253	414	1.589
MI	134	78	66	278
SMP	436	68	45	549
MTs	119	50	6	175
SMA	258	49	21	328
MA	84	8	-	92
SMK	206	26	7	239
Jumlah	2.358	617	600	3.575

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka, 2006.

Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan usia sekolah, pada Tahun 2006 usia TK mencapai angka 23.684 orang, usia SD sebanyak 68.730 orang, usia SLTP sebanyak 33.694 orang sedangkan usia SLTA sebanyak 33.035 orang.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Usia Sekolah Di Kota Tasikmalaya
Tahun 2006

Jenis	Kecamatan				Jumlah
	TK (5-6 thn)	SD (7-12 thn)	SLTP (13-15 thn)	SLTA (16-18 thn)	
Kawalu	3.787	10.868	5.481	5.412	25.548
Tamansari	2.857	7.443	3.605	3.225	17.130
Cibeureum	3.188	9.372	4.343	4.007	20.910
Tawang	3.113	8.995	4.268	3.941	20.317
Cihideung	3.294	9.988	4.961	4.378	22.621
Mangkubumi	2.888	8.425	4.156	4.368	19.837
Indihiang	2.499	7.570	3.738	4.166	17.973
Cipedes	2.058	6.069	3.142	3.538	14.807
Jumlah	23.684	68.730	33.694	33.035	159.143

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka, 2006.

Dibidang kesehatan, prasarana yang ada sudah cukup memenuhi standar kebutuhan minimal, dimana untuk tiap kecamatan sedikitnya terdapat satu puskesmas ditambah dengan beberapa puskesmas pembantu. Kondisi ini menggambarkan adanya akses masyarakat dibidang kesehatan yang mencukupi. Pada saat ini terdapat 4 rumah sakit umum, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 3 rumah sakit umum swasta. Disamping itu terdapat pula 5 rumah sakit bersalin dan 1 rumah sakit bedah yang keseluruhannya dimiliki swasta. Cakupan pelayanan rumah sakit-rumah sakit ini tidak terbatas hanya pada penduduk Kota Tasikmalaya saja, namun melayani pula penduduk daerah lain di sekitar Kota Tasikmalaya.

Begitu pula dengan fasilitas peribadatan, khususnya bagi penduduk yang beragama Islam, ketersediaan prasarana dan sarannya sudah cukup memadai. Pola persebaran fasilitas ini relatif merata di hampir semua bagian wilayah. Hal ini tidak mengherankan, mengingat masyarakat Kota Tasikmalaya sejak lama telah dikenal sebagai masyarakat yang Islami.

Tabel 2.8
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Tasikmalaya Tahun 2006

No.	Kecamatan	RSU	RS Khusus	Puskesmas	Pustu	Pos Yandu
1	Cihideung	-		2	-	69
2	Cipedes	-		3	1	73
3	Tawang	2		2	-	65
4	Indihiang	1		2	5	124
5	Cibeureum	-		2	6	112
6	Tamansari	1		1	3	73
7	Kawalu	-		1	3	90
8	Mangkubumi	-		1	5	86
Jumlah		4	6	14	23	692

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka, 2006

Sebagai PKW Priangan Timur, kegiatan perekonomian di Kota Tasikmalaya didukung dengan keberadaan berbagai prasarana dan sarana perdagangan dan jasa yang cukup memadai, meliputi pasar tradisional, pasar modern, bank, asuransi, koperasi, dan lain sebagainya.

Tabel 2.9
Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah di Kota Tasikmalaya Tahun 2006

No.	Keterangan	Jumlah (unit)
1	Fasilitas Perdagangan - Pasar Tradisional - Pasar Modern - Pasar lainnya	6 8 2
2.	Lembaga Keuangan - Bank Devisa - Bank Non Devisa - KUD - Koperasi Non KUD	26 3 9 339

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, 2006

Sarana perhotelan di Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu ujung tombak yang harus dipenuhi oleh suatu kota yang akan mengembangkan sektor kepariwisataan, menunjukkan tren yang terus berkembang, parameter yang dipergunakan antara lain adalah jumlah kamar yang tersedia yang menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan pada laju pertumbuhan tingkat kedatangan tamu dari hanya sebesar 2,2% pada tahun 2003 menjadi sebesar 9,47% pada tahun 2004. Hal ini setidaknya

menggambarkan bahwa terjadinya peningkatan pada daya tarik Kota Tasikmalaya bagi warga luar Kota Tasikmalaya, khususnya daya tarik dari sektor pariwisata.

Tabel 2.10
Rekapitulasi Data Penginapan dan Jumlah Tamu di Kota Tasikmalaya
Tahun 2002 - 2004

Klasifikasi	2002			2003			2004			2002		2003		2004	
	Banyaknya			Banyaknya			Banyaknya			Banyaknya Tamu		Banyaknya Tamu		Banyaknya Tamu	
	Unit	Kamar	Tempat Tidur	Unit	Kamar	Tempat Tidur	Unit	Kamar	Tempat Tidur	Asing	Indonesia	WNA	WNI	WNA	WNI
Bintang 1				1	31	46	1	40	53			4	1742	1679	0
Bintang 2	1	40	53	1	40	53	1	61	95	0	1386	0	1759	11020	1449
Bintang 3				1	61	95						412	11924		
Melati 1	5	79	110	3	44	51	3	45	52	0	12245	0	8437	11595	2
Melati 2	9	239	406	10	267	467	11	305	514	12	39136	34	51082	78161	21
Melati 3	12	408	717	13	417	740	12	388	685	70	83508	27	62614	41876	24
Non Melati	0	0	0	2	18	30	3	46	80	0	0	0	1739	6671	0
Jumlah	27	766	1286	31	878	1482	31	885	1479	82	136275	477	139297	151002	1496

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka Tahun 2002 - 2004

Kondisi prasarana jalan di Kota Tasikmalaya terlihat mempunyai pola perkembangan terpusat ke arah pusat kota (Kecamatan Tawang, Cihideung, dan Cipedes). Rasio panjang jalan per luas wilayah di tiap kecamatan masih sangat timpang, dengan perbedaan rasio tertinggi dan terendah mencapai lebih dari 3 kali lipat. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat terkonsentrasi pada Kecamatan Tawang dan Cihideung dan berpotensi menimbulkan kemacetan yang semakin parah di pusat kota.

Tabel 2.11
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan
(dalam km)

Jenis Permukaan	Status Jalan			Jumlah
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kota	
Aspal	9,520	31,890	454,114	495,524
Kerikil	-	-	113,017	113,017
Tanah	-	-	78,275	78,275
Jumlah	9,520	31,890	645,406	686,816

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka, Tahun 2006

Tabel 2.12
Panjang Jalan Menurut Kondisinya
(dalam km)

Kondisi Jalan	Status Jalan			Jumlah
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kota	
Baik	8,758	25,512	244,346	278,616
Sedang	0,762	6,378	197,527	204,667
Rusak	-	-	125,603	125,603
Rusak Berat	-	-	77,930	77,930
Jumlah	9,520	31,890	645,406	686,816

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka, Tahun 2006

Panjang ruas jalan yang kondisinya rusak dan rusak berat pada saat ini relatif cukup besar. Data tahun 2006 menunjukkan bahwa dari total panjang jalan 681.816 km, sekitar 29% diantaranya dalam keadaan rusak dan rusak berat. Ironisnya, seluruh jalan yang berada dalam kondisi rusak dan rusak berat tersebut merupakan jalan yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hal ini merupakan tantangan yang perlu ditangani segera oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, mengingat kondisi ini akan mengganggu aktivitas pergerakan baik orang maupun barang, paling tidak akan menimbulkan kenaikan biaya transportasi yang pada akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap daya saing daerah.

Sementara indikator lain yang juga dapat dipakai untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana di Kota Tasikmalaya adalah prasarana air kotor/drainase. Dari indikator ini disimpulkan bahwa rendahnya prasarana air kotor/drainase di Kota Tasikmalaya ditunjukkan oleh angka rasio panjang saluran drainase terhadap panjang jalan. Rasio tersebut hanya mencapai angka 36,22% saja, kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak jalan di Kota Tasikmalaya yang belum memiliki saluran air kotor/drainase (terutama untuk jalan yang terkategorikan kedalam jalan desa dan lingkungan). Hal ini menimbulkan potensi kerusakan jalan yang semakin besar karena dengan kondisi iklim basah yang dimiliki Kota Tasikmalaya, dimana bulan basahnya cukup panjang maka hembusan air hujan yang turun akan menggenangi jalan sehingga berpotensi besar dalam memperbesar rasio jumlah jalan yang rusak di Kota Tasikmalaya. Disamping itu, buruknya kondisi sistem drainase akan menyebabkan terjadinya potensi bagi bencana banjir di kawasan yang tidak memiliki sistem drainase yang baik.

**Tabel 2.13
Fasilitas Pengelolaan Air Limbah/Kotor di Kota Tasikmalaya**

Kecamatan	Saluran air Limbah/Got					
	Terbuka		Tertutup		Jumlah	
	Jumlah (Km)	% Thd Jalan	Jumlah (Km)	% Thd Jalan	Jumlah (Km)	% Thd Jalan
Cibeureum	1.97	69.12	0.88	30.88	2.85	23.75
Tamansari	1.75	72.06	0.68	27.94	2.43	17.35
Kawalu	1.05	39.62	1.60	60.38	2.65	33,12
Mangkubumi	1.99	71.58	0.79	28.45	2.78	27.80
Indihiang	0.71	28.86	1.75	71.14	2.46	35.14
Cipedes	1.23	31.70	2.65	68.30	3.88	55.42
Cihideung	0.74	33.18	1.49	66.82	2.23	31.85
Tawang	1.13	28.75	2.79	71.25	3.92	65.33
Kota Tasikmalaya	10.57	46.86	12.63	53.14	23.20	36.22

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka, 2006

Dari Tabel 2.14 diketahui bahwa besarnya selisih antara rasio jumlah penduduk yang terjangkau prasarana sistem perpipaan air bersih dengan jumlah penduduk yang

terlayani menunjukkan bahwa hingga saat ini penduduk masih memiliki alternatif lain dalam penyediaan air bersih untuk kehidupannya. Tersedianya sumur dan pompa air di rumah menyebabkan penduduk lebih memilih menyediakan air bersih secara mandiri. Unit pelayanan air bersih Kawalu merupakan unit PDAM yang paling besar selisih rasio antara jumlah penduduk terjangkau dengan jumlah penduduk yang terlayaninya (meskipun dari data yang lain jumlah KK yang tidak memiliki akses terhadap air bersihnya hanya 38,9%). Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat preferensi masyarakat terhadap air bersih cenderung tidak melalui sistem perpipaan. Persentase terbesar dari KK yang tidak memiliki akses terhadap air bersih terjadi di Kecamatan Tamansari (51,35%), Kecamatan Cibeureum (45,87%) dan Kecamatan Indihiang (40,73%), selain itu ketiga kecamatan ini juga merupakan kecamatan yang memiliki persentase jumlah KK tanpa jamban yang paling besar, masing-masing sebesar 76,17% dan 61,8% serta 50,83%.

**Tabel 2.14
Tingkat Pelayanan Air Bersih oleh PDAM Tirta Sukapura**

No	Unit Pelayanan	Jumlah penduduk (jiwa)					Persentase yg terlayani thd yg terjangkau
		Total	Terjangkau	% ¹⁾	Terlayani	% ²⁾	
1	Tasikmalaya	239.404	187.033	78,12	105.744	44,17	56,54
2	Cibeureum	90.949	48.406	53,22	22.037	24,23	45,53
3	Kawalu	73.591	56.010	76,11	12.287	16,70	21,94
4	Indihiang	78.980	38.264	48,45	7.322	9,27	19,14

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2006

Sarana lain yang juga mendukung perkembangan suatu wilayah adalah fasilitas kelistrikan. Rasio elektrifikasi Kota Tasikmalaya untuk tingkat kelurahan/pedesaan mencapai telah mencapai angka 100% sejak tahun 2001, dari rasio dapat dijadikan indikasi bahwa masyarakat kota mampu mendapatkan akses informasi secara cepat, serta mampu menjaga kapasitas produksi dari aktivitas kegiatan usaha yang mereka lakukan. Kondisi ini tentu saja mampu memberikan tingkat kepuasan yang mencukupi bagi masyarakat secara menyeluruh.

**Tabel 2.15
Perkembangan Sistem Kelistrikan**

No	Uaian	Satuan	Tahun				
			2001	2002	2003	2004	2005
1	Jumlah GI	Buah	4	4	4	4	5
2	Daya Terpasang	MVA	126	126	126	126	300
3	Panjang JTM	Kms	3,305	3,992	3,420	3,506	3,657
4	Panjang JTR	Kms	8,299	8,404	8,903	9,181	9,174
5	Jumlah Gardu	Buah	2,988	3,138	3,278	3,323	3,528
6	Kapasitas Gardu	kVA	216,779	235,966	245,932	261,159	263,098
7	Jumlah Pelanggan	Lgg	585,331	607,249	625,195	637,841	685,699
8	VA Tersambung	kVA	380,390	406,498	424,390	440,774	468,767
9	Jumlah Desa	Desa	55	55	55	55	55
10	Desa Dilistriki	Desa	55	55	55	55	55
11	Ratio Electrifaksi Desa	%	100	100	100	100	100
12	Jumlah Pelanggan/Desa	Lgg/Desa	10,642	11,041	11,339	11,636	11,933
13	VA Tersambung/Desa	kVA/Desa	6,955	7,386	7,732	8,063	8,552

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka, Tahun 2006

F. SOSIAL BUDAYA DAERAH

Paradigma pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai subjek suatu keberhasilan pembangunan. Upaya yang berfokus pada manusia tersebut pada saat ini diukur dengan penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Untuk mengukur indeks tersebut, digunakan indeks komposit berdasarkan tiga parameter yang terdiri atas derajat kesehatan dan panjangnya umur, yang terbaca dari Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy Rate*); pendidikan, yang diukur dengan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah; serta pendapatan, yang diukur dengan Daya Beli masyarakat (*Purchasing Power Parity*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya pada Tahun 2006 sebesar 72,05 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 71,62 pada Tahun 2005.

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada Tahun 2007 adalah 630.191 jiwa. Jika dibandingkan Tahun 2006 yang berjumlah 617.767 jiwa, selama periode Tahun 2006 – 2007 telah terjadi pertambahan penduduk sekitar 12.424 jiwa. Berdasarkan *trend LPP* Kota Tasikmalaya cenderung terus berfluktuasi. Pada periode 2002-2003, LPP Kota Tasikmalaya mencapai 3,30% menurun menjadi hanya 2,38% pada periode berikutnya (tahun 2003-2004), dan sedikit meningkat menjadi 2,60% pada periode 2004-2005. Sedangkan pada periode 2005-2006 LPP-nya mencapai 2,63% dan terus menurun menjadi 2,01% pada periode 2006-2007. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian penduduk di Kota Tasikmalaya perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

Dilihat dari segi komposisinya, pada tahun 2007 penduduk Kota Tasikmalaya lebih banyak perempuan dari pada laki-laki yaitu terdiri dari 315.291 orang perempuan dan 314.900 orang laki-laki dengan sex ratio sebesar 99,88. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2. 30.

Tabel 2.30
Data Kependudukan Kota Tasikmalaya Tahun 2002 – 2007

No.	Tahun	Jumlah Penduduk				Laki-Laki+perempuan	Sex Ratio		
		Laki-Laki		Perempuan					
		Jumlah	%	Jumlah	%				
1	2002	271.451	49,57	276.125	50,43	547.576	100,00	98,31	
2	2003	280.065	49,51	285.592	50,49	565.657	100,00	98,06	
3	2004	285.714	49,34	293.414	50,66	579.128	100,00	97,38	
4	2005	293.326	49,37	300.832	50,63	594.158	100,00	97,50	
5	2006	309.842	50,16	307.925	49,84	617.767	100,00	100,62	
6	2007	314.900	49,97	315.291	50,03	630.191	100,00	99,88	

Sumber : Susenas 2002-2004, Suseda Propinsi Jawa Barat 2005, Suseda Kota Tasikmalaya 2006, dan Survei IPM Kota Tasikmalaya 2007

Kepadatan penduduk di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2007 adalah 3.673 orang/Km². Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Cihideung sebesar 13.775 orang/Km² dan terendah terdapat di Kecamatan Kawalu yaitu sebesar 2.028 orang/Km². Kepadatan penduduk juga dapat dilihat dari rata-rata penduduk per

rumah tangga yang mencapai 3,71 sehingga secara umum setiap rumah tangga memiliki 3 sampai dengan 4 orang anggota dalam rumah tangga.

2. Tenaga Kerja

Kondisi pencari kerja di Kota Tasikmalaya menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2002 pencari kerja di Kota Tasikmalaya mencapai angka 5.336 dan naik menjadi 21.862 pada tahun 2004 kemudian turun lagi menjadi 12.213 pada tahun 2006. sedangkan menurut data terakhir, yaitu pada bulan Oktober 2007 kondisi pencari kerja di Kota Tasikmalaya mencapai angka 15.440 dengan komposisi pencari kerja laki-laki sebanyak 8.575 orang lebih banyak dari pencari kerja perempuan yaitu sebanyak 6.865 orang. Kondisi pencari kerja di Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari Tabel 2.31 di bawah ini :

Tabel 2.31.
Pencari Kerja yang Sudah dan Belum Ditempatkan
Tahun 2002 s/d Oktober 2007

Tahun	Sudah ditempatkan			Belum ditempatkan			Jumlah total		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2002	489	305	794	2.347	2.195	4.542	2.836	2.500	5.336
2003	234	444	678	5.665	4.725	10.390	5.889	5.169	11.068
2004	1.295	717	2.012	10.623	9.227	19.850	11.918	9.944	21.862
2005	75	158	233	9.805	8.513	18.318	9.880	8.671	18.551
2006	454	480	934	6.221	5.058	11.279	6.675	5.538	12.213
s/d Oktober 2007	615	683	1.298	7.957	6.182	14.139	8.575	6.865	15.440

Sumber : Dinas Kependudukan, KB dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya Tahun 2007

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Tasikmalaya menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Menurut data yang ada (tabel 2.31 dan tabel 2.32) jumlah tenaga kerja mencapai 30.235 orang dengan komposisi 14.891 laki-laki dan 15.344 perempuan pada bulan April 2007. Sedangkan pada awal tahun 2004 baru mencapai 23.723 orang dengan komposisi 11.825 laki-laki dan 11.898 perempuan. Semua tenaga kerja tersebut tertampung di 995 perusahaan (April 2007).

Tabel 2.32.
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2004 – 2007

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja										
			WNI		WNA		Orang Muda		Anak-anak		Jumlah		
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2004	577	12.429	12.000	9	5	254	111	2	-	12.694	12.116	24.810
2	2005	654	13.429	12.133	11	5	255	97	2	-	13.697	12.235	25.932
3	2006	680	14.002	12.804	9	5	261	107	2	-	12.274	12.916	27.190
4	2007	995	14.626	15.236	3	1	262	107	-	-	14.891	15.344	30.235

Sumber: Dinas Kependudukan, KB dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya Tahun 2007

Jumlah perusahaan mengalami kenaikan dimana pada awal tahun 2004 baru terdapat 536 perusahaan. Melihat dari besar kecilnya perusahaan, perusahaan menengah dan kecil mengalami penambahan yang signifikan. Sedangkan melihat dari status permodalan perusahaan yang mengalami penambahan yang signifikan adalah perusahaan swasta nasional dimana pada awal tahun 2004 baru mencapai 514 buah dan meningkat menjadi 679 pada April 2007.

3. Kemiskinan

Kemiskinan itu bersifat kompleks, karena dapat diartikan sebagai kemiskinan ekonomis, budaya, sosial, psikologis, religi, bahkan sampai politik. Kemiskinan dapat pula dilihat mulai dari dimensi fisik sampai nonfisik, mulai dari ukuran kuantitatif sampai yang kualitatif. Ada pula pendapat yang mengemukakan bahwa kemiskinan juga erat kaitannya dengan keterbelakangan dan kebodohan.

Beragam data kemiskinan disajikan dan dijadikan dasar penentu kebijakan dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat. Akan tetapi, hingga saat ini fenomena kemiskinan masih menjadi laten dan sulit dientaskan. Menurut data Susenas 2003, jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya mencapai 52,7 ribu orang atau sekitar 9,32 persen dari total penduduk dan di tahun 2004 persentasenya menunjukkan penurunan menjadi hanya 8,48 persen. Kondisi tersebut menunjukkan upaya pengurangan jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya dianggap cukup berhasil selama periode 2003-2004. Walaupun demikian, seiring dengan kenaikan harga BBM sebanyak 2 kali pada tahun 2005, penduduk miskin di wilayah ini kembali meningkat 68,96 ribu (penduduk miskin dan sangat miskin hasil PSE05) atau sekitar 11,61 persen. Dan di tahun 2006, penduduk miskin Kota Tasikmalaya mencapai 52,8 ribu atau 9,03 persen.

Tabel 2.33.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kota Tasikmalaya Tahun 2003-2006

No	Tahun	Jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk miskin (%)	Garis kemiskinan (Rp/kap/bulan)
1	2003	52.693	9,32	134.056
2	2004	48.611	8,48	139.350
3	2005	68.963	11,61	*)
4	2006	52.845	9,03	**)

Sumber : BPS, Susenas 2002-2005

*) Penduduk Miskin dan Sangat Miskin Hasil PSE05 (BLT)

**) Susenas 2006, Angka Sementara

Fenomena kenaikan penduduk miskin bahkan beberapa waktu lalu menjadi perdebatan publik. Pemerintah dianggap tidak berhasil mencegah merosotnya daya beli masyarakat karena melambungnya harga-harga akibat kenaikan BBM, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat terjebak dalam perangkap kemiskinan.

Dari sebanyak 39,4 ribu rumah tangga miskin di Kota Tasikmalaya terdapat sekitar 11,90 persen-nya masuk dalam kategori sangat miskin, 33,16 persen kategori miskin dan sisanya sekitar 54,94 persen kategori hampir miskin.

Tabel 2.34.
Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kota Tasikmalaya Tahun 2005

No	Kecamatan	Kategori RTM			Jumlah
		Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin	
1	Kec. Kawalu	1,595	1,530	787	3,912
2	Kec. Tamansari	2,437	2,655	754	5,846
3	Kec. Cibereum	3,892	2,428	989	7,309
4	Kec. Tawang	2,197	656	141	2,994
5	Kec. Cihideung	3,263	1,170	277	4,710
6	Kec. Mangkubumi	2,825	1,679	651	5,155
7	Kec. Indihiang	2,734	1,747	749	5,230
8	Kec. Cipedes	2,731	1,215	346	4,292
Kota Tasikmalaya		21,674	13,080	4,694	39,448

Sumber : BPS, Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05)

4. Kesehatan

Kondisi bidang kesehatan Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari perkembangan indeks kesehatan yang merupakan salah satu indikator pembentuk IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Sejak Kota Tasikmalaya terbentuk, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2001 kondisi indeks kesehatan mencapai angka 68,50 dan naik menjadi 68,70 pada tahun 2002. Setelah perjalanan selama 6 tahun posisi indeks kesehatan merangkak naik menjadi 72,40 sejalan dengan angka IPM Kota Tasikmalaya yang pada permulaan terbentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya mencapai 68,50 dan naik menjadi 72,93 pada tahun 2007. Keadaan Indeks Kesehatan dan angka IPM dapat dilihat pada Tabel 2.35 dibawah :

Tabel 2.35.
IPM Kota Tasikmalaya menurut Masing-Masing Indeks Tahun 2001-2007

Komponen	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Indeks Pendidikan	79,50	81,30	82,23	83,98	84,61	85,22	85,99
Indeks Kesehatan	68,50	68,70	69,00	70,08	70,72	70,97	72,40
Indeks Daya Beli	57,60	58,00	58,10	59,10	59,53	59,96	60,41
ANGKA IPM	68,50	69,30	69,78	71,05	71,62	72,05	72,93

Sumber : Survei IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2007

Sedangkan melihat data pada tabel 2.35, pergerakan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Tasikmalaya tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Menurut data Susenas, pencapaian angka harapan hidup penduduk Kota Tasikmalaya selama periode 2002-2005 mengalami peningkatan yang kurang menggembirakan, yaitu dari 66,20 pada tahun 2002 menjadi hanya 67,43 pada tahun 2005. dan menurut data Suseda 2006, pencapaian angka harapan hidup penduduk Kota Tasikmalaya sebesar 67,58 tahun. Selanjutnya berdasarkan hasil survei IPM pada tahun 2007, angka harapan hidup mencapai 68,44. Kondisi tersebut menyebabkan pergerakan indeks kesehatan relatif kurang berarti.

Tabel 2.36.
IPM Kota Tasikmalaya dan Komponennya Tahun 2001-2007

Komponen	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. Angka Harapan Hidup (AHH)	66,10	66,20	66,40	67,05	67,43	67,58	68,44
2. Angka Melek Hurup (AMH)	98,10	98,30	98,67	98,80	98,85	98,90	99,24
3. Rata-rata Lama Sekolah	6,30	7,10	7,40	8,15	8,42	8,68	8,92
4. PPP	549,30	550,90	551,50	555,75	557,58	559,48	561,39
ANGKA IPM	68,50	69,30	69,78	71,05	71,62	72,05	72,93

Sumber : Survai IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2006

Meskipun pergerakan indeks kesehatan Kota Tasikmalaya menunjukkan hal yang relatif kurang menggembirakan, namun diihat dari pencapaian IPM Kota Tasikmalaya terhadap pencapaian IPM Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya masih boleh berbangga karena pencapaian IPM Kota Tasikmalaya masih lebih tinggi dari pada IPM Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.37.
Perbandingan Pencapaian IPM Jawa Barat
dengan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2003 - 2007

Tahun	Pencapaian IPM Jawa Barat	Pencapaian IPM Kota Tasikmalaya
2003	67,87	69,80
2004	69,07	71,05
2005	69,35	71,62
2006	70,05	72,05
2007	70,76	72,93

Sumber : Survai IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2007; Bapeda Propinsi Jawa Barat

5. Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tahun 2006 jumlah penduduk Kota Tasikmalaya menurut usia sekolah berjumlah sekitar 159.143 jiwa atau sekitar 25,76% dari jumlah penduduk Kota Tasikmalaya. Penduduk usia sekolah di Kota Tasikmalaya di dominasi oleh penduduk pada kualifikasi pendidikan tingkat dasar yaitu SD dan SMP yang mencapai sekitar 102.424 jiwa atau sekitar 64,36% dari jumlah penduduk usia sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38.
Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Tasikmalaya Tahun 2006

Kecamatan	Usia 5-6 Tahun	Usia 7-12 Tahun	Usia 13-15 Tahun	Usia 16-18 Tahun
Cibeureum	3.787	10.868	5.481	5.412
Tamansari	2.857	7.443	3.605	3.225
Kawalu	3.188	9.372	4.343	4.007
Mangkubumi	3.113	8.995	4.268	3.941
Indihiang	3.294	9.988	4.961	4.378
Cipedes	2.888	8.425	4.156	4.368
Cihideung	2.499	7.570	3.738	4.166
Tawang	2.058	6.069	3.142	3.538
Jumlah	23.684	68.730	33.694	33.035

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka, 2006

Peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus didukung oleh berbagai fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai serta kesadaran masyarakat. Sarana pendidikan yang ada di Kota Tasikmalaya pada tahun 206 terdiri dari 1 Taman Kanak-kanak Negeri dan 62 TK Swasta, 88 sekolah RA Swasta, 253 SD Negeri dan 14 SD Swasta, 1 sekolah MI Negeri dan 47 sekolah MI Swasta, 21 SMP Negeri dan 22 SMP Swasta, 2 sekolah MTs Negeri dan 34 sekolah MTs Swasta, 9 SMA Negeri dan 16 SMA Swasta, 2 sekolah MA Negeri dan 17 sekolah MA Swasta serta 3 SMK Negeri dan 20 SMK Swasta. Saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memulai untuk meningkatkan jumlah sekolah kejuruan yang lulusannya dipersiapkan untuk langsung mendapatkan lapangan kerja (*link and match*).

Bagi siswa yang kurang beruntung untuk belajar di sekolah umum/formal baik tingkat dasar maupun tingkat lanjutan Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siswa untuk tetap dapat belajar. Perhatian pemerintah ini diwujudkan dengan dikembangkannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Pesantren Salafiah yang tetap memberikan pelajaran dengan standar sekolah umum. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa lulusan dari PKBM dan Pesantren Salafiah ini lulusannya disetarakan dengan lulusan sekolah umum dan dapat melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah umum. Selain itu terdapat pula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan kursus-kursus, pembinaan generasi muda, pembinaan keolahragaan dan program pendidikan masyarakat. Untuk lebih jelasnya jumlah siswa pada setiap tingkatan dan jenis sekolah dapat dilihat pada Tabel 2.39.

**Tabel 2.39.
Rekapitulasi Jumlah Siswa
SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK DAN SALAFIYAH
Tahun 2006**

Jenis Sekolah	Jumlah				Ket
	Sekolah	Negeri	Swasta	Siswa	
SD	265	253	12	21.501	
SDLB	5	-	5	241	
Salafiah Ula	1	-	1	93	
MI	47	1	46	8.816	
SMP	43	21	22	21.501	
Salafiah Wustha	23	-	23	1.093	
SMP Terbuka	6	6	-	617	
MTs	36	2	34	6.888	
SMA	26	12	66	11.718	
SMALB	5	-	5	28	
MA	19	22	138	2.495	
SMK	23	17	102	9.489	
Jumlah	504	334	459	127.450	

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka Tahun 2006

Ketersediaan tenaga pengajar (Tabel 2.40) yang ada di Kota Tasikmalaya pada tahun 2006 sebanyak 294 Guru TK, 376 Guru RA, 3.061 Guru SD, 403 Guru MI, 1.509 Guru SMP, 666 Guru MTs, 874 Guru SMA, 365 Guru MA dan 661 Guru SMK. Selain jumlah dan kualitas tenaga pengajar, yang jadi permasalahan adalah sebarannya yang belum merata untuk setiap sekolah.

Tabel 2.40
Guru Berdasarkan Ijazah Tertinggi Tahun 2006

Jenis Sekolah	<=SM	D.I	D.II	D.III Keg	D.III N.Ke g	S.I Keg	S.I N.Ke g	S.II
TK	163	14	101	1	1	10	4	0
RA	216	48	74	2	7	26	3	0
SD	420	35	1894	65	8	594	42	3
MI	170	9	105	3	2	107	7	0
SMP	108	89	62	185	8	988	46	23
MTs	83	5	17	46	8	430	73	4
SMA	39	0	1	70	9	693	49	13
MA	28	7	0	13	7	275	26	9
SMK	25	1	0	38	14	514	64	5
Jumlah	1252	208	2254	423	64	3637	314	57

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka Tahun 2006

Masyarakat Kota Tasikmalaya memiliki kesadaran yang cukup tinggi dibidang pendidikan, hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dengan jumlah siswa yang belajar. Keinginan untuk belajar ini didukung pula oleh fasilitas pendidikan yang ada baik yang dibawah binaan Dinas Pendidikan maupun sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Agama, yaitu sebanyak 88 Madrasah Raudlatul Athfal, 48 Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta, 36 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta dan 19 Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta.

Peranan pondok pesantren sangat besar terhadap program wajar dikdas 9 tahun terutama dengan dilakukannya wajar dikdas 9 tahun pada pesantren salafiah, sehingga santri yang bermukim di pesantren salafiyah dapat melaksanakan pelajaran umum sesuai dengan kurikulum setandar Departemen Pendidikan Nasional. Untuk masa mendatang diharapkan peranan pesantren akan semakin meningkat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan pendanaan dari pusat.

Dalam Bidang Pendidikan, prestasi Kota Tasikmalaya cukup baik dengan indikasi bahwa penyumbang terbesar IPM Kota Tasikmalaya adalah Bidang Pendidikan. Namun demikian kita masih harus memperbaiki faktor-faktor pendukung keberhasilan pembangunan Bidang Pendidikan terutama dalam hal sarana/bangunan pendidikan yang masih perlu diperhatikan sehingga memenuhi standar dan kebutuhan. Sejak Tahun Anggaran 2006, sesuai MoU antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota Tasikmalaya tentang program Rehabilitasi SD/MI, dan pembangunan ruang kelas baru termasuk rehabilitasi SMP/MI, dimana untuk kebutuhan program tersebut telah dianggarkan dana *Role Sharing* sebesar sekitar 10 Milyar Rupiah dari alokasi dana sekitar 50 Milyar Rupiah lebih, sampai Tahun 2008. Namun dalam pengelolaan dana pendidikan ini perlu ditingkatkan perencanaan dan

pengawasannya terutama dalam tahapan penilaian kondisi fisik bangunan yang akan diperbaiki dan status tanah untuk lokasi tambahan bangunan, hal ini perlu adanya tim yang berkompeten dalam hal teknik bangunan.

Kenyataan yang dihadapi selama ini bahwa masih dijumpainya keresahan menjelang akhir dan awal tahun ajaran baru yaitu penyimpangan pelaksanaan ujian nasional dan mahalnya biaya pendaftaran masuk sekolah. Masalah ini selayaknya tidak perlu terjadi mengingat telah adanya aturan tentang UAN dan banyaknya alokasi dana di bidang pendidikan walaupun memang belum mencapai 20% sesuai amanat Undang-Undang. Melihat perkembangan alokasi dana APBD Kota Tasikmalaya terhadap bidang pendidikan yang terus meningkat ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun itikad baik ini dianggap masih kurang disikapi oleh pihak sekolah terbukti dengan masih adanya sekolah yang meminta dana yang cukup besar kepada orangtua siswa terutama pada saat awal tahun ajaran. Hal ini terjadi karena memang kebutuhan pihak sekolah yang cukup besar terutama dalam hal sarana pendukung dan alat peraga pendidikan tapi seyogyanya tidak menjadikan alasan yang mengada-ada. Untuk menyikapi hal tersebut perlu kiranya ada kesepahaman dan keseragaman dalam hal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di tingkat Kota Tasikmalaya.

Disisi lain dihadapi permasalahan yang juga membutuhkan perhatian yang serius yaitu masih banyak guru yang mengajar tetapi tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Upaya yang telah dan sedang dilakukan adalah diatasi dengan berbagai upaya diantaranya yaitu diupayakan dengan mengoptimalkan atau memberdayakan forum MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan program peningkatan kualifikasi tenaga pengajar. Dalam pemberdayaan Forum MGMP dipandang perlu adanya peningkatan pengawasan sehingga keberadaanya lebih bisa bermanfaat. Dari sisi anggaran upaya yang ditempuh adalah peningkatan alokasi anggaran untuk program peningkatan kualifikasi tenaga pengajar berupa stimulan bagi guru yang sedang melanjutkan jenjang study. Untuk waktu mendatang diharapkan alokasi dana untuk program peningkatan kualifikasi tenaga pengajar ini diarahkan kepada alokasi beasiswa bagi guru berprestasi namun belum berijazah Strata Satu.

Dalam peningkatan program pendidikan dibutuhkan peran aktif dari masyarakat luas dan lembaga pendidikan. Dalam menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, Gubernur Jawa Barat telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor; 119/233/Desen–6388/J33/LK01.09/2005 pada tanggal 14 Desember 2005 tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kesepakatan ini merupakan peluang untuk peningkatan upaya percepatan pembangunan bidang pendidikan, terutama bagi Kota Tasikmalaya yang memiliki Kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas maka kota/kabupaten memiliki

kesempatan untuk menindaklanjutinya dengan berbagai bentuk kegiatan yang menunjang peningkatan nilai IPM, khususnya di bidang pendidikan.

Untuk meminimalisir siswa rawan DO dalam rangka mensukseskan Wajar Dikdas 9 Tahun, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan bantuan berupa Kartu Bebas Biaya Sekolah (KBBS), Beasiswa Transisi, Biaya Penerimaan Siswa Baru dan mengoptimalkan kembali Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA). Program GN-OTA ini diharapkan akan lebih dapat bermanfaat dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan program ini perlu didukung dengan ketersediaan data yang lebih akurat mengenai calon wajib bantuan.

Investasi pendidikan membutuhkan biaya yang tidak kecil. Besar kecilnya investasi pendidikan biasanya berhubungan dengan lamanya tahun bersekolah. Menurut data BPS tahun 2003, rata-rata lama sekolah penduduk usia dewasa di Kota Tasikmalaya baru mencapai sebesar 7,40 tahun meningkat menjadi 8,15 tahun pada tahun 2004, sedangkan di tahun 2005 menjadi 8,42 tahun. Dan menurut data Suseda 2006, capaian RLS Kota Tasikmalaya sebesar 8,68 tahun. Selanjutnya berdasarkan hasil survei IPM tahun 2007 Rbs Kota Tasikmalaya telah mencapai 8,92 tahun. Selama periode tersebut, laju peningkatan rata-rata lama sekolah di Kota Tasikmalaya cenderung melambat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi murid tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk usia sekolah.

6. Agama

Mayoritas penduduk Kota Tasikmalaya beragama Islam, ini terlihat dari banyaknya jumlah pemeluk agama Islam di Kota Tasikmalaya (Tabel 2.41) yaitu 516.739 orang atau 83,65% dan banyaknya sarana peribadatan (Tabel 2.42) diantaranya 937 Mesjid, 1.536 Langgar dan 348 Mushola, sedangkan Gereja ada 14 buah dan Kelenteng 1 buah.

**Tabel 2.41
Jumlah Pemeluk Agama di Kota Tasikmalaya Tahun 2006**

Kecamatan	Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
Kawalu	68.964	18	60	7	-	-	-
Tamansari	50.497	-	21	6	-	-	-
Cibeureum	83.123	9	54	-	-	-	-
Tawang	55.580	437	968	137	-	-	-
Cihideung	56.907	1.277	1.768	619	-	-	-
Mangkubumi	60.780	103	141	15	-	-	-
Indihiang	78.837	46	70	2	-	-	-
Cipedes	62.051	176	267	97	-	-	-
J u m l a h	516.739	2.066	3.349	883	-	-	-

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka, 2006

Tabel 2.42
Jumlah Sarana Peribadatan di Kota Tasikmalaya Tahun 2006

Kecamatan	Mesjid	Langgar	Mushola	Gereja	Kelenteng	Pura	Kuil
Kawalu	113	158	69	-	-	-	-
Tamansari	82	87	17	-	-	-	-
Cibeureum	145	51	38	-	-	-	-
Tawang	73	214	76	8	1	-	-
Cihideung	139	235	13	6	-	-	-
Mangkubumi	110	294	33	-	-	-	-
Indihiang	175	228	73	-	-	-	-
Cipedes	100	269	29	-	-	-	-
J u m l a h	937	1.536	348	14	1	-	-

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka, 2006

Untuk pembinaan akhlak tidak terlepas dari peran dan fungsi tokoh agama dan masyarakat seperti, Ulama, Mubaligh dan lain-lain. Di Kota Tasikmalaya terdapat 706 Ulama, 467 Mubaligh, 1.956 Khotib, 4 Penyuluhan Agama dan 200 Penyuluhan Honorer. Selain itu untuk meningkatkan pendidikan agama Islam di Kota Tasikmalaya terdapat 214 Pondok Pesantren dengan 367 Kyai. Kehidupan beragama di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pula dari pemberangkatan Jemaah Haji ke Tanah Suci. Pada Tahun 2006 Jemaah Haji yang berangkat ke Tanah Suci sebanyak 918 orang.

7. Olahraga

Masih kurangnya prestasi di berbagai event perlombaan baik di tingkat regional maupun tingkat nasional sangat dipengaruhi oleh rendahnya pembinaan dan pengembangan olah raga. Diharapkan pada tahun mendatang fasilitas olahraga baik yang ada di lingkungan sekolah mapun yang dipergunakan oleh umum akan semakin baik sehingga meningkatkan motivasi untuk olahraga. Salah satu program yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Program Gerak yang salah satu kegiatannya adalah mendanai perbaikan dan peningkatan kualitas sarana olahraga yang ada disetiap kota/kabupaten.

Peningkatan prestasi dan kualitas atlet adalah target antara yang ingin dicapai, target utama dari pengembangan olahraga adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

G. PEMERINTAHAN UMUM

1. Politik

Kota Tasikmalaya yang dibentuk pada tahun 2001 telah mengalami 2 (dua) kali pesta Demokrasi yaitu Pemilu Tahun 2004 yang terbagi menjadi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pada tahun 2007 yaitu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tasikmalaya.

Partisipasi masyarakat selain ditunjukkan dalam bidang Pemerintahan dan pembangunan juga ditunjukkan oleh keterlibatannya pada proses politik. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya dalam proses politik ditunjukkan oleh keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih yang cukup signifikan.

Pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 rata – rata tingkat partisipasi masyarakat mencapai 88,15 % yang terdiri dari PEMILU Legislatif (90,04 %), PILPRES Putaran I (88,53 %) dan PILPRES putaran II (85,89%), tingkat partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya pada pelaksanaan PEMILU Tahun 2004 tersebut meskipun terjadi penurunan tetap berada di atas rata – rata partisipasi masyarakat secara Nasional yang berada pada kisaran 80%.

Selanjutnya pada PILKADA Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan pada bulan September Tahun 2007, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 85,21% dari 408.467 pemilih (Jumlah Pemilih pada Daftar Pemilih Tetap). Dengan demikian terdapat sekitar 14,29% atau sekitar 60.318 pemilih tidak dapat berpartisipasi karena alasan tertentu, sedangkan yang dengan sengaja tidak menggunakan hak pilhnya hanya 0,50% atau sekitar 2.050 pemilih.

**Tabel 2.43
Jumlah dan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Tahun 2007**

No	Uraian	Jumlah	(%)
1	Jumlah Pemilih Pada Daftar Pemilih Tetap	408.467	100
2	Jumlah Pemilih pada Salinan Daftar Pemilih Tetap	407.698	99,81
3	Jumlah Partisipasi Pemilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	347.380	85,21
4	Jumlah yang tidak menggunakan Hak Pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	60.318	14,79

Sumber : KPU Kota Tasikmalaya

**Tabel 2.44
Alasan tidak Menggunakan Hak Pilih pada Pilkada Tahun 2007**

No	Uraian Alasan	Jumlah	(%)
1	Berada di luar Kota karena Belajar/Bekerja	43.516	10,67
2	Bepergian ke luar Kota untuk satu keperluan	9813	2,41
3	Sakit/Meninggal	1.061	0,26
4	Tidak Hadir untuk menggunakan hak pilih	2.050	0,50
5	Lain-lain	3.878	0,95
JUMLAH		60.318	14,79

Sumber : KPU Kota Tasikmalaya

Hasil perhitungan suara menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebesar 85,21 %, ini menunjukan kesadaran berpolitik masyarakat Kota Tasikmalaya yang sangat tinggi dan dewasa dalam berdemokrasi.

2. Pemerintahan

a. Kelembagaan

Kota Tasikmalaya yang dibentuk pada tahun 2001 melalui Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, yang terdiri dari 8 Kecamatan, 15 kelurahan dan 54 Desa dengan luas wilayah 17.156,20 Hektar. Sebagai implementasi dari dibentuknya Kota Tasikmalaya maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota disusun berdasarkan pada Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kota Tasikmalaya, terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah:
- 2) Sekretariat Dewan
- 3) 2 Badan
- 4) 6 Dinas
- 5) 9 Kantor Lembaga Teknis

Pada tahun 2003, Pemerintah Kota Tasikmalaya menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dengan demikian sejak diterbitkannya Perda tersebut Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan 69 Kelurahan.

Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2008, Pemerintah Kota Tasikmalaya menerbitkan kembali Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu. Kedua kecamatan ini merupakan hasil pemekaran masing-masing dari Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Cibeureum, sehingga jumlah kecamatan di Kota Tasikmalaya bertambah menjadi 10 kecamatan.

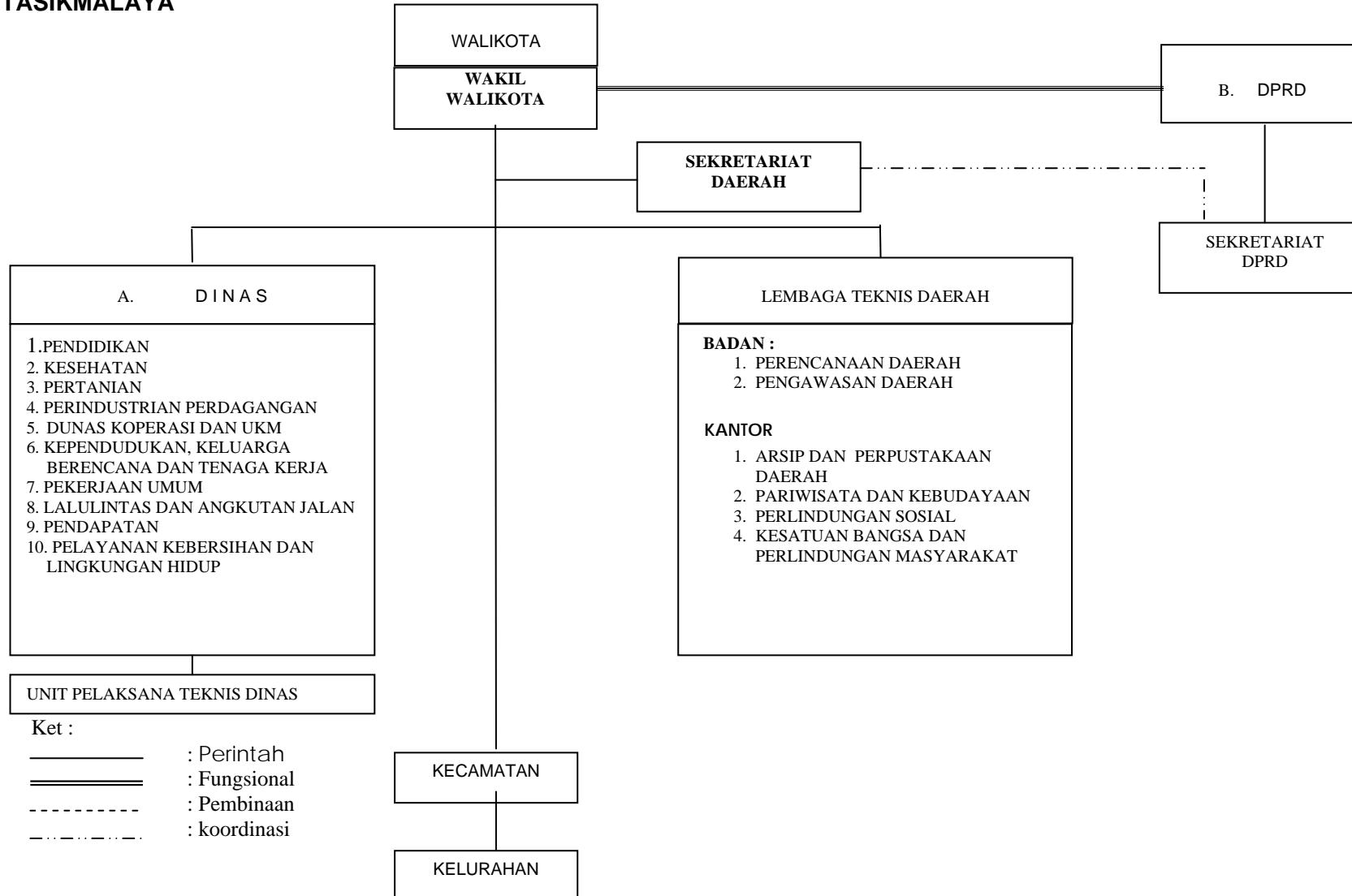
Dalam Sistem Kelembagaan Pemerintah Daerah, pada saat ini Kota Tasikmalaya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut Kota Tasikmalaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13,14,15 dan 16 Tahun 2003 serta Peraturan Daerah Nomor 2,3,4 Tahun 2004 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan demikian berdasarkan peraturan-peraturan daerah tersebut, Sistem Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Tasikmalaya (Gambar 2.6) terdiri atas:

- 1) Sekretariat Daerah:
- 2) Sekretariat Dewan
- 3) 2 Badan
- 4) 10 Dinas
- 5) 5 Kantor Lembaga Lembaga Teknis

Dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dilanjutkan dengan terbitnya Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang – Undang

Nomor 25 Tahun 1999, menyebabkan perlunya perubahan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan di Kota Tasikmalaya baik itu secara struktural, fungsional maupun kultural. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut adalah diperlukannya berbagai pengaturan, terutama dalam hal kewenangan, pengorganisasian, penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan umum, kepegawaian, anggaran, logistik serta pengukuran kinerja organisasi pemerintah daerah.

Gambar 2.12
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA



Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sampai saat ini Kota Tasikmalaya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom yang merupakan tindak lanjut dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya:

1) Urusan Wajib

- Urusan Wajib Pendidikan diakomodasikan pada Dinas Pendidikan serta Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- Urusan Wajib Kesehatan diakomodasikan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- Urusan Wajib Pekerjaan Umum diakomodasikan pada Dinas Pekerjaan Umum;
- Urusan Wajib Perumahan Rakyat diakomodasikan pada Dinas Pekerjaan Umum;
- Urusan Wajib Penataan Ruang diakomodasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan diakomodasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Urusan Wajib Perhubungan diakomodasikan pada Dinas Perhubungan;
- Urusan Wajib Lingkungan Hidup diakomodasikan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan;
- Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil diakomodasikan pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja;
- Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan diakomodasikan pada Kantor Perlindungan Sosial;
- Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diakomodasikan pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja;
- Urusan Wajib Sosial diakomodasikan pada Kantor Perlindungan Sosial;
- Urusan Wajib Tenaga Kerja diakomodasikan pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja;
- Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diakomodasikan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- Urusan Penanaman Modal diakomodasikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

- Urusan Wajib Kebudayaan diakomodasikan pada Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Daerah;
- Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga diakomodasikan pada Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Daerah;
- Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diakomodasikan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- Urusan Wajib Pemerintahan Umum diakomodasikan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengawasan Daerah dan Kecamatan;
- Urusan Wajib Kepegawaian diakomodasikan pada Bagian Kepegawaian;
- Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa diakomodasikan pada Kantor Perlindungan Sosial;
- Urusan Wajib Statistik diakomodasikan pada Badan Perencanaan Daerah;
- Urusan Wajib Kearsipan diakomodasikan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika diakomodasikan pada Dinas Perhubungan.

2) Urusan Pilihan

- Urusan Pilihan Pertanian diakomodasikan pada Dinas Pertanian;
- Urusan Pilihan Kehutanan diakomodasikan pada Dinas Pertanian;
- Urusan Pilihan Pariwisata diakomodasikan pada Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Daerah;
- Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan diakomodasikan pada Dinas Pertanian;
- Urusan Pilihan Perdagangan diakomodasikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Urusan Pilihan Perindustrian diakomodasikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Urusan Pilihan Transmigrasi diakomodasikan pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja.

Pada saat ini urusan pemerintah daerah kabupaten/kota diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari diterbitkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 12 ayat (1) mengamanatkan bahwa urusan pemerintah wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran peraturan pemerintah ini ditetapkan dalam peraturan daerah selambat – lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan pemerintah ini.

Mengingat amanat pasal tersebut diatas Pemerintah Kota Tasikmalaya berupaya untuk mewujudkannya dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2007.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya berencana menerbitkan Peraturan Daerah pada tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang akan diberlakukan mulai tahun 2009. Namun demikian, perencanaan pembangunan dan perencanaan pembiayaan untuk tahun 2009 dan tahun-tahun mendatang sudah mengacu pada rencana perda dimaksud.

Berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka akan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota seperti yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

1) Urusan Wajib

- Urusan Wajib Pendidikan diakomodasikan pada Dinas Pendidikan serta Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- Urusan Wajib Kesehatan diakomodasikan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- Urusan Wajib Pekerjaan Umum diakomodasikan pada Dinas Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
- Urusan Wajib Perumahan Rakyat diakomodasikan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- Urusan Wajib Penataan Ruang diakomodasikan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan diakomodasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Urusan Wajib Perhubungan diakomodasikan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- Urusan Wajib Lingkungan Hidup diakomodasikan pada Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup;
- Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil diakomodasikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan diakomodasikan pada Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diakomodasikan pada Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

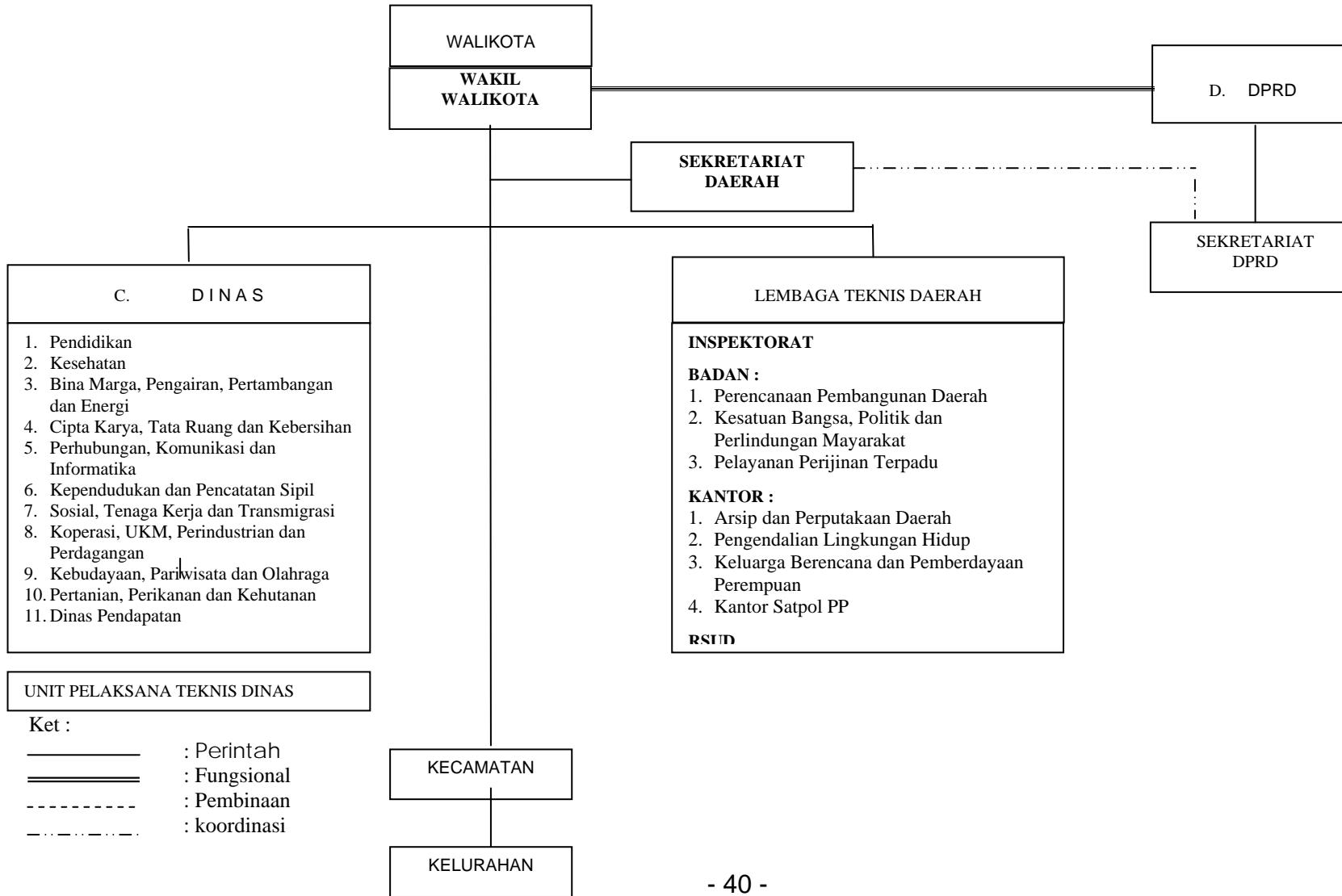
- Urusan Wajib Sosial diakomodasikan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Urusan Wajib Tenaga Kerja diakomodasikan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diakomodasikan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- Urusan Penanaman Modal diakomodasikan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- Urusan Wajib Kebudayaan diakomodasikan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga diakomodasikan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri diakomodasikan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- Urusan Wajib Pemerintahan Umum diakomodasikan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Pendapatan dan Kecamatan;
- Urusan Wajib Kepegawaian diakomodasikan pada Bagian Kepegawaian;
- Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa diakomodasikan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Urusan Wajib Statistik diakomodasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Urusan Wajib Kearsipan diakomodasikan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika diakomodasikan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

2) Urusan Pilihan

- Urusan Pilihan Pertanian diakomodasikan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- Urusan Pilihan Kehutanan diakomodasikan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral diakomodasikan pada Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
- Urusan Pilihan Pariwisata diakomodasikan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan diakomodasikan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

- Urusan Pilihan Perdagangan diakomodasikan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- Urusan Pilihan Perindustrian diakomodasikan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- Urusan Pilihan Transmigrasi diakomodasikan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Gambar 2.13
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
(Berdasarkan Rencana Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah)



b. Aparatur

Jumlah aparatur Pemerintah Kota Tasikmalaya hingga bulan Agustus 2007 berjumlah 9.244 orang yang terdiri dari 7.745 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.499 orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK). Berdasarkan tingkat pendidikan aparatur pemerintahan Kota Tasikmalaya di dominasi oleh aparatur dengan tingkat pendidikan S1 (2.826 orang), DII (1.894 orang) dan SLTA (1.628 orang), bila dilihat berdasarkan golongan aparatur pada tingkatan golongan IV sebanyak 2.847 orang, golongan III terhitung sekitar 3.633 orang, golongan II sebanyak 1.188 orang dan golongan I sebanyak 77 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.45, Tabel 2.46 dan Tabel 2.47.

Tabel 2.45
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Tasikmalaya
Menurut Golongan Agustus 2007

Golongan	I	II	III	IV
a	21	502	650	2.618
b	0	216	718	210
c	21	284	797	15
D	35	186	1.468	4
Jumlah	77	1188	3.633	2.847

Sumber : Bagian Kepegawaian Setda Kota Tasikmalaya Tahun 2007

Tabel 2.46
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Tasikmalaya
Menurut Tingkat Pendidikan
Agustus 2007

Kualifikasi Tingkat Pendidikan	Dasar	Menengah	Akademi	Sarjana
SD	145			
SMP	110			
SMA		1.628		
DI			242	
DII			1.864	
DIII			711	
DIV			16	
S1				2.826
S2				172
S3				1

Sumber : Bagian Kepegawaian Setda Kota Tasikmalaya Tahun 2007

Tabel 2.47
Kota Tasikmalaya
Menurut Unit Kerja Per Agustus 2007

No	Unt Kerja	PNS	TKK	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	143	35	178
2.	Sekretariat Dewan	25	128	153
3.	Bapeda	44	13	57
4.	Bawasda	31	5	36
5.	Dinas Pendidikan	5.387	11	5.398
6.	Dinas Kesehatan	511	14	525
7.	Dinas Pendapatan	39	40	79
8.	Dinas Perhubungan	74	137	211
9.	Dinas Koperasi dan UKM	20	6	26
10.	Dinas Kependudukan, KB dan Tenaga Kerja	82	11	93
11.	Dinas LHPK	52	243	295
12.	Dinas PU	112	80	192
13.	Dinas Pertanian	90	16	106
14.	Dinas Perindag	78	116	195
15.	RSUD	540	3	543
16.	DPC Korpri	5	-	5
17.	Satpol PP	37	60	97
18.	KPU	11	4	15
19.	Kator Arsip dan Pusda	10	7	17
20.	Kantor Pariwisata	9	10	19
21.	Kantor Linsos	17	8	25
22.	Kantor Kesbang	8	8	16
23.	Kecamatan dan Kelurahan	445	508	953
	Jumlah	7.745	1499	9.244

Sumber : Bagian Kepegawaian Setda Kota Tasikmalaya Tahun 2007

BAB III

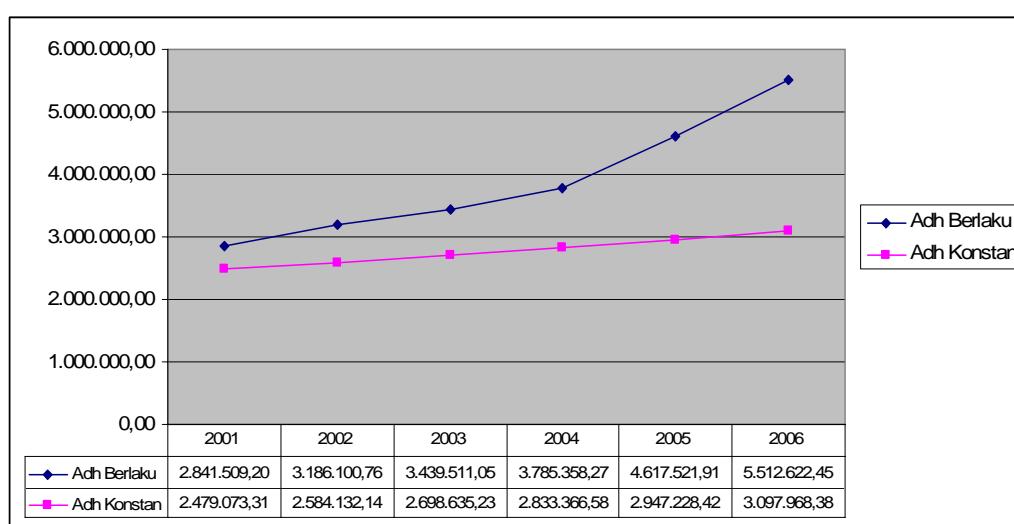
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tasikmalaya Tahun 2001-2006

Kemajuan ekonomi secara makro seringkali dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) di suatu wilayah, yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.

Pada tahun 2001, PDRB Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku (terpisah dari Kabupaten Tasikmalaya) mencapai sebesar 2,841 triliun rupiah meningkat menjadi sebesar 3,186 triliun rupiah di tahun 2002 dan pada 4 (empat) tahun berikutnya naik secara signifikan menjadi 5,512 triliun rupiah di tahun 2006. Adanya perubahan nilai PDRB yang cukup cepat pada periode 2004-2006 menunjukkan aktivitas ekonomi di Kota Tasikmalaya sudah kembali pulih setelah cukup lama terkena imbas krisis ekonomi. Adanya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa produktivitas dari aktivitas ekonomi secara perlahan mengalami peningkatan atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan.

Gambar 2.5.
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Tahun 2001-2006,
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan**



Sumber : Bapeda dan BPS Kota Tasikmalaya, Publikasi PDRB 2006

Kontribusi masing-masing sektor pada PDRB Kota Tasikmalaya masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kemudian sektor industri pengolahan, merupakan sektor kedua terbesar setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

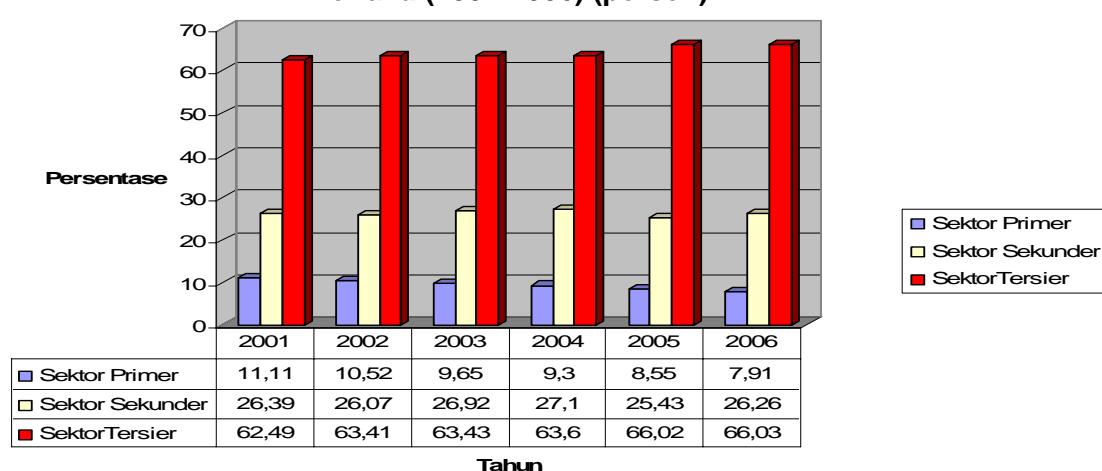
Tabel 2.16
Kontribusi Masing-Masing Sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kota Tasikmalaya Tahun 2001 – 2006 Atas Dasar Harga Berlaku
(persen)

Kelompok Sektor/Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Kelompok Sektor Primer	11,11	10,52	9,65	9,30	8,55	7,91
1.1. Pertanian	11,11	10,52	9,65	9,29	8,55	7,91
1.2. Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2. Kelompok Sektor Sekunder	26,39	26,07	26,92	27,10	25,43	26,26
2.1. Industri Pengolahan	15,28	15,33	15,54	16,05	14,53	14,66
2.2. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,5	1,44	1,46	1,44	1,99	1,99
2.3. Bangunan	9,62	9,30	9,91	9,61	8,91	9,42
3. Kelompok Sektor Tersier	62,49	63,41	63,43	63,60	66,02	66,03
3.1. Perdagangan, Hotel dan Restoran	31,65	32,34	30,99	29,71	28,52	29,97
3.2. Pengangkutan dan Komunikasi	10,20	10,77	10,52	10,20	13,38	13,70
3.3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,79	6,23	8,15	10,39	10,67	9,24
3.4. Jasa-jasa	13,85	14,06	13,77	13,31	13,45	13,12
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bapeda dan BPS Kota Tasikmalaya, Publikasi PDRB 2006

Dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor tersier memegang peranan yang paling besar. Disusul oleh sektor sekunder dan terakhir sektor primer. Sejak tahun 2001 secara perlahan kontribusi sektor primer terhadap pembentukan PDRB mengalami penurunan. Sebaliknya untuk sektor tersier justru secara perlahan terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk sektor sekunder, dalam kurun waktu 2001 sampai 2006 perkembangannya sedikit berfluktuasi, namun secara umum berada pada nilai sekitar 26,36 persen (Gambar 2.6).

Gambar 2.6.
Distribusi Persentase PDRB Kota Tasikmalaya menurut Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku (2001-2006) (persen)



Salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari data di atas adalah aktivitas perekonomian di Kota Tasikmalaya secara perlahan mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder atau ke sektor tersier.

B. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya

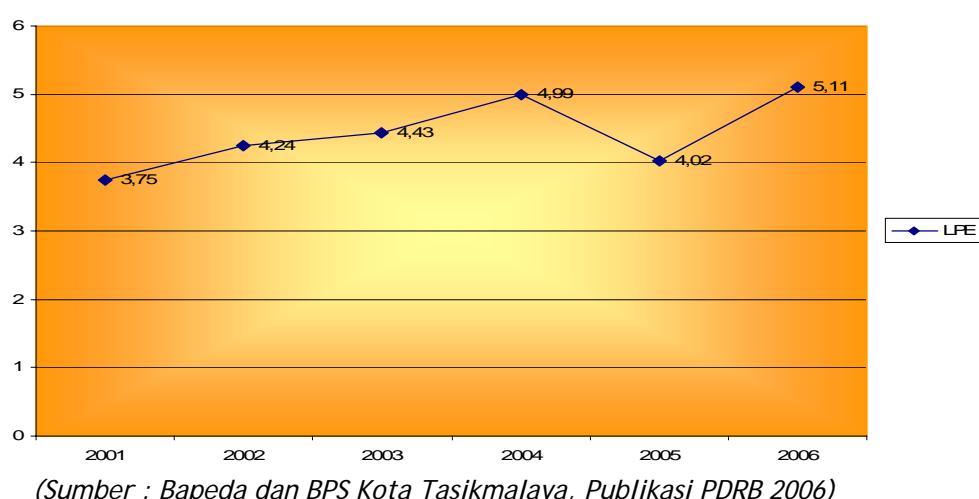
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tasikmalaya pada tahun 2001-2006 berada pada kisaran 3,75 persen sampai dengan 5,12 persen, pertumbuhannya dari tahun ke tahun cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2005 LPE Kota Tasikmalaya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

1. Pada tahun 2001 LPE Kota Tasikmalaya sebesar 3,75 persen, disumbang oleh laju pertumbuhan di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan khususnya sub sektor bank yang mengalami laju pertumbuhan sangat signifikan.
2. Pada tahun 2002 LPE Kota Tasikmalaya tetap tumbuh sebesar 4,24 persen. Namun ada hal menarik di tahun ini, yaitu laju sub sektor bank yang semula (tahun 2001) melonjak sangat tajam justru di tahun ini mengalami pertumbuhan yang negatif, kemungkinan sebagai akibat banyaknya bank yang dilikuidasi oleh pemerintah.
3. Untuk tahun 2003, LPE Kota Tasikmalaya adalah 4,43 persen. Sektor yang mengalami peningkatan sangat signifikan adalah sektor industri pengolahan; bangunan; pengangutan dan komunikasi; serta sektor listrik, gas dan air bersih. Sedangkan sektor yang lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah dua persen.
4. Pada tahun 2004 mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2005 Laju Pertumbuhan Ekonomi tidak tumbuh sepesat tahun 2004, walaupun secara umum Ekonomi pada tahun 2005 masih mengalami pertumbuhan sebesar 4,02 persen. Hal ini disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah kebijakan moneter yang dilakukan BI dengan tidak menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi bertujuan untuk menekan laju inflasi yang melonjak dikarenakan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM). Naiknya biaya produksi yang disebabkan tingginya harga BBM dan tingginya suku bunga menyebabkan sektor real sulit untuk meningkatkan produksinya. Sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2005 yaitu sebesar 6,69 persen, namun dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Adapun sektor-sektor lainnya, di luar tiga sektor diatas, pertumbuhannya dibawah tiga persen. Demikian juga dengan sektor primadona Kota Tasikmalaya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mengalami pertumbuhan hanya sebesar 0,82 persen yang mengindikasikan sektor pariwisata pada tahun 2005 tidak berkembang sepesat seperti yang diharapkan.

5. Pada tahun 2006, Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan ini disebabkan oleh laju pertumbuhan yang cukup besar dari beberapa sektor yaitu sektor perdagangan, hotel dan restauran, sektor listrik, gas, dan air bersih serta sektor bangunan. Sementara untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan mengalami laju pertumbuhan yang melambat hal ini disebabkan karena adanya musim kemarau panjang dan banyaknya perubahan fungsi lahan pertanian.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tasikmalaya dapat dijelaskan pada gambar 2.7.

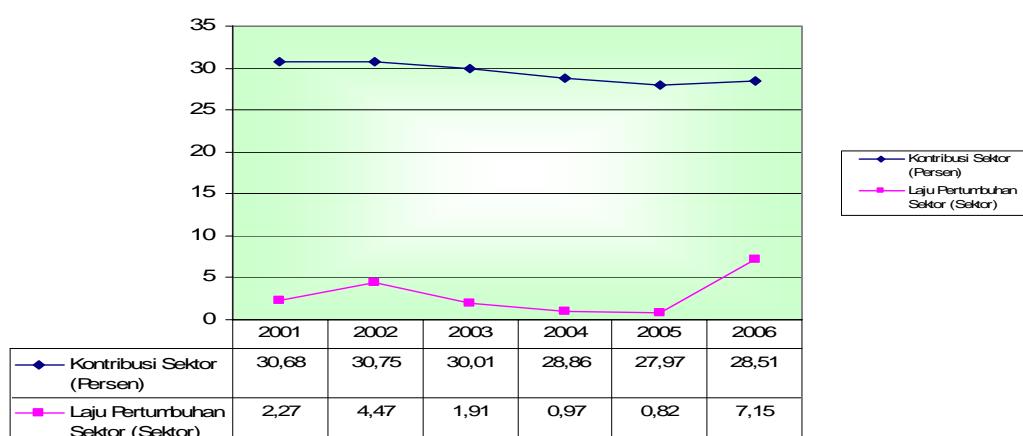
Gambar 2.7.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya
Tahun 2001-2006



(Sumber : Bapeda dan BPS Kota Tasikmalaya, Publikasi PDRB 2006)

Berdasarkan analisis kontribusi PDRB Kota Tasikmalaya atas dasar harga konstan dalam kurun waktu enam tahun (tahun 2001-2006), sektor yang memiliki kontribusi dominan adalah sektor perdagangan, hotel dan restaurant yaitu pada tahun 2001 sampai tahun 2003 mencapai sekitar 30 persen, kemudian menurun menjadi sekitar 28 persen pada tiga tahun berikutnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.8.:

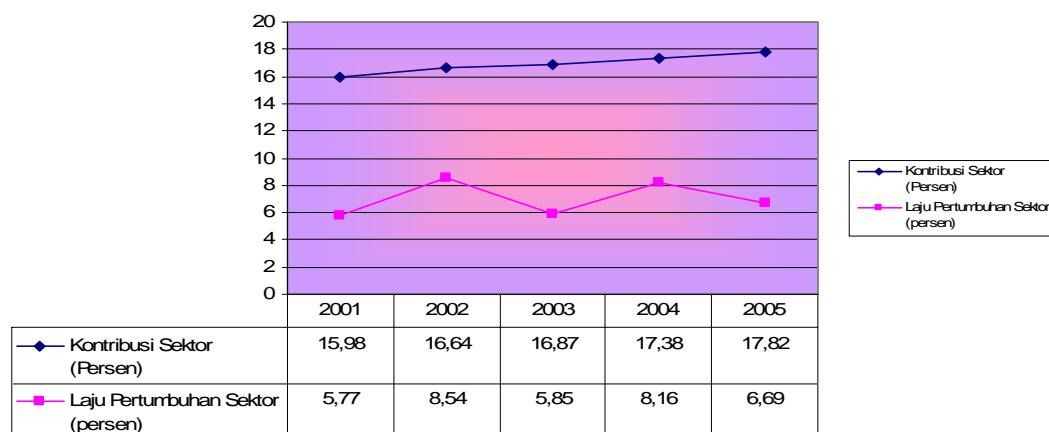
Gambar 2.8.
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran
Tahun 2001-2006 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000



(Sumber : Bapeda dan BPS Kota Tasikmalaya, Publikasi PDRB 2006)

Sektor lain yang cukup besar pertumbuhannya adalah sektor industri pengolahan yang selama kurun waktu enam tahun selalu mengalami pertumbuhan di atas 5 persen, yang berkisar antara 5,77 persen pada tahun 2001 dan mencapai nilai tertinggi sebesar 8,54 persen pada tahun 2002 (Gambar 2.9.). Kontribusi sektor industri pengolahan ini selama enam tahun pada PDRB Kota Tasikmalaya berada pada kisaran nilai 15,98 persen pada tahun 2001 dan terus meningkat mencapai nilai 17,82 persen pada tahun 2005. Nampaknya sektor ini akan memiliki peran yang penting dalam mengerakkan aktivitas perekonomian mengingat laju pertumbuhannya cukup tinggi serta kontribusinya pada PDRB Kota Tasikmalaya cukup besar.

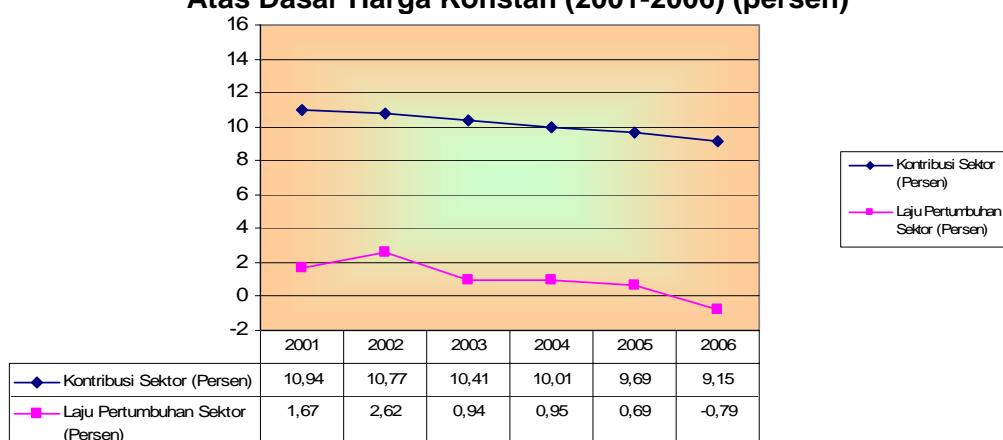
Gambar 2.9
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
Tahun 2001-2005 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000



Sumber : Bapeda dan BPS Kota Tasikmalaya, Publikasi PDRB 2006)

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Tasikmalaya selama tahun 2001-2006 yang cenderung menurun. Selain itu laju pertumbuhannya pada rentang tahun 2003 sampai 2005 di bawah satu persen, dan pada tahun 2006 terjadi perlambatan -0,79 persen sehingga nampaknya tidak bisa diharapkan akan menjadi sektor dominan yang berkontribusi besar pada PDRB Kota Tasikmalaya (Gambar 2.10). Hal ini kontradiktif dengan kenyataan bahwa 69 persen dari luas lahan di Kota Tasikmalaya masih didominasi untuk kegiatan pertanian, termasuk perikanan dan peternakan.

Gambar 2.10.
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Konstan (2001-2006) (persen)



Sumber : Bapeda dan BPS Kota Tasikmalaya, Publikasi PDRB 2006)

Berdasarkan Tabel 2.17 dapat dilihat bahwa sub sektor perikanan dapat ditingkatkan perannya, mengingat saat ini di Kota Tasikmalaya telah dimiliki Depo Pasar Ikan dan Balai Benih Ikan di Kecamatan Indihiang yang sesuai fungsi Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melayani tidak hanya perdagangan dan jasa di dalam Kota namun juga bagi kabupaten di sekitarnya.

Tabel 2.17
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Konstan (2001-2006) (persen)

KELOMPOK SEKTOR/SEKTOR	2001	2002	2003	2004	2005	2006
KONTRIBUSI SEKTOR/SUB SEKTOR						
PERTANIAN	10,94	10,77	10,41	10,01	9,69	9,15
a. Tanaman Bahan Makanan	4,45	4,27	4,10	3,91	3,76	3,55
b. Tanaman Perkebunan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	5,64	5,64	5,48	5,28	5,11	4,82
d. Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01
e. Perikanan	0,81	0,81	0,79	0,77	0,76	0,72
KELOMPOK SEKTOR/SEKTOR	2001	2002	2003	2004	2005	2006
LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR/SUB SEKTOR						
PERTANIAN	1,67	2,62	0,94	0,95	0,69	-0,79
a. Tanaman Bahan Makanan	0,19	0,16	0,14	0,10	0,09	-0,80
b. Tanaman Perkebunan	1,24	7,39	0,74	1,78	0,32	1,59
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,67	4,24	1,49	1,09	0,73	-0,80
d. Kehutanan	0,35	2,98	1,05	0,61	0,38	0,84
e. Perikanan	5,31	4,60	1,34	2,62	3,53	-0,80

Sumber : Bapedia dan BPS Kota Tasikmalaya, Publikasi PDRB 2006

Sub Sektor Peternakan dan hasil-hasilnya merupakan sub sektor yang kontribusinya terbesar bagi sektor pertanian, yaitu dalam kurun waktu 2001-2005 nilainya lima persen lebih, walaupun laju pertumbuhannya mengalami penurunan sejak tahun 2003. Salah satu sarana dan prasarana yang sedang disiapkan mulai tahun 2007 adalah pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) yang direncanakan dibangun di Kecamatan Indihiang berikut pasar hewan yang akan melayani perdagangan hewan di Kota Tasikmalaya serta kabupaten sekitarnya.

Sektor lainnya yang cukup berperan dalam aktivitas perekonomian di Kota Tasikmalaya adalah sektor jasa. Sektor ini berkontribusi sebesar 14,49 persen pada tahun 2001 dan kemudian terus sedikit menurun sehingga pada tahun 2005 besarnya 13,25 persen dan sedikit meningkat menjadi 13,36 persen pada tahun 2006 (selengkapnya pada Tabel 2.18). Adapun laju pertumbuhan sektor jasa berkisar antara 0,86 persen sampai 5,97 persen.

Tabel 2.18
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Jasa Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Konstan (2001-2006) (persen)

KELOMPOK SEKTOR/SEKTOR	2001	2002	2003	2004	2005	2006
KONTRIBUSI SEKTOR/SUB SEKTOR						
JASA-JASA	14,49	14,41	13,92	13,47	13,25	13,36
a. Pemerintahan Umum	7,53	7,47	7,18	6,96	6,83	7,09
1). Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan	7,53	7,47	7,18	6,96	6,83	7,09
2). Jasa Pemerintahan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Swasta	6,95	6,94	6,74	6,51	6,42	6,27
1). Sosial Kemasyarakatan	1,25	1,26	1,22	1,18	1,20	1,19
2). Hiburan dan Rekreasi	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14
3). Perorangan dan Rumah Tangga	5,53	5,52	5,36	5,17	5,08	4,94
KELOMPOK SEKTOR/SEKTOR	2001	2002	2003	2004	2005	2006
LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR/SUB SEKTOR						
JASA-JASA	2,28	3,70	0,86	1,60	2,37	5,97
a. Pemerintahan Umum	3,64	3,36	0,35	1,80	2,09	9,08
1). Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan	3,64	3,36	0,35	1,80	2,09	9,08
2). Jasa Pemerintahan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Swasta	0,84	4,06	1,40	1,39	2,66	2,66
1). Sosial Kemasyarakatan	3,14	4,38	1,78	1,27	5,42	4,20
2). Hiburan dan Rekreasi	(0,77)	1,90	0,16	1,69	1,24	2,94
3). Perorangan dan Rumah Tangga	0,39	4,05	1,35	1,41	2,07	2,29

Sumber : Bapeda dan BPS Kota Tasikmalaya, Publikasi PDRB 2006

C. PDRB Perkapita/Pendapatan Perkapita

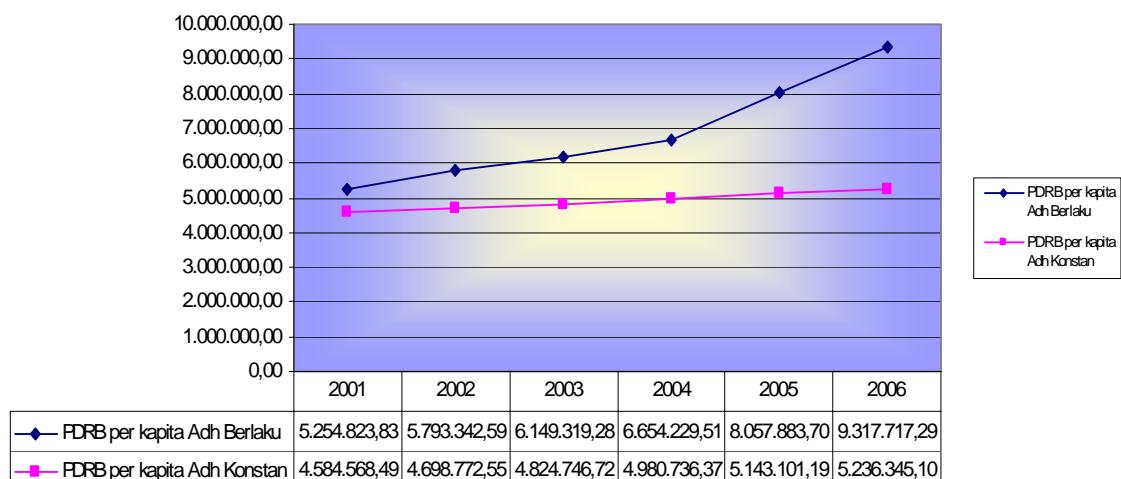
Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil bagi antara pendapatan regional dengan penduduk pertengahan tahun. Pendapatan regional diperoleh dari PDRB atas dasar harga berlaku dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung netto ditambah arus pendapatan dari luar Kota Tasikmalaya.

Data penyusutan, pajak tak langsung dan arus pendapatan, pada saat ini belum dapat dihitung. Sehingga diasumsikan pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita. PDRB perkapita adalah kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan pendapatan pada tahun bersangkutan yang belum tentu pendapatan tersebut seluruhnya diterima masyarakat wilayah itu.

PDRB perkapita Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2001 sampai dengan 2006 mengalami kenaikan. Dari tahun 2001 ke tahun 2002 terjadi kenaikan sebesar Rp. 760.625,75 atau 10,25 persen. Untuk tahun 2003 naik sebesar 6,14 persen dan tahun 2004 naik sebesar 8,21 persen. Pada tahun 2005 PDRB perkapita naik 21,09 persen, sedangkan pada tahun 2006 mencapai Rp. 9.317.717,29 (naik 15,63 persen).

PDRB perkapita Kota Tasikmalaya atas dasar harga konstan tahun 2000 mengalami kenaikan pula, yaitu 2,49 persen pada tahun 2002; sebesar 2,68 persen pada tahun 2003; lalu 3,23 persen pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 naik menjadi 3,26 persen serta pada tahun 2006 menjadi Rp. 5.236.345,10 atau naik 1,81 persen.

Gambar 2.11
PDRB Perkapita Kota Tasikmalaya Tahun 2001 - 2006 (Rupiah)



Sumber : Bapeda dan BPS Kota Tasikmalaya, Publikasi PDRB 2006

D. Inflasi

Besarnya inflasi suatu daerah bisa digambarkan dengan perkembangan setiap tahun dari indek harga implisit Produk Domestik Regional Bruto. Angka inflasi ini bisa menggambarkan besarnya perubahan harga barang-barang dan jasa yang beredar di pasaran. Inflasi juga bisa dipakai sebagai tolok ukur stabilitas perekonomian suatu wilayah. Tingkat inflasi yang tinggi (mencapai dua digit) relatif mencerminkan stabilitas ekonomi yang kurang baik, begitupun sebaliknya.

Tabel 2.19
Harga Implisit PDRB Kota Tasikmalaya Tahun 2001-2006 (Persen).

Tahun	Kota Tasikmalaya	
	Indeks Harga Implisit	Inflasi (%)
2001	114,62	14,62
2002	123,29	7,57
2003	127,45	3,37
2004	133,60	4,82
2005	156,67	17,27
2006	177,94	13,57

Sumber : Bapeda dan BPS Kota Tasikmalaya, Publikasi PDRB 2006

Angka inflasi yang diperoleh dari laju indeks implisit PDRB adalah inflasi harga di tingkat produsen atau dari sisi penawaran. Dari Tabel 2.19 di atas terlihat bahwa besarnya inflasi pada tahun 2001 di Kota Tasikmalaya sebesar 14,62 persen. Untuk tahun 2002 inflasi di Kota Tasikmalaya mengalami penurunan dibanding tahun 2001, yaitu menjadi 7,57 persen lalu menjadi 3,37 persen pada tahun 2003. Pada tahun 2004 inflasi di Kota Tasikmalaya mencapai 4,82 persen. Sedangkan pada tahun 2005 melonjak menjadi 17,27 persen hal ini disebabkan naiknya harga BBM yang mempengaruhi seluruh sektor produksi. Adapun laju inflasi pada tahun 2006 sebesar 13,57.

Penurunan angka inflasi menjadi dibawah dua digit, sejak tahun 2002 menunjukkan bahwa stabilitas perekonomian di Kota Tasikmalaya mengalami perbaikan.

Sedangkan pada tahun 2005 hal ini menjadi pengecualian karena tingginya inflasi bukan disebabkan buruknya kinerja perekonomian tetapi oleh faktor eksternal yaitu naiknya harga BBM.

E. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2002, Rencana APBD menganut prinsip berimbang, pada sisi pendapatan dan belanja ditetapkan anggaran masing-masing sebesar Rp. 181.631.746.000,00. Realisasi pendapatan sebesar Rp. 186.358.217.168,44 atau mencapai 102,60 persen, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 172.923.468.292,62 atau mencapai 95,04 persen.

APBD Kota Tasikmalaya tahun 2003 disusun dengan menganut anggaran berbasis kinerja sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 273.776.430.000,00 dan Rp. 281.129.010.000,00. Sementara realisasi pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp. 275.440.527.071,28 (100,61 persen) dan Rp. 266.022.200.251,17 (94,62 persen). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.20.

**Tabel 2.20.
Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Tasikmalaya
Tahun 2002- 2006**

Tahun	Target (Rupiah)		Realisasi (Rupiah)			
	Pendapatan	Belanja	Pendapatan	%	Belanja	%
2002	181.631.746.000,00	181.631.746.000,00	186.358.217.168,44	102,60	172.923.468.292,62	95,04
2003	273.776.430.000,00	281.129.010.000,00	275.440.527.071,28	100,61	266.022.200.251,17	94,62
2004	289.220.274.000,00	302.957.114.000,00	302.600.697.657,09	104,60	290.718.450.368,79	95,90
2005	314.642.491.000,00	340.694.694.000,00	323.097.313.056,15	102,69	318.162.003.817,84	93,39
2006	456.788.667.000,00	480.853.089.000,00	472.800.961.646,34	103,51	452.238.245.264,34	94,05

Sumber : Bagian Keuangan Kota Tasikmalaya

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, bagian usaha daerah, lain-lain pendapatan. Perkembangan anggaran dan realisasi PAD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2002-2006 disajikan pada Tabel 2.21. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2002 sebesar Rp. 21.300.084.416,22 (11,43%) dan pada tahun 2006 sebesar Rp. 51.535.257.318,34 (10,90 %). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 11 % .

Tabel 2.21
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2002-2006 (Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	
	Target	Realisasi
2002	20.343.944.000,00	21.300.084.416,22
2003	25.935.671.000,00	26.393.602.634, 28
2004	29.937.411.000,00	30.787.203.331,09
2005	35.990.591.000,00	38.574.395.165,15
2006	47.458.577.000,00	51.535.257.318,34

Sumber : Bagian Keuangan Kota Tasikmalaya Tahun 2007

PAD Kota Tasikmalaya bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kontribusi realisasi masing-masing komponen PAD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2002 – 2006 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.22. berikut :

Tabel 2.22.
Kontribusi Realisasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2002-2006 (Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Bagian Laba Usaha Daerah	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2002	2.762.199.111,00	17.526.604.865,22	-	1.011.280.440,00
2003	3.518.429.648,00	20.777.243.585,28	-	2.097.929.401,00
2004	4.172.825.566,00	24.182.338.526,39	856.056.092,00	1.575.983.146,70
2005	4.653.748.175,00	30.199.670.309,34	1.517.379.821,00	2.203.596.859,81
2006	5.173.010.214,00	40.019.414.946,34	1.706.351.646,00	4.636.480.512,00

Sumber : Bagian Keuangan Kota Tasikmalaya

a. Pajak Daerah

Berdasarkan Tabel 2.22 di atas, pajak daerah memberikan kontribusi kedua terhadap PAD. Besarnya pajak daerah dari tahun 2002 sampai tahun 2006 semakin meningkat, dengan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 12 persen. Adapun Pajak Daerah tahun 2006 targetnya Rp 4.844.435.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.173.010.214,00 (106,8 persen). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2006

Tahun	Pajak Daerah			
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Pencapaian (%)	Kontribusi terhadap PAD (%)
2002	2.822.762.000,00	2.762.199.111,00	97,85	12,97
2003	3.473.347.000,00	3.518.429.648,00	101,30	13,33
2004	4.049.563.000,00	4.172.825.566,00	103,04	13,55
2005	4.408.194.000,00	4.653.748.175,00	105,57	12,06
2006	4.844.435.000,00	5.173.010.214,00	106,80	10,00

Sumber : Bagian Keuangan Kota Tasikmalaya

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah memberikan kontribusi terbesar pertama terhadap PAD. Besar Retribusi Daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.24 di bawah. Pada tahun 2006 sebesar Rp. 40.019.414.946,34 dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 77,7 persen. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD rata-rata 79,11 persen.

Tabel 2.24
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2002-2006

Tahun	Retribusi Daerah			
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Pencapaian (%)	Kontribusi terhadap PAD (%)
2002	16.502.031.000,00	17.526.604.865,22	106,20	82,28
2003	20.961.609.000,00	20.777.243.585,28	99,12	78,72
2004	23.717.199.000,00	24.182.338.526,39	101,96	78,55
2005	28.441.318.000,00	30.199.670.309,34	106,18	78,29
2006	38.365.653.000,00	40.019.414.946,34	104,30	77,70

Sumber : Bagian Keuangan Kota Tasikmalaya

c. Bagian Laba Usaha Daerah

Perusahaan Daerah di Kota Tasikmalaya memberikan kontribusi terkecil dalam PAD. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.25, kontribusi Bagian Laba Usaha Daerah terhadap PAD masih rendah, yaitu berkisar antara 3,3 persen sampai 5,12 persen.

Tabel 2.25
Target dan Realisasi Bagian Laba Usaha Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2002-2006

Tahun	Bagian Laba Usaha Daerah			
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Pencapaian (%)	Kontribusi terhadap PAD (%)
2002	-	-	-	-
2003	-	-	-	-
2004	1.314.593.000,00	856.056.092,00	119,88	5,12
2005	1.517.379.000,00	1.517.379.821,00	100,00	3,93
2006	1.706.351.000,00	1.706.351.646,00	100,00	3,3

Sumber : Bagian Keuangan Kota Tasikmalaya

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapat Asli Daerah yang Sah telah memberikan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2002 sebesar Rp. 1.011.280.440,00 (5 persen), selanjutnya kontribusi pada tahun 2006 sebesar Rp. 4.636.480.512,00 (9,00 persen). Kontribusi rata-rata Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap PAD sebesar 6,56 persen.

Tabel 2.26
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2006

Tahun	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Pencapaian (%)	Kontribusi terhadap PAD (%)
2002	1.019.151.000,00	1.011.280.440,00	99,23	5,00
2003	1.480.715.000,00	2.097.929.401,00	141,68	7,95
2004	1.314.593.000,00	1.575.983.146,70	119,88	5,12
2005	1.623.700.000,00	2.203.596.859,81	135,71	5,72
2006	2.542.138.000,00	4.636.480.512,00	182,40	9,00

Sumber : Bagian Keuangan Kota Tasikmalaya

2. Dana Perimbangan Daerah

Komponen Dana Perimbangan Daerah berasal dari : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi. Dana Perimbangan Daerah tahun 2006 ditargetkan sebesar Rp. 265.390.033.000,00 dan terealisasi Rp. 269.040.869.121,00 (103,15 persen). Adapun perkembangan Dana Perimbangan dari tahun 2002- 2006 dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut:

Tabel 2.27.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Tasikmalaya
Tahun 2002-2006

Tahun	Dana Perimbangan Daerah			
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Pencapaian (%)	Kontribusi terhadap PAD (%)
2002	152.411.678.000,00	155.448.021.105,00	101,99	83,41
2003	229.714.199.000,00	231.347.682.470,00	100,71	83,99
2004	255.540.375.000,00	267.800.896.068,00	104,80	88,50
2005	265.390.033.000,00	269.040.869.121,00	101,38	85,97
2006	404.595.688.000,00	417.347.868.657,00	103,15	88,3

Sumber : Bagian Keuangan Kota Tasikmalaya

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Dana Perimbangan Daerah dari tahun 2002-2006 lebih besar dari target dan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dana Perimbangan Daerah memberikan kontribusi terbesar pada Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya. Adapun kontribusi masing-masing komponen Dana Perimbangan Daerah Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 2.28. berikut:

Tabel 2.28.
Kontribusi Realisasi Dana Perimbangan Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2002-2006 (Rupiah)

Tahun	Jenis Pendapatan			
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Bagi Hasil Pajak & Bantuan Propinsi
2002	26.358.021.105,00	129.090.000.000,00		1.011.280.440,00
2003	20.811.920.248,00	189.170.000.000,00	3.715.000.000,00	17.650.762.222,00
2004	27.175.082.933,00	203.952.000.000,00	9.500.000.000,00	27.173.813.135,00
2005	25.882.133.885,00	205.408.000.000,00	7.500.000.000,00	30.250.735.236,00
2006	34.824.147.318,00	320.075.000.000,00	20.730.000.000,00	41.718.721.339,00

Sumber : Bagian Keuangan Kota Tasikmalaya

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa komponen Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi terbesar terhadap dana perimbangan, sedangkan Dana Alokasi Khusus memberikan kontribusi terkecil terhadap dana perimbangan.

3. Pendapatan Lain yang Sah

Pendapatan lain yang sah Kota Tasikmalaya pada tahun 2006 mencapai Rp. 3.917.835.671,00 dari target sebesar Rp. 4.734.402.000,00 (82,75 persen). Adapun perkembangan pendapatan lain yang sah dari tahun 2002- 2006 dapat dilihat pada Tabel 2.29. berikut :

Tabel 2.29.
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Tasikmalaya
Tahun 2002 – 2006 (Rupiah)

Tahun	Dana Pendapatan Lain yang Sah			
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Pencapaian (%)	Kontribusi terhadap PAD (%)
2002	8.565.646.000,00	9.299.633.255,00	108,57	4,99
2003	18.126.560.000,00	17.699.241.967,00	97,64	6,43
2004	3.742.488.000,00	4.012.598.258,00	107,22	1,33
2005	13.261.867.000,00	15.482.048.770,00	116,7	1,70
2006	4.734.402.000,00	3.917.835.671,00	82,75	0,80

Sumber : Bagian Keuangan Kota Tasikmalaya

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dana pendapatan lain yang sah memberikan kontribusi terkecil pada Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB IV

ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

A. Belum Optimalnya Penggalian Sumber-sumber Pembiayaan Daerah

Peningkatan beban belanja daerah cenderung meningkat, sementara kebijakan fiskal pusat dalam hal alokasi anggaran untuk daerah cenderung mengalami penurunan sehingga daerah perlu lebih menggali sumber – sumber pendanaan baru. Hal ini menjadi permasalahan sekaligus tantangan bagi daerah kedepan. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan pendekatan strategis dan tepat melalui upaya efisiensi dalam belanja daerah disertai upaya optimalisasi sumber pendapatan asli daerah dan sumber pembiayaan lainnya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap alokasi DAU maupun DAK.

B. Kesenjangan Pengembangan Wilayah Utara - Selatan

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi mengakibatkan peningkatan pada kepadatan penduduk dan kebutuhan akan lahan permukiman. Arah perkembangan permukiman cenderung untuk memadati wilayah-wilayah utara kota, sehingga menimbulkan ketimpangan antara wilayah utara dan selatan kota. Hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah kota agar pembangunan kota di masa yang akan datang tidak menimbulkan disparitas antara wilayah utara dan selatan. Selain itu bertambahnya permukiman berakibat pada meningkatnya kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan tambahan berbagai prasarana dan sarana dasar perkotaan yang mencukupi bagi masyarakatnya

C. Kurangnya Kapasitas Prasarana dan Pengelolaan Sampah

Meningkatnya volume sampah yang dihasilkan sebagai akibat adanya peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas kegiatan masyarakat memerlukan perencanaan yang matang dalam masalah perencanaan persampahan. Dengan kondisi prasarana sampah yang ada saat ini maka kapasitas maksimum penampungan TPA akan terus mengalami pemendekan usia. Oleh sebab itu perlu adanya upaya peningkatan kapasitas prasarana dan pengelolaan sampah dengan teknologi baru yang ramah lingkungan, serta jika dimungkinkan diperlukan penentuan lokasi TPA baru, khususnya apabila pemerintah kota ingin bekerjasama dengan pemerintah kabupaten sekitarnya dalam masalah pengelolaan sampahnya (mengingat kapasitas TPA Ciangir yang hanya seluas 5 Ha) dirasa kurang memadai untuk perkembangan 20 tahun ke depan, serta adanya rencana pembangunan TPA regional di Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat.

D. Belum Memadainya Prasarana Jalan yang Mendukung Perkembangan Aktivitas Kegiatan Produktif

Kondisi kerusakan jalan menjadi salah satu hambatan bagi perkembangan aktivitas kegiatan produktif yang ada di kawasan perkotaan, karena akan menghambat aksesibilitas dan menimbulkan tambahan biaya produksi sebagai akibat kerusakan kendaraan. Kemacetan jalan, kurangnya sarana perparkiran juga menjadi salah satu masalah utama dalam perencanaan tata ruang di kawasan perkotaan. Selain itu, adanya rencana jalan lintas Rajapolah akan menyebabkan Kota Tasikmalaya relatif terisolir, kondisi ini dapat menjadi penghambat perkembangan kota di masa yang akan datang, sehingga perlu dilakukan upaya terobosan untuk mengantisipasinya.

E. Belum Memadainya Sistem Drainase dan Pembuangan Air Kotor

Ancaman terjadinya perluasan wilayah banjir di wilayah perkotaan sebagai akibat dari buruknya sistem drainase yang ada. Potensi ini semakin besar di Kota Tasikmalaya karena sebagian besar dari situ yang ada berada pada kondisi rusak, sehingga mengganggu proses sistem aliran air permukaan.

Sistem pembuangan air kotor yang belum baik dapat mengganggu kondisi sanitasi lingkungan, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit menular yang pada akhirnya akan berakibat pada menurunnya angka indeks kesehatan Kota Tasikmalaya.

Kecenderungan masyarakat yang masih memenuhi kebutuhan air bersihnya sendiri (disertai dengan jumlah penduduk yang terus bertambah) akan membawa dampak bagi kesehatan sejalan dengan buruknya sistem drainase dan pembuangan air kotor di Kota Tasikmalaya.

F. Lambatnya Perkembangan Sektor-sektor Unggulan

Dengan memperhatikan sektor yang memiliki nilai kontribusi yang besar terhadap PDRB serta dengan memperhatikan nilai pertumbuhan yang semakin membaik dari tahun ke tahun, maka sektor yang layak untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan adalah:

1. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran
2. Sektor industri pengolahan
3. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
4. Sektor jasa
5. Sektor listrik, gas dan air bersih
6. Sektor pengangkutan dan komunikasi

Dengan demikian dalam kurun waktu 2008 - 2012 diperlukan program-program untuk mendukung penguatan sektor sekunder dan sektor tersier, sehingga kegiatan-kegiatan kelompok sekunder yaitu industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih, dan kegiatan-kegiatan kelompok sektor tersier yaitu perdagangan, hotel dan restauran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa dapat berkembang baik serta memberikan kontribusi cukup besar pada perekonomian Kota Tasikmalaya. Penguatan ini penting, karena Tasikmalaya

“berstatus” kota yang tentu saja peran aktivitas perekonomian di sektor sekunder dan tersier harus lebih dominan.

G. Masih Lemahnya Regulasi Perizinan Guna Mendukung Pertumbuhan Sektor Ekonomi

Diharapkan dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya pada tahun 2008 akan berdampak positif terhadap laju pertumbuhan sektor ini. Regulasi lainnya adalah regulasi perdagangan, yang mengatur pendirian supermarket atau hypermarket agar keberadaannya tidak mengganggu pasar tradisional yang saat ini telah ada.

Penting pula untuk menata pasar-pasar tradisional sehingga mampu bersaing dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang perdagangan. Selain pasar tradisional, yang perlu diberi perhatian adalah Depo Pasar Ikan dan Balai Benih Ikan yang saat ini sudah terbangun untuk kemudian dilengkapi sarana dan prasarana sehingga menguatkan fungsinya sebagai sarana pemasaran ikan dan penyedia benih ikan yang dapat melayani pasar di dalam Kota Tasikmalaya dan kabupaten sekitarnya.

H. Belum Tertatanya Sentra-sentra Komoditas Unggulan

Penataan sentra-sentra komoditas unggulan seperti sentra bordir, sentra batik, sentra anyaman mendong, serta komoditas lainnya perlu dilakukan. Penataan tersebut termasuk peningkatan infrastruktur jalan yang pada umumnya berada dalam kondisi buruk dan kurangnya fasilitas penerangan termasuk papan informasi yang menuju ke sentra-sentra tersebut.

I. Kurang Representatifnya Sarana dan Prasarana Pasar

Peningkatan sarana dan prasarana pasar yang representatif untuk komoditas hasil produksi lokal menjadi sangat penting, serta peningkatan kreativitas dan inovasi teknologi produksi para pelaku usaha lokal memegang peran penting dalam peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, sebab kreativitas dan teknologi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal akan berpengaruh terhadap peningkatan permintaan masyarakat luar kota terhadap produk lokal Tasikmalaya, serta akan meningkatkan jumlah kunjungan wisata perdagangan ke Kota Tasikmalaya.

Cara yang efektif adalah membangun sarana pasar lokal yang representatif dengan mengembangkan promosi efektif dan membangun jaringan usaha yang kuat, serta fasilitas pasar tersebut dikemas pula menjadi sarana wisata belanja komoditas lokal Tasikmalaya.

J. Belum Tertatanya Kawasan Wisata Tasikmalaya

Penataan kawasan wisata Kota Tasikmalaya sangat penting guna meningkatkan aktivitas perdagangan, hotel dan jasa lainnya. Salah satu obyek wisata alam yang

belum tertata baik adalah obyek wisata Situ Gede. Saat ini telah tersusun site plan Mina Wisata Situ Gede, yang salah satu tujuannya adalah menata kawasan Situ Gede yang potensial untuk kegiatan di bidang perikanan dan mempunyai potensi sebagai obyek rekreasi. Selain itu Kota Tasikmalaya wilayah selatan mempunyai cukup banyak potensi pariwisata, kawasan rest area Urug di Kecamatan Kawalu berpotensi untuk dijadikan wisata alam, sentra bordir yang tersebar di Kecamatan Kawalu, serta Makam Syekh Abdul Gharib yang berpotensi sebagai lokasi wisata ziarah, penting untuk diprioritaskan penataan sarana dan prasarana.

K. Masih Sulitnya Akses terhadap Bank

Hasil proyeksi terhadap subsektor lembaga keuangan tanpa bank, menunjukkan peningkatan kontribusi dan peningkatan pertumbuhan yang signifikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya lebih memilih lembaga keuangan non-perbankan dalam aktivitas kehidupan dan usahanya, atau masih terdapat kesulitan masyarakat dalam mengakses jasa keuangan bank, sehingga masyarakat mengalihkannya kepada lembaga keuangan lain (*finance*, dll.).

Melihat kenyataan bahwa subsektor bank memberikan kontribusi terhadap PDRB relatif besar, maka yang perlu dilakukan adalah peningkatan pelayanan dan debirokrasi pelayanan, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan mengakses jasa keuangan bank.

L. Belum Memadainya Prasarana Listrik dan Air Bersih

Berdasarkan hasil proyeksi, kontribusi subsektor listrik dan air bersih, serta pertumbuhan subsektor listrik dan air bersih sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 cenderung meningkat, hal ini terjadi karena subsektor tersebut tumbuh searah dengan peningkatan permintaan penduduk terhadap pelayanan penyediaan listrik dan air bersih, dan disertai pula oleh kecenderungan peningkatan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya.

Upaya peningkatan melalui kebijakan peningkatan pelayanan dan pembangunan sarana listrik dan sarana penyaluran air bersih, menjadi faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi faktor penunjang bagi peningkatan produksi sektor industri pengolahan yang mempergunakan listrik dan air bersih sebagai bahan baku produksi.

M. Kurang Terpeliharanya Kelestarian Bukit-bukit

Sektor pertambangan dan galian yang dominan saat ini di Kota Tasikmalaya adalah kegiatan pertambangan pasir (Galian C) yang tentu saja tidak dapat diperbaharui setelah selesai dieksplorasi. Pada tahun 2008 sampai tahun 2012 eksplorasi bukit-bukit di Kota Tasikmalaya harus dikendalikan karena kegiatan pertambangan pasir ini erat kaitannya dengan ketersediaan sumber air dan perubahan ekosistem, terutama perubahan iklim mikro, sehingga dampaknya selama lima tahun ke depan kontribusi

sektor pertambangan dan galian tidak meningkat. Pembangunan sektor pertambangan dan galian, terutama subsektor galian memerlukan penanganan dan regulasi yang ketat. Regulasi yang tepat akan mengurangi resiko krisis lingkungan (pemanasan global), serta mengurangi resiko alih fungsi lahan produktif menjadi lahan pemukiman, yang pada akhirnya menurunkan persediaan pangan lokal.

Penanganan yang baik dalam mengelola hutan, relatif dapat mempertahankan keberadaan hutan sebagai penyangga persediaan air Kota Tasikmalaya. Mempertahankan kondisi hutan dan peningkatan upaya-upaya perbaikan hutan yang mulai rusak dengan melibatkan masyarakat dalam pemberdayaannya, akan menjamin masyarakat terhindar dari bencana kekeringan dan bencana banjir serta longsor.

N. Masih Lemahnya Peran Sektor Pertanian

Meskipun berdasarkan hasil proyeksi perannya selama lima tahun ini semakin menurun dari tahun ke tahun namun sektor pertanian erat kaitannya dengan ketahanan pangan di Kota Tasikmalaya yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat sehingga harus tetap dilaksanakan program-program untuk meningkatkan peran sektor pertanian. Selain itu, sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan sektor industri pengolahan khususnya industri pengolahan hasil-hasil produk pertanian, sebab hasil produksi pertanian merupakan bahan baku bagi sektor industri pengolahan. Dengan demikian selama lima tahun ke depan perlu dilaksanakan juga kegiatan industri pengolahan hasil-hasil produk pertanian sehingga ada keterkaitan antara hulu dan hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Selama lima tahun ke depan nampaknya perlu dilaksanakan program-program yang menitikberatkan pada intensifikasi pertanian terutama untuk sub sektor tanaman bahan makanan mengingat erat kaitannya dengan ketahanan pangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Perlu diterapkan teknologi yang tepat untuk peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi pertanian yang tidak memerlukan lahan yang relatif luas antara lain dengan teknologi hidroponik.

Sub sektor perikanan dapat ditingkatkan perannya, mengingat saat ini di Kota Tasikmalaya telah dimiliki Depo Pasar Ikan dan Balai Benih Ikan di Kecamatan Indihiang yang sesuai fungsi Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melayani tidak hanya perdagangan dan jasa di dalam Kota namun juga bagi kabupaten di sekitarnya.

Sub Sektor Peternakan dan hasil-hasilnya merupakan sub sektor yang kontribusinya terbesar bagi sektor pertanian, program yang perlu ditingkatkan adalah dengan mengintensifkan usaha pembibitan sapi potong dan perah serta produk olahannya. Salah satu sarana dan prasarana yang sedang disiapkan mulai tahun 2007 adalah pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) yang direncanakan dibangun di Kecamatan Indihiang berikut Pasar Hewan yang akan melayani perdagangan hewan di Kota Tasikmalaya serta kabupaten sekitarnya. Pembangunan RPH dan Pasar

Hewan beserta kelengkapan sarananya perlu diprioritaskan pada lima tahun ke depan.

O. Belum Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Sehat

Laju tingkat inflasi dibawah dua digit, merupakan cerminan sehatnya perekonomian suatu daerah. Hasil proyeksi dalam kurun waktu 2008 sampai 2012, tingkat inflasi cenderung meningkat dan berada pada posisi dua digit. Keadaan tersebut menciptakan kewajiban bagi otoritas moneter Kota Tasikmalaya untuk mengeluarkan kebijakan pengendalian inflasi, baik berupa kebijakan peningkatan tingkat bunga, melakukan tight money policy, atau kebijakan inflation targeting.

Upaya-upaya kegiatan di atas harus didukung pula oleh operasional perbankan Tasikmalaya dalam penyaluran kreditnya, yakni dengan memperkecil kredit yang bersifat konsumtif dan memperbesar jumlah kredit produktif. Penyaluran kredit produktif yang besar, serta diikuti dengan debirokrasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses jenis kredit tersebut akan menciptakan keseimbangan antara perputaran barang dengan perputaran uang ($MV = PT$).

Proyeksi menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, namun diikuti pula dengan peningkatan tingkat inflasi dengan angka inflasi berada pada posisi dua digit. Keadaan ini menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya cenderung tidak meningkatkan daya beli masyarakat.

Dengan demikian perlu upaya-upaya dari sektor riil untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, diantaranya berupaya membentuk jaringan usaha antara pengusaha lokal, baik antara UMKM, koperasi maupun pengusaha lainnya, serta jaringan usaha lokal tersebut diupayakan membuat link dengan jaringan usaha yang ada di daerah lain, maupun negara lain. Jaringan usaha dapat dijadikan sebagai jalan memperkecil biaya transportasi, memperkecil biaya promosi, memperkecil biaya penelitian, dan memangkas biaya lainnya yang berhubungan dengan high cost economy, sehingga efisiensi dapat dicapai dan pada gilirannya harga produk yang dipasarkan relatif lebih murah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi perekonomian Kota Tasikmalaya selama kurun waktu tahun 2001 - 2005, dan hasil proyeksi tahun 2008 – 2012, diperoleh nilai rata-rata inflasi sebesar 14,75 persen, rata-rata LPE sebesar 5,02 persen yang diikuti dengan rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar konstan dan rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan masing-masing sebesar empat persen dan tiga persen. Angka tersebut di atas menunjukkan bahwa perekonomian Kota Tasikmalaya pada kurun waktu 2008 - 2012, memerlukan penanganan yang sangat serius, sebab kemampuan rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya berkisar antara tiga persen sampai dengan lima persen pada rata-rata tingkat inflasi yang relatif besar yaitu 14,75 persen.

Kemampuan tertinggi pertumbuhan ekonomi yang diperoleh Kota Tasikmalaya sesuai hasil proyeksi yaitu enam persen pada tahun 2012, namun pertumbuhan jumlah produksi barang dan jasa daerah (PDRB atas dasar harga konstan) hanya sebesar empat persen dan PDRB Perkapita sebesar tiga persen, dan tingkat inflasi 17 persen. Kondisi ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat relatif rendah, sebab pertumbuhan ekonomi sangat lambat, pada saat tingkat inflasi yang tinggi (daya beli masyarakat rendah)

Berdasarkan kepada hasil analisis, target LPE yang rasional adalah sebesar 6 persen sampai dengan 8 persen pada tahun 2012, yang diikuti dengan pengendalian tingkat laju inflasi sebesar 7 sampai dengan 9 persen. Target pencapaian LPE sebesar 6 sampai dengan 8 persen harus disertai pula dengan pertumbuhan PDRB yang searah dengan LPE tersebut, yaitu sebesar 6 sampai dengan 8 persen.

Penetapan target tersebut di atas didasarkan kepada beberapa indikator :

1. Terdapat potensi yang cukup besar dari sektor industri pengolahan, dimana industri pengolahan Kota Tasikmalaya memiliki keunggulan mutlak, dan keunggulan komparatif, sebab jenis produk dari industri pengolahan Kota Tasikmalaya cenderung berbeda dengan produk dari daerah lainnya (memiliki karakteristik yang khas, misalnya kerajinan bambu, anyaman mendong, bordir, makanan, dan alas kaki), dan produktivitas kerja pada sektor ini sangat tinggi.
2. Perkembangan sarana komunikasi, informasi dan transportasi, mendukung kepada upaya penyebarluasan informasi produk Kota Tasikmalaya di pasar nasional dan global, mendukung kelancaran distribusi barang dari dan ke Kota Tasikmalaya.
3. Terdapat komitmen lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan kinerja keuangannya, terutama perbaikan manajemen kredit yang akan menggeser kredit konsumtif kepada kredit produktif dengan debirokrasi yang semakin memudahkan nasabah produktif untuk memperoleh kemudahan akses terhadapnya.
4. Kejelasan komitmen pemerintah untuk mengembangkan sektor perdagangan Kota Tasikmalaya. Hal ini mendukung kepada pengembangan pasar komoditas lokal di daerah, dan sarana pasar tersebut dapat pula dijadikan sebagai sarana wisata belanja komoditas khas Tasikmalaya. Upaya pengembangan sektor perdagangan diikuti pula oleh kebijakan mengutamakan sarana pasar komoditas lokal dari pada komoditas impor, tidak seperti yang terjadi pada saat ini, pasar modern lebih didominasi oleh komoditas impor, sehingga komoditas lokal kalah bersaing, yang pada akhirnya mematikan usaha industri pengolahan daerah.
5. Luas lahan pertanian masih memungkinkan untuk dikembangkan terhadap komoditas pertanian yang berbasis industri pengolahan lokal, sehingga industri pengolahan dan sektor pertanian berada dalam jaringan yang efektif dan efisien serta berada dalam lingkungan Kota Tasikmalaya.

6. Terdapat upaya-upaya memaksimalkan tataruang kota, dimana area industri, area pertanian, area pemukiman berada pada tataruang yang berbeda.
7. Terdapat lembaga-lembaga pelatihan yang memungkinkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Kota Tasikmalaya.

Ketujuh indikator penopang peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut, memungkinkan tercapainya target pencapai LPE sebesar 6 persen sampai dengan 8 persen pada tahun 2012.

Target tingkat inflasi 7 sampai dengan 8 persen pada tahun 2012 dapat dicapai apabila:

1. Peningkatan harga pangan dapat diantisipasi, melalui kebijakan ketahanan pangan lokal, dengan mengutamakan konsumsi penduduk daerah, serta mengaktifkan kembali sistem lumbung desa, untuk mencapai target pemenuhan pangan penduduk Kota Tasikmalaya. Penganekaragaman bahan pangan yang bersumber dari bahan baku lokal akan mampu memperkecil ketergantungan terhadap bahan pangan impor (sebab perdagangan pangan impor berindikasi monopoli, sehingga harga dikendalikan eksprotir maupun produsen luar negeri)
2. Perbaikan manajemen kredit perbankan yang lebih mengutamakan kredit produktif, akan mendorong pertumbuhan jumlah produksi barang dan jasa daerah (PDRB), yang pada akhirnya dapat membendung peningkatan tingkat inflasi.
3. Menumbuhkan koperasi produksi dan koperasi perdagangan, untuk menciptakan sarana pasar komoditas lokal, serta meningkatkan jumlah produsen lokal.
4. Memberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan akses perbankan bagi masyarakat produktif yang memiliki kemampuan untuk memproduksi barang-barang substitusi impor, sebab komoditas impor seringkali menjadi faktor penyebab peningkatan inflasi yang bersumber dari *import inflation* dari negara pengimpor barang bersangkutan.
5. Melakukan tindakan hukum yang tegas bagi pelaku penimbun barang, sebab aksi penimbunan barang merupakan faktor yang paling cepat memicu peningkatan inflasi.

P. Masih Lemahnya Apresiasi Masyarakat terhadap Pelestarian Kebudayaan Daerah

Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap upaya pelestarian kebudayaan daerah merupakan kenyataan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Adanya era globalisasi yang memungkinkan mobilisasi angkatan kerja yang semakin cepat, membawa dampak pada semakin tingginya persaingan untuk mendapatkan kesempatan kerja yang secara langsung berhubungan dengan tingkat kemampuan dan jenjang pendidikan dan pengaruh budaya luar negeri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan bangsa.

Q. Belum Terciptanya Organisasi Perangkat Daerah yang Ramping, Efisien dan Efektif

Organisasi perangkat daerah yang ramping, efisien, efektif dan operasional serta kelembagaan pemerintah Kota Tasikmalaya yang tertata perlu terwujud agar dapat menjalankan kewenangan, urusan dan fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan secara lebih optimal. Hal ini dibarengi dengan peningkatan mekanisme, prosedur, dan tata kerja aparatur yang tertib, efisien dan efektif untuk mewujudkan kinerja yang akuntabel dan bebas KKN. Disamping itu, peningkatan kapasitas guna menciptakan PNS yang profesional, dibarengi dengan penambahan jumlah aparat yang terencana dengan baik sehingga dapat memberikan layanan publik yang optimum dan berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas perlu didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat waktu, menyajikan informasi dan data-data pemerintahan lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat.

BAB V

VISI, MISI, DAN SASARAN PEMBANGUNAN

A. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintahan Kota Tasikmalaya, sesuai dengan amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dirumuskan dari Visi Kepala Daerah hasil pemilihan langsung. Perumusan visi pembangunan ini juga mempertimbangkan kondisi umum Kota Tasikmalaya sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan pada periode – periode sebelumnya. Kondisi keberhasilan masa depan Kota Tasikmalaya hingga tahun dinyatakan dalam visi:

“Kesejahteraan Masyarakat, dalam Bingkai Iman dan Taqwa”

Penjabaran Visi Kepala Daerah

Kesejahteraan masyarakat

- Terpenuhinya hak dasar masyarakat yang berupa kemudahan terhadap akses pendidikan, kesehatan dan paritas daya beli. Perwujudan dari visi ini sangat penting karena merupakan inti dari tujuan pembangunan secara umum yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*).
- Tersedianya infrastruktur yang berkualitas secara merata dan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai. Hal ini merupakan kunci yang sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, karena dengan infrastruktur yang baik diharapkan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi sebagai *multiplier effect* sehingga ada peningkatan produktivitas di semua sektor yang mampu menyerap tenaga kerja.

Bingkai Iman dan Taqwa

- Bahwa seluruh aspek dalam kegiatan pembangunan masyarakat menuju sejahtera diatas berada didalam nilai – nilai keimanan dan ketaqwaan.

B. MISI

Sebagai jalan untuk mencapai visi diatas, maka dirumuskan misi pembangunan selama periode lima tahun kedepan, yaitu:

1. **Mewujudkan Kesederajatan Hukum**, yaitu bahwa seluruh komponen pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang terdiri dari pemerintah, rakyat dan swasta memperoleh perlakuan dan kedudukan yang sama dalam hukum. Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan:

- a. Hukum adalah pengendali sosial;
 - b. Tegak tidaknya hukum sangat bergantung kepada penegak hukum;
 - c. Hukum bukan alat bagi penguasa untuk berbuat sewenang-wenang;
 - d. Masyarakat diberi hak untuk mengawasi pemerintahan daerah;
 - e. Pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
2. **Mewujudkan Kesederajatan Ekonomi**, yaitu bahwa peningkatan ekonomi masyarakat bukan diorientasikan untuk golongan tertentu, tetapi juga merupakan hak dari seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat yang merata tersebut tentunya dengan mempertimbangkan:
- a. Bahwa masyarakat berhak atas penghidupan yang layak;
 - b. Bahwa masyarakat berhak memperoleh jaminan berusaha yang aman, sehat dan kompetitif;
 - c. Bahwa masyarakat berhak memperoleh fasilitas hak-hak ekonomi yang adil dan tidak diskriminatif;
 - d. Bahwa pemerintah menyediakan prasarana, sarana dan fasilitasi dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
3. **Mewujudkan Kesederajatan Sosial Budaya**, yaitu pemerataan dampak-dampak positif dari pembangunan terhadap masyarakat sebagai hasil akhir dari kesederajatan hukum dan kesederajatan ekonomi. Pemerataan sosial budaya tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:
- a. Bahwa setiap masyarakat berhak memperoleh jaminan perlindungan sosial yang tidak diskriminatif;
 - b. Bahwa masyarakat berhak memperoleh jaminan pendidikan yang layak, kompetitif serta tidak diskriminatif;
 - c. Bahwa masyarakat berhak memperoleh jaminan kesehatan yang baik;
 - d. Bahwa masyarakat berhak melestarikan dan mengembangkan budaya dengan tidak melanggar norma-norma yang ada.

Perumusan misi diatas didasari dengan kajian terhadap beberapa isu strategis, diantaranya:

Pertama, pilar hukum belum menyentuh persoalan yang substansial dan saling terkait terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini berakibat pada proses pembangunan yang tidak sistematis dan tidak terarah. Produk hukum masih terbawa arus "latah", duplikatif dan dalam beberapa kasus mengarah pada kepentingan-kepentingan yang berorientasi jangka pendek.

Kedua, masih adanya kesenjangan ekonomi yang disebabkan kurang memadainya perhatian pemerintah terhadap keberadaan sebagian besar potensi masyarakat yang mandiri dan kreatif. Selain itu keberlangsungan kegiatan ekonomi

informal, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

Ketiga, masih terjadinya ketimpangan sosial yang ditandai dengan belum meratanya kesempatan semua warga untuk mendapatkan hak-hak sosial atas kehidupan dan penghidupan yang layak seperti jaminan mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan ketersediaan lapangan kerja yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah.

C. TUJUAN

Tujuan yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan misi diatas adalah sebagai berikut:

Tujuan Misi 1

1. Membangun sistem pemerintahan yang terbuka, jujur, adil dan demokratis
2. Menegakan supremasi hukum
3. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib dan damai

Tujuan misi 2

4. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
5. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah

Tujuan misi 3

6. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bermoral
7. Meningkatkan kesejahteraan sosial

D. SASARAN

Berdasarkan hasil analisa terhadap isu strategis di atas, serta dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2007-2025, dalam upaya menuju tercapainya visi jangka panjang, maka dari ketiga misi di atas, dirumuskan sasaran pembangunan Tahun 2008-2012 sebagai berikut:

1. Sasaran pada misi kesederajatan hukum :

- a. Terbangunnya sistem pemerintahan yang disandarkan pada pencapaian kinerja, terbuka, jujur, adil, demokratis dan berpihak kepada rakyat;
- b. Terbangunnya sistem hukum yang komprehensif, integrated dan sistemik melalui program legislasi daerah;
- c. Terbangunnya sistem pengelolaan keuangan yang terbuka dan jujur yang diorientasikan untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat;
- d. Tegaknya hukum secara tidak diskriminatif ;
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi yang mengarah pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- f. Tersusunnya standardisasi pengukuran pencapaian kinerja pemerintah dan indeks kepuasan masyarakat;
- g. Terciptanya kondisi masyarakat yang toleran, seimbang, rukun dan islami

2. Sasaran pada misi kesederajatan ekonomi :

- a. Terjaminnya sarana penunjang infrastruktur yang baik dan layak untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat;
- b. Terwujudnya pengelolaan yang optimal dan profesional dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai aset potensi ekonomi rakyat;
- c. Terwujudnya optimalisasi kredit lunak untuk usaha kecil dan menengah guna menunjang keberlangsungan dan kemajuan ekonomi rakyat;
- d. Terwujudnya pemberian jaminan hukum yang layak dan proporsional terhadap para pengusaha sektor informal;
- e. Terwujudnya optimalisasi sentra industri kecil dan menengah sebagai aset wisata *home industri*;
- f. Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (*community-based resources management / CBRM*).

3. Sasaran pada misi kesederajatan sosial budaya :

- a. Terwujudnya pendidikan pesantren sebagai basis sentral kultur;
- b. Terjaminnya hak-hak masyarakat atas pendidikan yang layak;
- c. Terjaminnya derajat kesehatan masyarakat yang memadai;
- d. Terjaminnya hak-hak masyarakat secara umum tanpa membedakan gender untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan politik;
- e. Tercapainya minimalisasi angka pengangguran;
- f. Terwujudnya pemberian kredit lunak terhadap potensi tenaga kerja terdidik untuk melakukan usaha mandiri;
- g. Terjaminnya masyarakat atas tempat tinggal yang sehat dan layak;
- h. Terciptanya sistem sosial yang tertib, rukun, adil dan sejahtera.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

MATRIKS VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM RPJMD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 – 2012

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
Kesejahteraan Masyarakat dalam Bingkai Iman dan Taqwa	1 Mewujudkan Kesederajatan Hukum	1 Membangun sistem pemerintahan yang terbuka, jujur, adil dan demokratis	1 Terbangunnya sistem pemerintahan yang disandarkan pada pencapaian kinerja, terbuka, jujur, adil, demokratis dan berpihak kepada rakyat 2 Tersusunnya standardisasi pengukuran pencapaian kinerja pemerintah dan indeks kepuasan masyarakat	1 Peningkatan kapasitas sistem kelembagaan dan kualitas aparatur 2 Peningkatan kapasitas kelembagaan 3 Peningkatan kualitas aparatur	1 Peningkatan administrasi perkantoran yang tertib dan akuntabel 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 Peningkatan disiplin aparatur 4 Fasilitasi pindah/purna tugas PNS 5 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 Peningkatan fasilitas pendukung kinerja pemerintahan 7 Pengembangan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 8 Perbaikan sistem administrasi kearsipan 9 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 10 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	1 Pelayanan administrasi perkantoran 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 Peningkatan disiplin aparatur 4 Fasilitasi pindah/purna tugas PNS 5 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 Peningkatan fasilitas pendukung kinerja pemerintahan 7 Pengembangan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 8 Perbaikan sistem administrasi kearsipan 9 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 10 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Matrik berlanjut..

Lanjutan Matrik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
			<p>3 Terbangunnya sistem pengelolaan keuangan yang terbuka dan jujur yang diorientasikan untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat</p> <p>4 Terwujudnya reformasi birokrasi yang mengarah pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p>	<p>2 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah partisifatif dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel</p> <p>3 Peningkatan kualitas pelayanan publik</p>	<p>1 Peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang partisifatif</p> <p>2 Pengembangan wilayah</p> <p>3 Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel</p> <p>1 Pembentukan dan peningkatan kualitas lembaga layanan publik</p>	<p>1 Perencanaan pembangunan daerah</p> <p>2 Perencanaan pembangunan ekonomi</p> <p>3 Perencanaan sosial budaya</p> <p>4 Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</p> <p>5 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</p> <p>6 Pengembangan data/informasi/statistik daerah</p> <p>7 Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana</p> <p>8 Kerjasama pembangunan</p> <p>1 Pengembangan wilayah perbatasan</p> <p>2 Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</p> <p>3 Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</p> <p>4 Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah</p> <p>1 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan</p> <p>1 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah</p> <p>2 Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>3 Pembentukan lembaga-lembaga pelayanan publik</p> <p>4 Pengembangan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>5 Peningkatan pelayanan perijinan</p>

Matrik berlanjut..

Lanjutan Matrik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
				4 Peningkatan pengawasan aparatur dan keterbukaan informasi	1 Menjadikan lembaga pengawas yang profesional dan independen	1 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 3 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
					2 Pengembangan dan keterbukaan komunikasi/informasi	1 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2 Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 3 Pengembangan data/informasi 4 Kerjasama informasi dan media massa 5 Peningkatan kualitas pelayanan informasi 6 Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 7 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
		2 Menegakan supremasi hukum	5 Terbangunnya sistem hukum yang komprehensif, integrated dan sistemik melalui program legislasi daerah 6 Tegaknya hukum secara tidak diskriminatif	1 Penegakan dan kepastian hukum	1 Menyusun produk hukum daerah yang adaptif dan aspiratif 2 Perlakuan dan perlindungan hukum yang tidak diskriminatif	1 Penataan peraturan perundang-undangan 1 Perlakuan dan perlindungan hukum yang tidak diskriminatif

Matrik berlanjut..

Lanjutan Matrik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
			7 Terjaminnya hak-hak masyarakat secara umum tanpa membedakan gender untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan politik 3 Mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib dan damai		3 Perlindungan anak dan kesetaraan gender 4 Meningkatkan pemahaman dan perilaku taat hukum	1 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 3 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 4 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 1 Pengembangan wawasan kebangsaan 2 Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3 Pendidikan politik masyarakat 4 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
			8 Terciptanya kondisi masyarakat yang toleran, seimbang, rukun dan islami	1 Peningkatan keamanan dan ketertiban daerah	1 Meningkatkan kerukunan umat beragama 2 Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan	1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) 2 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 4 Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Matrik berlanjut..

Lanjutan Matrik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
	2 Mewujudkan Kesederajatan Ekonomi	1 Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1 Terwujudnya pemberian jaminan hukum yang layak dan proporsional terhadap para pengusaha sektor informal	1 Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi	1 Peningkatan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian	1 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2 Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 3 Peningkatan kemampuan teknologi industri 4 Penataan struktur industri 5 Peningkatan dan pengembangan ekspor
			2 Terwujudnya optimalisasi sentra industri kecil dan menengah sebagai aset wisata <i>home industri</i>			6 Peningkatan kerjasama perdagangan internasional 7 Pengembangan sentra-sentra industri potensial 8 Peningkatan fasilitas pelayanan pasar 9 Peningkatan promosi potensi industri daerah 10 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
					2 Penguatan koperasi dan lembaga keuangan/perbankan	1 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 2 Peningkatan koordinasi dengan lembaga keuangan /perbankan
					3 Peningkatan dan kepastian iklim investasi	1 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 2 Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 3 Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Matrik berlanjut..

Lanjutan Matrik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
			3 Terwujudnya pengelolaan yang optimal dan profesional dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai aset potensi ekonomi rakyat 4 Terwujudnya optimalisasi kredit lunak untuk usaha kecil dan menengah guna menunjang keberlangsungan dan kemajuan ekonomi rakyat 5 Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (<i>community-based resources management/CBRM</i>)	2 Pemerataan ekonomi	1 Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	1 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 2 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 3 Pembinaan pedagang kaki lima 4 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 5 Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 6 Peningkatan industri kecil dan menengah 7 Pengembangan industri kecil dan menengah

Matrik berlanjut..

Lanjutan Matrik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
					<p>3 Peningkatan pendapatan daerah</p> <p>2 Peningkatan pendapatan dana perimbangan</p>	<p>10 Peningkatan kerjasama dalam usaha kemitraan pertanian/kehutanan/perikanan</p> <p>11 Pemanfaatan potensi sumberdaya pertanian/kehutanan/perikanan</p> <p>12 Pembinaan dan penertiban hasil pertanian/kehutanan/perikanan</p> <p>13 Pengembangan sistem penyuluhan pertanian/kehutanan/perikanan</p> <p>14 Pengembangan budidaya pertanian/kehutanan/perikanan</p> <p>1 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD)</p> <p>2 Perintisan dan pendirian perusahaan daerah</p> <p>3 Pengendalian, monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah</p> <p>4 Sosialisasi dan pembinaan wajib pajak</p>
	2 Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah	6 Terjaminnya sarana penunjang infrastruktur yang baik dan layak untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat	1 Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 Peningkatan prasarana, sarana jalan dan jembatan	1 Pembangunan jalan dan jembatan	<p>2 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan</p> <p>3 Tanggap darurat jalan dan jembatan</p> <p>4 Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan</p>

Matrik berlanjut..

Lanjutan Matrik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
					<p>5 Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</p> <p>6 Peningkatan jalan dan jembatan</p> <p>7 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</p> <p>8 Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong</p> <p>9 Pembangunan / rehabilitasi/ pemeliharaan trotoar</p> <p>10 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</p> <p>11 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</p> <p>12 Peningkatan pelayanan angkutan</p> <p>13 Peningkatan dan pengamanan lalu lintas</p> <p>14 Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</p> <p>15 Peningkatan pelayanan lalu lintas</p> <p>16 Peningkatan optimalisasi perhubungan</p>	<p>2 Peningkatan prasarana, sarana publik, pemukiman dan tata ruang</p> <p>1 Perencanaan tata ruang dan tata bangunan (tata kota)</p> <p>2 Pemanfaatan ruang</p> <p>3 Pengendalian dan pemanfaatan ruang</p> <p>4 Pengelolaan areal pemakaman</p> <p>5 Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman</p> <p>6 Pembangunan infrastruktur pedesaan</p> <p>7 Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial</p> <p>8 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</p> <p>9 Lingkungan sehat perumahan</p>

Matrik berlanjut..

Lanjutan Matrik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
					<p>3 Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pertanian</p> <p>4 Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana lingkungan hidup</p>	<p>1 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya</p> <p>2 Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian/kehutanan/perikanan</p> <p>3 Penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana pemasaran hasil produksi pertanian/kehutanan/perikanan</p> <p>1 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</p> <p>2 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</p> <p>3 Perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> <p>4 Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam</p> <p>5 Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>6 Peningkatan pengendalian polusi</p> <p>7 Pengendalian kebakaran hutan</p> <p>8 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</p> <p>9 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</p> <p>10 Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan</p> <p>11 Pengendalian banjir</p> <p>12 Optimalisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>13 Rehabilitasi pasca bencana alam</p>

Matrik berlanjut..

Lanjutan Matrik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
						14 Rehabilitasi hutan dan lahan 15 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 16 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
3 Mewujudkan Kesederajatan Sosial dan Budaya	1 Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bermoral	1 Terjaminnya hak-hak masyarakat atas pendidikan yang layak 2 Terwujudnya pendidikan pesantren sebagai basis sentral kultur 3 Terjaminnya derajat kesehatan masyarakat yang memadai	1 Peningkatan kualitas pendidikan 2 Peningkatan kualitas tenaga pendidik 2 Peningkatan kualitas kesehatan	1 Peningkatan dan pemerataan pendidikan 1 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 1 Peningkatan kesehatan masyarakat 2 Perbaikan gizi masyarakat 3 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 4 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 5 Pengembangan lingkungan sehat 6 Pelayanan kesehatan penduduk miskin 7 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 8 Peningkatan pelayanan kesehatan anak 9 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 10 Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 11 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1 Pendidikan anak usia dini 2 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan 12 tahun 3 Pendidikan menengah 4 Pendidikan non formal 5 Manajemen pelayanan pendidikan 6 Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 1 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 1 Upaya kesehatan masyarakat 2 Perbaikan gizi masyarakat 3 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 4 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 5 Pengembangan lingkungan sehat 6 Pelayanan kesehatan penduduk miskin 7 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 8 Peningkatan pelayanan kesehatan anak 9 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 10 Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 11 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	

Matrik berlanjut..

Lanjutan Matrik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
					<p>12 Obat dan perbekalan kesehatan 13 Standarisasi Pelayanan Kesehatan</p> <p>2 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan</p>	<p>1 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan</p>
		<p>2 Meningkatkan kesejahteraan sosial</p> <p>4 Terciptanya sistem sosial yang tertib, rukun, adil dan sejahtera</p> <p>5 Terjaminnya masyarakat atas tempat tinggal yang sehat dan layak</p> <p>6 Tercapainya minimalisasi angka pengangguran</p> <p>7 Terwujudnya pemberian kredit lunak terhadap potensi tenaga kerja terdidik untuk melakukan usaha mandiri</p>	<p>1 Penanggulangan kemiskinan daerah</p>	<p>1 Penangulangan kemiskinan</p>	<p>1 Pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya 2 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 3 Pembinaan anak terlantar 4 Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 5 Pembinaan panti asuhan/ panti jompo 6 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 7 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 8 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 9 Pemberdayaan masyarakat perdesaan 10 Penanggulangan kemiskinan perkotaan</p>	
					<p>2 Peningkatan kesempatan kerja</p>	<p>1 Peningkatan kesempatan kerja 2 Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 3 Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</p>

Matrik berlanjut..

Lanjutan Matrik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
				2 Penataan data kependudukan dan keluarga berencana	1 Penataan data kependudukan dan transmigrasi 2 Peningkatan keluarga berencana dan sejahtera	1 Penataan administrasi kependudukan 2 Transmigrasi regional 1 Keluarga berencana 2 Peningkatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas 3 Ketahanan dan pemberdayaan keluarga 4 Kesehatan reproduksi 5 Pelayanan kontrasepsi
				3 Pengembangan kebudayaan, pariwisata dan olah raga	1 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 2 Pengembangan olah raga dan kepemudaan	
				1 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/ bersejarah 2 Pengembangan nilai budaya 3 Pengelolaan kekayaan budaya 4 Pengelolaan keragaman budaya 5 Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 6 Pengembangan destinasi pariwisata 7 Pengembangan kemitraan pariwisata 8 Pengembangan pemasaran pariwisata 1 Pembinaan dan pemasarakatan olahraga 2 Peningkatan peran serta kepemudaan 3 Peningkatan prestasi olahraga dan generasi muda 4 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga		

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang tertuang dalam Bab III. Ketiga misi pembangunan Kota Tasikmalaya dijabarkan masing-masing kedalam tujuan dan strategi pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut:

Misi 1 “Mewujudkan Kesederajatan Hukum”

Tujuan 1 “Membangun sistem pemerintahan yang terbuka, jujur, adil dan demokratis”

Strategi:

1. Peningkatan kapasitas sistem kelembagaan dan kualitas aparatur
2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah partisifatif dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Peningkatan pengawasan aparatur dan keterbukaan informasi

Tujuan 2 “Menegakkan supremasi hukum”

Strategi:

1. Penegakan dan kepastian hukum

Tujuan 3 “Mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib dan damai”

Strategi:

1. Peningkatan keamanan dan ketertiban daerah

Misi 2 “Mewujudkan Kesederajatan Ekonomi”

Tujuan 1 “Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi”

Strategi:

1. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi
2. Pemerataan ekonomi
3. Peningkatan pendapatan daerah

Tujuan 2 “Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah”

Strategi:

1. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah

Misi 3 “Mewujudkan Kesederajatan Sosial dan Budaya”

Tujuan 1 “Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bermoral”

Strategi:

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Peningkatan kualitas kesehatan

Tujuan 2 “Meningkatkan kesejahteraan sosial”

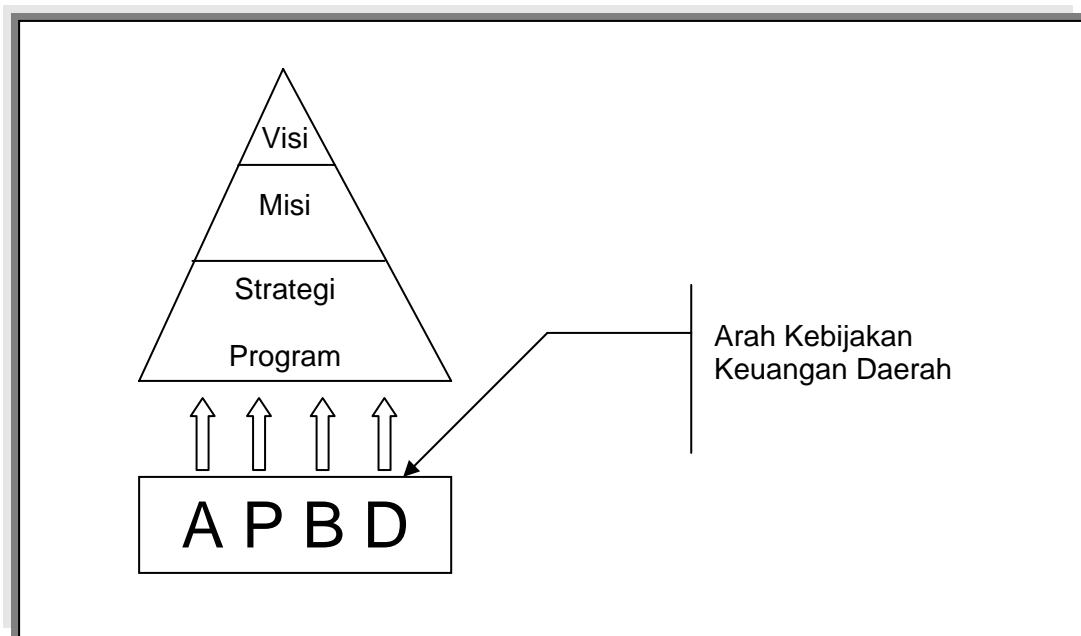
Strategi:

1. Penanggulangan kemiskinan daerah
2. Penataan data kependudukan dan keluarga berencana
3. Pengembangan kebudayaan, pariwisata dan olah raga

B. ARAH KEBIJAKAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun. Hubungan antara dokumen perencanaan strategik dengan anggaran dapat dilihat pada gambar 5.1 sebagai berikut:

Gambar 5.1.
Kerangka Hubungan antara Strategi, APBD, dan Kebijakan Keuangan Daerah

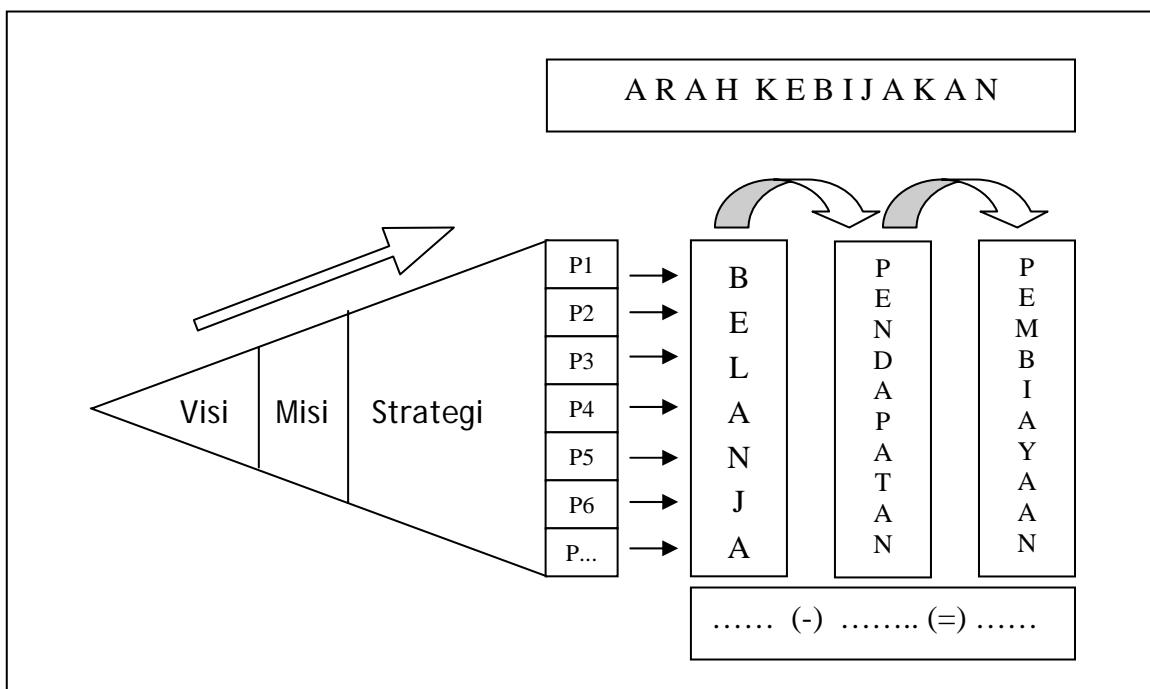


Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Kota Tasikmalaya mengandung makna bahwa: (a) Arah belanja APBD Kota Tasikmalaya digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, 5 tahunan. (b) Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan

diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang kontinyu dan jumlah yang memadai.

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda, maka kebijakan Keuangan Daerah juga dirinci pada masing-masing komponen yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kebijakan umum. Adapun hubungan antara strategi dengan (arah kebijakan) komponen APBD dapat dilihat pada Gambar 5.2. berikut:

Gambar 5.2.
Kerangka Hubungan antara Strategi dan Komponen



Gambar 5.2 menunjukkan hubungan antara proses perencanaan, kegiatan dengan keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan strategik adalah program. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan, dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kota Tasikmalaya, pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategi dan tidak memiliki nilai tambah (*non value-added*) harus diminimalisir. Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimanya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut diatas

(pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Era Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan daerah, untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan esensi otonomi, secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian daerah otonom adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan – kewenangan yang bersifat pokok. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni melampaui kisaran 60%. Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula dengan sumber – sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain – lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber – sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan–kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2008–2012 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali timbul permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan dan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan:

1) Perbaikan Manajemen

Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur.

1) Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan:

- a) Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
- b) Menyederhanakan prosedur perijinan;
- c) Mempertegas peraturan/kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kota, maupun antar sektor;
- d) Meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha;
- e) Menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- f) Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
- g) Meniadakan tumpang tindih pemungutan;
- h) Menyederhanakan prosedurnya.

2) Optimalisasi Aset Daerah

Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi aset dan peningkatan *turn over*. Optimalisasi aset juga dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan swasta. Selain itu juga diperlukan perbaikan manajemen BUMD dan rencana pembentukan badan usaha baru.

b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik –baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program–program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun kedepan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses

perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2008–2012 ditambah satu tahun transisi adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan–kegiatan di bidang infrastruktur, daya beli, kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Kota Tasikmalaya.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta bila memungkinkan.

e. Transparan dan akuntabel

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui publikasi masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.

Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasilnya.

3. Arah Pembiayaan Daerah

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat digali dari pinjaman daerah, tetapi jumlah defisit diupayakan tidak melampaui 3,5% dari Pendapatan Daerah. Selain itu, besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman atau *Debt Services Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 2,5 coverage

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan analisa terhadap kondisi umum daerah, kondisi yang diharapkan, visi dan misi pembangunan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini dirumuskan kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya. Untuk menjaga sinergi dan kesinambungan pembangunan dalam setiap periode lima tahunan, maka kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya harus diletakkan dalam perspektif pembangunan jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya. Disamping hal tersebut, kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya juga harus memperhatikan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

Perspektif pembangunan jangka menengah yang telah mengacu pada arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional dirumuskan dalam kebijakan umum.

A. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kondisi umum pembangunan yang hendak dicapai oleh Kota Tasikmalaya bertujuan akhir pada terwujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat dasar dalam usaha perwujudan visi Kota Tasikmalaya. Hal ini akan tercipta apabila seluruh aparat pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya mampu menjalankan tupoksinya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan yang baik, dengan memperhatikan aspirasi seluruh stakeholder, dan bisa mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kegiatan pemerintahannya kepada masyarakat luas.

Pelaksanaan tupoksi yang baik akan tercipta apabila terjadi peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Kondisi ini dapat tercapai melalui:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
 - b. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah, serta
 - c. Penguatan lembaga legislatif
2. Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana publik yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ada 3 fungsi penting pemerintah dalam penyediaan barang publik, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dalam rangka pelaksanaan fungsi alokasi dan distribusi pemerintah berkewajiban untuk menyediakan prasarana dan sarana publik yang mencukupi bagi kebutuhan masyarakatnya. Ketersediaan prasarana dan sarana yang mencukupi ini harus juga memperhatikan aspek keadilan dan keterjangkauan masyarakat dalam menikmati prasarana dan sarana tersebut.

Berbagai prasarana dan sarana yang dibutuhkan masyarakat Kota Tasikmalaya untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan adalah:

- a. Pemenuhan kebutuhan akan prasarana transportasi yang menjangkau seluruh wilayah
 - b. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya secara layak
 - c. Tersedianya prasarana sistem persampahan dan sistem perpipaan air bersih untuk lebih dari 80% masyarakat Kota Tasikmalaya
 - d. Terciptanya sistem pelayanan jasa publik yang transparan, handal dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
3. Mewujudkan masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis, beradab dan berbudaya menuju masyarakat yang madani.

Terwujudnya masyarakat yang agamis, berakhlik, beradab, berbudaya dan memiliki nilai-nilai keagamaan yang universal sangat penting eksistensinya karena akan menciptakan keharmonisan dan suasana hidup yang dinamis. Kehidupan beragama sangat penting karena dapat dijadikan pegangan dalam menentukan arah pembangunan daerah yang diinginkan oleh seluruh masyarakat. Karakter masyarakat di Kota Tasikmalaya akan muncul dan dapat berakar erat seiring dengan kemajuan-kemajuan pembangunan daerah secara fisik.

Oleh karena itu semua elemen masyarakat harus mampu mengakses sarana aktivitas dan wadah partisipasi yang seiring dengan ketersediaan infrastruktur yang ada. Keharmonisan antara golongan masyarakat harus terus digalakan dengan terus bekerjasamanya antara masyarakat dan pemerintah dalam berbagai kegiatan agama, sosial dan budaya.

4. Meningkatkan peran sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian Kota Tasikmalaya.

Pembangunan perekonomian suatu wilayah tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektornya. Perwujudan visi pembangunan Kota Tasikmalaya didukung oleh karakteristik masyarakat yang dikenal sebagai wirausahawan yang tangguh. Kondisi tersebut akan dapat terwujud jika ada dorongan dan fasilitas yang memadai dari pemerintah daerah. Berdasarkan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki korelasi yang positif

terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh sebabnya maka alokasi kegiatan belanja pemerintah harus ditekankan pada upaya-upaya pengembangan jiwa entrepreneurship dari para pelaku ekonomi di Kota Tasikmalaya.

5. Meningkatkan sumber daya manusia yang didasarkan kepada pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi. Indeks ini ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai, peningkatan wajib belajar di atas sembilan tahun dan kemampuan ekonomi yang diatas tingkat subsistennya. Hal ini selaras dengan tujuan dari *Millenium Development Goals* yang berisi 8 tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan, yaitu:
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
 - b. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
 - c. Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan
 - d. Menurunkan angka kematian anak
 - e. Meningkatkan kesehatan ibu
 - f. Memerangi penyakit menular (seperti HIV/AIDS, TBC, Flu Burung)
 - g. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
 - h. Membangun kemitraan global untuk pembangunan
6. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam.

Menjaga kelestarian lingkungan, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, air dan hutan, sehingga terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan daya tahan lingkungan pada akhirnya mampu mengantisipasi dampak yang timbul dari ketidakseimbangan ekosistem yang mungkin terjadi di masa mendatang.

7. Menciptakan keserasian dan keterkaitan sektor pariwisata yang berkembang di wilayah Priangan Timur, sehingga dapat menjadi pendorong dan peningkatan *tourism attractiveness* yang khas serta mampu menumbuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan maju.

Merevitalisasi sarana dan prasarana pariwisata sebagai langkah awal untuk membangkitkan dan meningkatkan aktivitas pariwisata di Kota Tasikmalaya. Regulasi dan program-program haruslah memberikan iklim yang kondusif sehingga memberikan kenyamanan untuk datangnya investasi dan juga pelaku-pelaku bisnis di sektor pariwisata. Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama juga memiliki rasa dan partisipasi aktif dalam meningkatkan sektor pariwisata ini. Karena bila hal ini tidak ada, sulit bagi kota Tasikmalaya dapat dikatakan sebagai pusat pariwisata bila masyarakatnya tidak ramah, dan berperan aktif mendukung tumbuh kembangnya sektor ini.

Pusat-pusat budaya dan kesenian masyarakat juga harus mendukung dan memberikan nuansa lain sehingga *tourism attractiveness* mampu berciri khas dan mendukung dari pengembangan sektor pariwisata secara keseluruhan.

B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA TASIKMALAYA

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun lintas SKPD yang akan dicapai, ditempuh dengan beberapa kebijakan pembangunan yang diturunkan dari strategi pembangunan daerah Kota Tasikmalaya.

Strategi 1: Peningkatan Kapasitas Sistem Kelembagaan dan Kualitas Aparatur

Kebijakan:

1. Peningkatan Administrasi Perkantoran yang Tertib dan Akuntabel
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
3. Peningkatan Kualitas Aparatur

1. Peningkatan Administrasi Perkantoran yang Tertib dan Akuntabel

Selama lima tahun kedepan, langkah kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan administrasi perkantoran yang tertib dan akuntabel di Kota Tasikmalaya dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program peningkatan disiplin aparatur
- d. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- f. Program peningkatan fasilitas pendukung kinerja pemerintahan
- g. Program pengembangan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
- h. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- i. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- j. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Langkah kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan di Kota Tasikmalaya dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
- b. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

3. Peningkatan Kualitas Aparatur

Program-program pembangunan dalam kebijakan peningkatan kualitas aparatur di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- a. Program pendidikan kedinasan
- b. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
- c. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Strategi 2: Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

Kebijakan:

- 1. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif
- 2. Pengembangan Wilayah
- 3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

4. **Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif**

Langkah kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif di Kota Tasikmalaya dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program perencanaan pembangunan daerah
- b. Program perencanaan pembangunan ekonomi
- c. Program perencanaan sosial budaya
- d. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- e. Program perencanaan pembangunan bidang pertanian
- f. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- g. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- h. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
- i. Program kerjasama pembangunan

5. **Pengembangan Wilayah**

Selama lima tahun kedepan, langkah kebijakan yang berkenaan dengan pengembangan wilayah di Kota Tasikmalaya dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program pengembangan wilayah perbatasan
- b. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- c. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- d. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

6. **Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel**

Langkah kebijakan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel di Kota Tasikmalaya dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- b. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

Strategi 3: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kebijakan:

- 1. Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Layanan Publik

7. Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Layanan Publik

Langkah kebijakan pembentukan dan peningkatan kualitas lembaga layanan publik dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
- b. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- c. Program pembentukan lembaga-lembaga pelayanan publik
- d. Program pengembangan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- e. Program peningkatan pelayanan perijinan

Strategi 4: Meningkatkan Pengawasan Aparatur dan Keterbukaan Informasi

Kebijakan:

- 1. Menjadikan Lembaga Pengawas yang Profesional dan Independen
- 2. Pengembangan dan Keterbukaan Komunikasi/ Informasi

8. Menjadikan Lembaga Pengawas yang Profesional dan Independen

Langkah kebijakan menjadikan lembaga pengawas yang profesional dan independen dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- b. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- c. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

9. Pengembangan dan Keterbukaan Komunikasi/ Informasi

Langkah kebijakan pengembangan dan keterbukaan komunikasi/ informasi dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
- c. Pengembangan data/informasi

- d. Program kerjasama informasi dan media massa
- e. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
- f. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- g. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Strategi 5: Penegakan dan Kepastian Hukum

Kebijakan:

- 1. Menyusun Produk Hukum Daerah yang Adaptif dan Aspiratif
- 2. Perlakuan dan Perlindungan Hukum yang Tidak Diskriminatif
- 3. Perlindungan Anak dan Kesetaraan Gender
- 4. Meningkatkan Pemahaman dan Perilaku Taat Hukum

10. Menyusun Produk Hukum Daerah yang Adaptif dan Aspiratif

Langkah kebijakan menyusun produk hukum daerah yang adaptif dan aspiratif dituangkan dalam program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

11. Perlakuan dan Perlindungan Hukum yang Tidak Diskriminatif

Langkah kebijakan perlakuan dan perlindungan hukum yang tidak diskriminatif dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program perlakuan dan perlindungan hukum yang tidak diskriminatif

12. Perlindungan Anak dan Kesetaraan Gender

Langkah kebijakan perlindungan anak dan kesetaraan gender dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- b. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
- c. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
- d. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

13. Meningkatkan Pemahaman dan Perilaku Taat Hukum

Langkah kebijakan meningkatkan pemahaman dan perilaku taat hukum dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- b. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- c. Program pendidikan politik masyarakat
- d. Program sosialisasi peraturan perundang-undangan

Strategi 6: Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Daerah**Kebijakan:**

1. Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama
2. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

14. Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama

Langkah kebijakan meningkatkan kerukunan umat beragama dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

15. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Langkah kebijakan meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- b. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- c. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- d. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Strategi 7: Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi**Kebijakan:**

1. Peningkatan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian
2. Penguatan Koperasi dan Lembaga Keuangan/ Perbankan
3. Peningkatan dan Kepastian Iklim Investasi

16. Peningkatan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Langkah kebijakan Peningkatan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- b. Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi
- c. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
- d. Program penataan struktur industri
- e. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
- f. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional
- g. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
- h. Program peningkatan fasilitas pelayanan pasar
- i. Program peningkatan promosi potensi industri daerah
- j. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

17. Penguatan Koperasi dan Lembaga Keuangan/Perbankan

Langkah kebijakan penguatan koperasi dan lembaga keuangan/perbankan dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- b. Program peningkatan koordinasi dengan lembaga keuangan/ perbankan

18. Peningkatan dan Kepastian Iklim Investasi

Langkah kebijakan peningkatan dan kepastian iklim investasi dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- c. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Strategi 8: Pemerataan Ekonomi

Kebijakan:

1. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Daerah

19. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Langkah kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- b. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
- c. Program pembinaan pedagang kaki lima
- d. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- e. Program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
- f. Program peningkatan industri kecil dan menengah
- g. Program pengembangan industri kecil dan menengah

20. Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Daerah

Langkah kebijakan peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program peningkatan ketahanan pangan
- b. Program peningkatan kesejahteraan petani
- c. Program peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian/kehutanan/perikanan
- d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/kehutanan/perikanan

- e. Program peningkatan produksi pertanian/kehutanan/perikanan
- f. Pengembangan agribisnis pertanian/kehutanan/perikanan
- g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak/ikan/tanaman pangan
- h. Program peningkatan SDM pertanian/kehutanan/perikanan
- i. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/kehutanan/perikanan
- j. Program peningkatan kerjasama dalam usaha kemitraan pertanian/kehutanan/perikanan
- k. Program pemanfaatan potensi sumberdaya pertanian/kehutanan/perikanan
- l. Program pembinaan dan penertiban hasil pertanian/kehutanan/perikanan
- m. Program pengembangan sistem penyuluhan pertanian/kehutanan/perikanan
- n. Program pengembangan budidaya pertanian/kehutanan/perikanan

Strategi 9: Peningkatan Pendapatan Daerah

Kebijakan:

- 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2. Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan

21. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Langkah kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD)
- b. Program perintisan dan pendirian perusahaan daerah
- c. Program pengendalian, monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah
- d. Program sosialisasi dan pembinaan wajib pajak

22. Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan

Langkah kebijakan Peningkatan pendapatan dana perimbangan dituangkan dalam program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dana perimbangan
- b. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak provinsi

Strategi 10: Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah

Kebijakan:

1. Peningkatan Prasarana, Sarana Jalan dan Jembatan
2. Peningkatan Prasarana, Sarana Publik, Permukiman dan Tata Ruang
3. Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian
4. Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup

23. Peningkatan Prasarana, Sarana Jalan dan Jembatan

Langkah kebijakan peningkatan prasarana, sarana jalan dan jembatan dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program pembangunan jalan dan jembatan
- b. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
- c. Program tanggap darurat jalan dan jembatan
- d. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- e. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- f. Program peningkatan jalan dan jembatan
- g. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- h. Program rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong
- i. Program pembangunan / rehabilitasi/ pemeliharaan trotoar
- j. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- k. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- l. Program peningkatan pelayanan angkutan
- m. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
- n. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
- o. Program peningkatan pelayanan lalu lintas
- p. Program peningkatan optimalisasi perhubungan

24. Peningkatan Prasarana, Sarana Publik, Permukiman dan Tata Ruang

Langkah kebijakan peningkatan prasarana, sarana publik, pemukiman dan tata ruang dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program perencanaan tata ruang dan tata bangunan (tata kota)
- b. Program pemanfaatan ruang
- c. Program pengendalian dan pemanfaatan ruang
- d. Program pengelolaan areal pemakaman
- e. Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman

- f. Program pembangunan infrastruktur pedesaan
- g. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
- h. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
- i. Lingkungan sehat perumahan

25. Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian

Langkah kebijakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pertanian dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya
- b. Program penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian/kehutanan/perikanan
- c. Program penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana pemasaran hasil produksi pertanian/kehutanan/perikanan

26. Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup

Langkah kebijakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana lingkungan hidup dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- b. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- d. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
- e. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- f. Program peningkatan pengendalian polusi
- g. Program pengendalian kebakaran hutan
- h. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- i. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- j. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
- k. Program pengendalian banjir
- l. Program optimalisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- m. Program rehabilitasi pasca bencana alam
- n. Program rehabilitasi hutan dan lahan
- o. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- p. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Strategi 11: Peningkatan Kualitas Pendidikan**Kebijakan:**

1. Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan
2. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik

27. Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan

Langkah kebijakan peningkatan dan pemerataan pendidikan dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program pendidikan anak usia dini
- b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan 12 tahun
- c. Program pendidikan menengah
- d. Program pendidikan non formal
- e. Program manajemen pelayanan pendidikan
- f. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

28. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik

Langkah kebijakan peningkatan kualitas tenaga pendidik dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Strategi 12: Peningkatan Kualitas Kesehatan**Kebijakan:**

1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat yang Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

29. Peningkatan Kesehatan Masyarakat yang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

Langkah kebijakan peningkatan kesehatan masyarakat yang preventif dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program upaya kesehatan masyarakat
- b. Program perbaikan gizi masyarakat
- c. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- d. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- e. Program pengembangan lingkungan sehat
- f. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- g. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- h. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

- i. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- j. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- k. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- l. Program obat dan perbekalan kesehatan
- m. Standarisasi pelayanan kesehatan

30. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Langkah kebijakan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan
- b. Program pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Strategi 13: Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kebijakan:

- 1. Penanggulangan Kemiskinan
- 2. Peningkatan Kesempatan Kerja

31. Penanggulangan Kemiskinan

Langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
- b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- c. Program pembinaan anak terlantar
- d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- e. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
- f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya
- g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- h. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- i. Program pemberdayaan masyarakat perdesaan
- j. Program Penanggulangan kemiskinan perkotaan

32. Peningkatan Kesempatan Kerja

Langkah kebijakan peningkatan kesempatan kerja dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- b. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- c. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Strategi 14: Penataan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kebijakan:

- 1. Penataan Data Kependudukan dan Transmigrasi
- 2. Peningkatan Keluarga Berencana dan Sejahtera

33. Penataan Data Kependudukan dan Transmigrasi

Langkah kebijakan penataan data kependudukan dan transmigrasi dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program penataan administrasi kependudukan
- b. Program transmigrasi regional

34. Peningkatan Keluarga Berencana dan Sejahtera

Langkah kebijakan peningkatan keluarga berencana dan sejahtera dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program keluarga berencana
- b. Program peningkatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas
- c. Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
- d. Program kesehatan reproduksi
- e. Program pelayanan kontrasepsi

Strategi 15: Pengembangan Kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga

Kebijakan:

- 1. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
- 2. Pengembangan Olah Raga dan Kepemudaan

35. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Langkah kebijakan pengembangan kebudayaan dan pariwisata dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/ bersejarah
- b. Program pengembangan nilai budaya
- c. Program pengelolaan kekayaan budaya
- d. Program pengelolaan keragaman budaya
- e. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
- f. Program pengembangan destinasi pariwisata
- g. Program pengembangan kemitraan pariwisata

h. Program pengembangan pemasaran pariwisata

36. Pengembangan Olah Raga dan Kepemudaaan

Langkah kebijakan pengembangan olah raga dan kepemudaan dituangkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- b. Program peningkatan peran serta kepemudaan
- c. Program peningkatan prestasi olahraga dan generasi muda
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan penjelasan pada bab–bab sebelumnya tentang kelemahan dan kekuatan potensi ekonomi dan pembangunan Kota Tasikmalaya, maka kebijakan pembangunan dapat disusun. Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan pembagian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Lintas SKPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dan lintas dinas. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spatial.

Pendekatan sektoral akan `diterapkan oleh dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spatial diterapkan untuk kebijakan/program lintas dinas.

1. Program SKPD

Program SKPD ini merupakan program sektoral yang menjadi tanggung jawab langsung dinas teknis, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Dengan program–program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas.

Implementasi program SKPD ini lebih mudah, khususnya didalam pengorganisasianya. Hal ini mengingat program SKPD ini hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

2. Program Lintas SKPD

Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (*job description*) yang jelas dan tegas. Mengingat program – program lintas SKPD ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan.

3. Program Kewilayahan

Program kewilayahan ini dilakukan pada program – program yang bukan hanya berbasis satuan kerja yang ada, tetapi bisa lintas satuan kerja dan wilayah. Penanganan air bersih, sampah, transportasi, penanggulangan banjir merupakan isu yang harus ditangani secara wilayah. Jika hal itu hanya ditangani dengan pendekatan sektoral maka, problematika yang ada tidak bisa diselesaikan secara efektif dan efisien.

Program kewilayahan menggambarkan bagaimana daerah harus terus melakukan kerjasama dengan daerah lain (inter-regional network). Dengan memiliki jaringan dengan daerah lain yang baik, maka diharapkan pelayanan publik (sampah, air bersih, jalan, energi, dsb) semakin baik.

Pada tabel 7.1. digambarkan tentang ringkasan kebijakan berupa program yang ada pada dokumen RPJMD ini. Beberapa program merupakan kewenangan suatu SKPD, sedangkan yang lain merupakan kewenangan lintas SKPD. Untuk aspek perwilayahan, program – program lintas sektoral (lintas SKPD) akan lebih bermanfaat dari pada program-program SKPD. Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini.

Tabel 7.1.
Program Berdasarkan Kewenangan

No	Nama Program	Kewenangan
1.	Program perencanaan tata ruang	Lintas SKPD
2.	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Lintas SKPD
3.	Program pengembangan wilayah perbatasan	Lintas SKPD
4.	Program pemanfaatan ruang	Lintas SKPD
5.	Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	Lintas SKPD
6.	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Lintas SKPD
7.	Program pembentukan lembaga-lembaga pelayanan publik	Lintas SKPD
8.	Program kerjasama pembangunan	Lintas SKPD
9.	Program kesehatan reproduksi remaja	
10.	Program pelayanan kontrasepsi	
11.	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan	Lintas SKPD
12.	Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Lintas SKPD
13.	Program perintisan dan pendirian perusahaan daerah	Lintas SKPD
14.	Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dana perimbangan	Lintas SKPD
15.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Lintas SKPD

16.	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Lintas SKPD
17.	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	Lintas SKPD
18.	Program pembinaan pedagang kaki lima	Lintas SKPD
19.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Lintas SKPD
20.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Lintas SKPD
21.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Lintas SKPD
22.	Program perlakuan dan perlindungan hukum yang tidak diskriminatif	Lintas SKPD
23.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	Lintas SKPD
24.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Lintas SKPD
25.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Lintas SKPD
26.	Program pengendalian banjir	Lintas SKPD
27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Lintas SKPD
28.	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Lintas SKPD
29.	Program peningkatan disiplin aparatur	Lintas SKPD
30.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Lintas SKPD
31.	Program peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah	Lintas SKPD

BAB VIII

PROGRAM PRIORITAS DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penentuan program prioritas dimaksudkan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan visi dan misi Kota Tasikmalaya pada tahun 2012, yaitu dengan menentukan tema pembangunan tahunan yang merujuk pada prioritas pembangunan yang disertai dengan perkiraan pembiayaan daerah. Berdasarkan rumusan program prioritas dan pembiayaan daerah kemudian di susun rencana kerja sebagai langkah untuk mewujudkan program prioritas tersebut.

A. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan daerah lima tahun di atas untuk selanjutnya dirumuskan kedalam Program Prioritas Pembangunan Daerah yang di reflesikan dalam Prioritas Pembangunan Tahunan guna mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas kinerja pembangunan. Perumusan pembangunan tahunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas berdasarkan kemendesakan kebutuhan dalam limitasi kemampuan keuangan daerah. Dengan pentahapan ini diharapkan output pembangunan secara *timely* dapat dinikmati oleh kelompok sasaran pembangunan khususnya, serta seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya pada umumnya.

Program prioritas pembangunan daerah tahunan untuk selanjutnya disebut “Tema Pembangunan Kota Tasikmalaya” adalah prioritas utama pembangunan pada tahun yang bersangkutan.

1. Tema Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2008:

“Kota Tasikmalaya dengan Infrastruktur yang Berkualitas Kota”

Pada tahun 2008 pembangunan di Kota Tasikmalaya dititikberatkan pada pembangunan jaringan jalan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Jaringan jalan yang berkualitas kota menggambarkan kondisi jalan yang memenuhi standar konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan fungsinya.

2. Tema Pembangunan Kota Tasikmalaya tahun 2009:

“Kota Tasikmalaya dengan Infrastruktur yang Berkualitas Kota”

Tema pada tahun 2009 ini masih melanjutkan tema pembangunan tahun 2008.

3. Tema Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2010:

“Masyarakat Kota Tasikmalaya yang Berdaya Beli Tinggi”

Pada tahun 2010 pembangunan Kota Tasikmalaya dititikberatkan pada sektor – sektor yang secara langsung diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat (*purchasing power parity*).

4. Tema Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2011:

“Masyarakat Kota Tasikmalaya yang Sehat”

Sektor kesehatan merupakan prioritas utama dalam pembangunan Kota Tasikmalaya pada tahun 2011 yang bertujuan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5. Tema Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2012

“ Masyarakat Kota Tasikmalaya yang Berdaya Saing Tinggi”

Pembangunan sektor pendidikan dalam rangka menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi menjadi prioritas utama pembangunan Kota Tasikmalaya pada tahun 2012.

B. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah yang dimaksud disini meliputi perkiraan perhitungan pendapatan 5 tahun kedepan dan perhitungan perkiraan belanja daerah hingga 5 tahun kedepan yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan APBD 5 tahun kedepan.

1. Pendapatan Daerah

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan provinsi. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

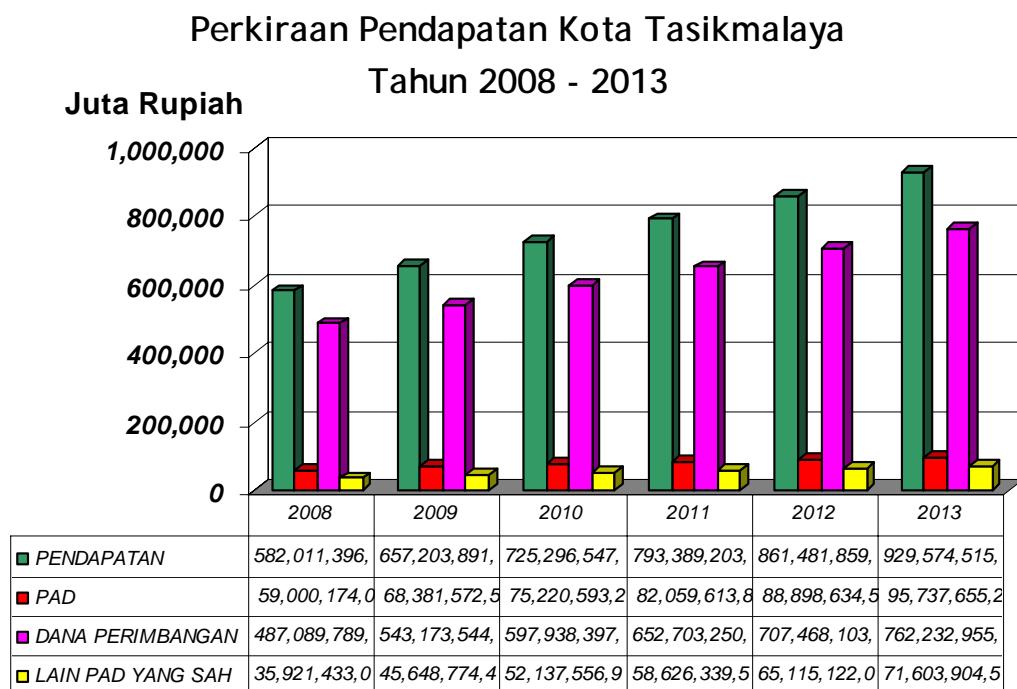
Pendapatan daerah diperkirakan tahun 2008–2012 mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 8,9%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan pada komponen PAD dan komponen dana perimbangan yang masing – masing diperkirakan memiliki ratio pertumbuhan rata-rata sekitar 9,1% dan 8,5%.

Pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh.

Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain. Pendapatan bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan aktivitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam

memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah. Adapun perkiraan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2008 – 2013 dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 5.3.



2. Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Secara sfesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos-pos belanja. Belanja daerah dikelompokan kedalam belanja langsung dan tidak langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung, jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu, untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

a. Belanja Tidak Langsung

Untuk tahun 2007, pemerintah menaikkan gaji PNS sebesar 15%. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap APBD Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2008. kemungkinan dalam lima tahun kedepan pemerintah akan menaikkan kembali gaji PNS, sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap. Kenaikan gaji PNS tersebut dibiayai oleh sumber pendapatan DAU. Dengan demikian kenaikan gaji pegawai diharapkan

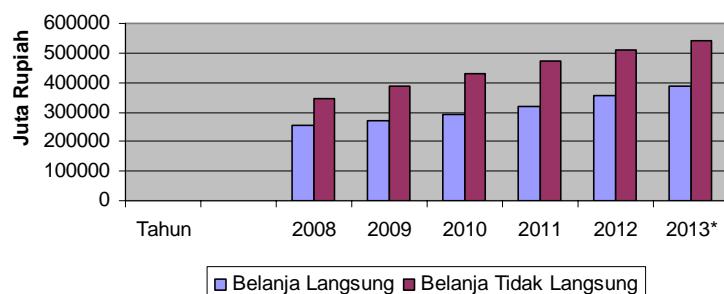
dapat diikuti oleh kenaikan DAU. Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja bantuan sosial merupakan manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat *block grant*, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku. Selain itu, komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan juga berimplikasi pada meningkatnya belanja subsidi pendidikan dan kesehatan yang juga akan berpengaruh pada peningkatan belanja tidak langsung dalam lima tahun kedepan.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana Strategis SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung, belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja kursus. Sementara itu belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun kedepan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kota Tasikmalaya, antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, eksplorasi potensi pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing – masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan Kota Tasikmalaya.

Kebijakan belanja daerah hingga tahun 2012 diperkirakan akan didominasi oleh belanja tidak langsung sekitar 58,37%. Sedangkan untuk belanja langsung diperkirakan sekitar 41,63% atau sisanya. Proyeksi belanja hingga tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Gambar 5.4.
Perkiraan Belanja Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2008 - 2013



Tabel 5.1
Perkiraan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2008 – 2013

Tahun	Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		Jumlah
	%	Rp.	%	Rp.	
2008	42.47	254,829,300,000.00	57.53	345,211,096,000.00	600,040,396,000.00
2009	41.03	269,653,437,948.86	58.97	387,550,453,361.79	657,203,891,310.65
2010	40.44	293,315,088,420.50	59.56	431,981,459,012.96	725,296,547,433.46
2011	40.44	320,852,243,425.74	59.56	472,536,960,130.52	793,389,203,556.26
2012	41.04	353,520,323,043.47	58.96	507,961,536,635.58	861,481,859,679.05
2013*	41.63	386,944,147,887.30	58.37	542,630,367,914.53	929,574,515,801.84

Sumber : Hasil Analisis, tahun 2007

Ket.* satu tahun transisi

3. Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dari belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar daripada belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Berdasarkan proyeksi APBD tahun 2008 – 2013.

Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hadiah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Pemerintah daerah berhak melakukan pinjaman daerah.

Kemampuan pinjaman daerah dapat diperoleh dengan melakukan perhitungan nilai DSCR dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan daerah terhadap seluruh besaran kewajiban pinjaman dan biaya lainnya setiap tahun anggaran. Berdasarkan data realisasi APBD Kota Tasikmalaya tahun 2007 angka

DSCR Kota Tasikmalaya berada diatas nilai 2,5 sehingga Pemerintah Kota Tasikmalaya layak untuk mendapatkan tambahan pinjaman daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas pinjaman daerah, pinjaman harus direncanakan secara hati – hati. Selain disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

Untuk lebih jelasnya perkiraan APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2008 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 5.2

Tabel 5.2
Perkiraan APBD Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2008 – 2013
(dalam Juta Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN	Target		Proyeksi			
			2007	2008	2009	2010	2011	2013
1	PENDAPATAN DAERAH	548,874	582,011	657,204	725,297	793,389	861,482	929,575
1.1	Pendapatan asli daerah	56,084	59,000	68,381.57	75,221	82,060	88,899	95,738
1.2	Dana perimbangan	433,596	487,090	543,174	597,938	652,703	707,468	762,233
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	59,193	35,921	45,649	52,138	58,626	65,115	71,604
2	BELANJA DAERAH	595,388	600,040	675,943	745,734	809,579	885,388	953,887
2.1	Belanja Tidak Langsung	313,478	345,211	387,550.45	431,935	472,487	507,907	542,573
2.2	Belanja Langsung	281,909	254,829	288,392.71	313,798	337,092	377,480	411,314
3	Defisit	(46,514)	(18,029)	(18,739)	(20,437)	(16,189)	(23,906)	(24,312)

C. RENCANA KERJA

Rencana kerja merupakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota terkait dengan program-program yang dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah. Didalam implementasinya, rencana kerja yang dilakukan ini meliputi rencana kerja kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

1. Rencana Kerja Kerangka Regulasi

Rencana kerja kerangka regulasi adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengkondisikan suatu program dengan membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program. Hal ini terkait dengan fungsi pemerintah yakni stabilisasi, distribusi dan alokasi. Dengan membuat kerangka regulasi ini peran pemerintah akan semakin efisien, dimana suatu program tidak harus dibebankan secara menyeluruh pembiayaan dan eksekusinya kepada pemerintah.

2. Rencana Kerja Kerangka Pendanaan

Hal yang dimaksud dengan rencana kerja kerangka pendanaan adalah bagaimana suatu pemerintah daerah mampu membuat rencana kerja berdasarkan perkiraan jumlah dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, rencana kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah ini sangat tergantung kepada jumlah dan struktur anggaran yang dimiliki. Oleh karena itu, rencana kerja yang berbasis kerangka pendanaan sangat kaku dan tergantung jumlah dana.

Diharapkan dimasa mendatang, rencana kerja yang berbasis kerangka kerja pendanaan ini akan semakin berkurang. Dengan kata lain, rencana kerja yang dibuat pemerintah daerah lebih banyak berdasarkan kerangka regulasi, sedangkan pembiayaan/pendanaan lebih banyak dibiayai oleh pihak ketiga maupun masyarakat sendiri.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan dilakukan dengan cara menetapkan indikator kinerja untuk menggambarkan capaian penerapan strategi pembangunan. Indikator kinerja merupakan besaran yang terukur, sekaligus mencerminkan keadaan sebab – akibat pembangunan. Indikator kinerja yang dibuat dituangkan dalam bentuk Matriks Pengukuran Kinerja Pembangunan. Standar Kinerja Pembangunan adalah besaran-besaran target yang ingin dicapai untuk setiap indikator kinerja yang dipilih dan standar kinerja dapat dinyatakan sebagai batas bawah atau batas atas yang masih dapat diterima.

Pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana tampak dalam pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi relevan lainnya guna mengintepretasikan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan secara lebih luas dan mendalam. Dengan demikian perlu disusun analisis pencapaian akuntabilitas kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Dalam membuat analisis perlu dikemukakan keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang akan dilakukan (kebijakan) dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, visi, dan misi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya perlu pula dijelaskan proses dan nuansa pencapaian tujuan dan sasaran secara efisien, efektif, dan ekonomis sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

**Indikator Kinerja Pembangunan
Tahun 2008 – 2012**

No	Indikator Kinerja	Standar Kinerja				
		2008	2009	2010	2011	2012
I.	Pembangunan Infrastruktur					
	1. Jalan Kota :					
	a. Panjang Keseluruhan (Km)	650,940	659,790	664,290	667,803	672,303
	b. Kondisi Baik (Km)	270,080	285,041	300,041	317,000	331,000
	c. Kondisi Rusak Ringan (Km)	167,280	176,130	172,600	164,700	158,750
	d. Kondisi Rusak Berat (Km)	213,580	198,619	191,650	186,100	182,550
	2. Jembatan :					
	a. Jumlah Keseluruhan (Unit)	110	113	117	123	123
	b. Kondisi Baik (Unit)	107	110	114	120	120
	c. Kondisi Rusak Ringan (Unit)	1	2	2	2	3
	d. Kondisi Rusak Berat (Unit)	2	1	1	1	0
	3. Irigasi :					
	a. Panjang Keseluruhan (Km)	27,00	43,00	71,00	107,00	134,00
	b. Kondisi Baik (%)	30,00	57,00	65,00	76,00	80,00
	c. Kondisi Rusak Ringan (%)	20,00	13,00	15,00	14,00	20,00
	d. Kondisi Rusak Berat (%)	50,00	30,00	20,00	10,00	-
	e. Luas Areal Sawah Terairi (Ha)	1.782,00	2.574,00	3.031,00	3.617,00	4.132,00
	4. Cakupan Pelayanan Air Bersih (%)	37,00	34,00	35,00	42,00	47,00
	5. Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
II.	Pertumbuhan Ekonomi					
	1. Laju Pertumbuhan ekonomi	6,51	7,12	7,57	8,41	8,75
	2. PDRB per kapita (atas dasar harga berlaku)	11.653.354,39	13.371.118,84	15.088.883,29	17.665.529,96	19.383.294,41
	3. Indeks daya beli	61,12	62,40	63,72	65,06	65,97
	4. Indeks Pembangunan Manusia	74,07	75,42	76,69	77,89	78,70
	5. Ratio Penduduk Miskin	4,87%	4,85%	4,82%	4,81%	4,80%
III.	Aksesibilitas & Kualitas Kesehatan					
	1. Angka Kematian Bayi	100	90	80	70	60
	2. Angka Kematian Ibu Melahirkan	12	11	10	9	8
	3. Angka Harapan Hidup	68,84	69,42	69,82	70,58	71,06
	4. Prevalensi Kurang Gizi pada Anak	12,40%	11,90%	11,40%	10,90%	10,40%
	5. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	90%	92%	94%	96%	98%
IV.	Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan					
	1. Angka Melek Huruf	99,32	99,42	99,52	99,67	99,68
	2. Angka Partisipasi Sekolah menurut Tingkatan:					
	a. SD / MI	99,37%	99,45%	99,78%	99,91%	100%
	b. SLTP / M.Ts	93,57%	95,88%	96,29%	98,63%	100%
	c. SLTA / MA	88,48%	92,79%	94,90%	97,26%	100%
	3. Rata – Rata Lama Sekolah	9,81	10,59	11,38	11,79	12,1

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dimaksudkan untuk mengantisipasi kekosongan dasar hukum dalam menyusun RKPD dan APBD pada saat terjadi kekosongan kepala daerah.

A. PEDOMAN TRANSISI

Dalam menyusun RPJMD ini ditambahkan pula Program untuk 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJMD berakhir untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang berakhir sesuai dengan masa jabatan Walikota/Wakil Walikota Tasikmalaya yaitu pada tahun 2012. Dengan demikian program yang disusun dalam RPJM ini adalah program sampai tahun 2013 yang akan dilaksanakan oleh Walikota/Wakil Walikota periode selanjutnya. Program dan kegiatan pokok transisi melanjutkan program dan kegiatan pokok RPJMD 2008-2012 yang mencakup kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pemilihan kepala daerah.

Dalam implementasi program transisi ini, diperlukan komitmen dari semua unsur pemerintahan (*governance*) meliputi eksekutif, legislatif serta masyarakat Kota Tasikmalaya. Mengingat program seperti ini memerlukan kesabaran dan kesamaan visi, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan daerah.

B. KAIDAH PELAKSANAAN

Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar program, agar tercipta efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pamong (*governance*) yang baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih (*overlapping*) pelaksanaan antar program. Selain itu, tujuan adanya kaidah ini adalah kelanjutan program yang dilakukan. Dengan tata pamong yang baik, diharapkan implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya.

1. RPJM Daerah Merupakan Pedoman bagi SKPD dalam Menyusun Renstra SKPD

Dokumen RPJM Daerah Tahun 2008–2012 ini, merupakan penerjemahan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dengan demikian setelah dokumen ini tersusun dan ditetapkan dengan peraturan Daerah, maka dokumen ini harus diterjemahkan dalam kegiatan–kegiatan yang akan dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan pemerintahan daerah.

Walaupun demikian perlu ditegaskan disini, bahwa satuan kerja yang ada diharapkan bekerja dengan prinsip–prinsip efektifitas dan efisiensi. Dengan SKPD yang mengacu

terus kepada RPJM Daerah maka tata pamong yang baik (efisiensi dan efektifitas) akan mudah tercipta.

2. RPJM Daerah akan Digunakan dalam Penyusunan RKPD

Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah sebagai pedoman untuk penyusunan program-program dan kegiatan tahunan. Untuk itu, kegiatan – kegiatan yang diusulkan didalam RKPD harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan RPJM Daerah.

Dengan kata lain, penetapan prioritas program dan kegiatan akan muncul dalam RKPD yang diusulkan baik oleh eksekutif dan legislatif. Dalam RPJM Daerah, program-program yang ditawarkan memiliki dimensi umum dan masih perlu diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan riil.

Setelah kegiatan riil dijadwalkan dalam RKPD, maka pembiayaan dapat disusun. Dengan menggunakan prinsip “*money follows function*” maka kegiatan-kegiatan yang diusulkan akan memunculkan pembiayaan.

Sumber pembiayaan yang ada saat ini masih bersumber pada pemerintah (APBD). Dengan sumber pembiayaan hanya dari APBD yang terbatas, berdampak pada pilihan-pilihan kegiatan yang diusulkan. Untuk itu dimasa mendatang pembiayaan dari pihak ketiga, yakni swasta maupun masyarakat (*public-private partnership*), perlu digali dan dimanfaatkan. Dengan semakin banyaknya alternatif sumber-sumber pembiayaan, maka kegiatan yang diusulkan akan semakin besar cakupan dan area/luasan programnya.

3. Penguatan Peran Para Stakeholders/Pelaku dalam Pelaksanaan RPJM Daerah

Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah ini disusun dengan menggunakan proses partisipatif. Dimulai dengan pembentukan tim yang melibatkan perwakilan antar dinas di lingkungan pemerintah Kota dengan dikoordinasi oleh Bapeda. Setelah itu, hasil kerjanya ini disosialisasikan kepada *stakeholders* baik dari kalangan perguruan tinggi, LSM maupun masyarakat melalui penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang Jangka Menengah Kota Tasikmalaya. Setelah adanya masukan dan kritik, perbaikan laporan dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar untuk penajaman konsep. Dengan melalui proses tersebut, diharapkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan.

4. Merupakan Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas Kinerja Lima Tahunan dan Tahunan

Dengan adanya dokumen RPJM Daerah ini, akan sangat membantu kepala daerah untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan serta penerjemahan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan adanya pandangan tersebut, diharapkan RPJM Daerah ini menunjukkan indikator-indikator yang jelas

dan terukur agar diperoleh cara yang mudah untuk melihat keberhasilan pemimpin/kepala daerah.

Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah ini juga akan menjadi acuan bagi RKPD yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan demikian kepala daerah nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun lima tahunan yang sudah ada dalam RPJMD.

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT